

Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M. Pd., M. Si

GURU SEBUAH IDENTITAS



GURU

Sebuah Identitas

Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M. Pd., M. Si



GURU

Sebuah Identitas

Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M. Pd., M. Si



Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M.Pd., M.Si

GURU

SEBUAH IDENTITAS



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Guru : Sebuah Identitas

Penulis:

Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M.Pd., M.Si

Editor:

Misykat.

Cetakan: I 2013

xvi+236 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978 602 237 713 9

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

SAMBUTAN REKTOR

Perubahan tidak selamanya membawa perbaikan. Akan tetapi, setiap perbaikan pasti memerlukan perubahan.

Demikian ungkapan bijak Sang Motivator
Mario Teguh dalam *Mario Teguh's Quotes*.

Perubahan dan perbaikan merupakan dua frase yang menjadi *core values* bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil terbaik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw. menyatakan “Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia rugi/tertipu”.

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan arus zaman, akan digilas oleh roda perubahan yang terus menggelinding mengitari perputaran waktu.

Semangat perubahan yang digagas oleh Rektor dilandasi oleh visi dan misi mulia untuk menjadikan UIN Alauddin sebagai kampus peradaban melalui transformasi ipteks dan pengembangan *capacity building*. UIN Alauddin ingin membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak saja menggali doktrin-doktrin agama yang normatif tetapi berusaha menarik wilayah dogmatis itu ke dalam ranah praktis aktual, membumi dan dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

Rektor sangat menyadari bahwa di era postmodernisme ini, masyarakat mulai kritis mempertanyakan jaminan bagi *output* lembaga pendidikan tinggi. Perkembangan zaman yang semakin maju memicu dan memacu lahirnya semangat kompetitif di tengah masyarakat, tidak terkecuali dunia perguruan tinggi. Lembaga pendidikan yang tidak sanggup

menghadapi perubahan dan persaingan, perlahan namun pasti akan ditinggalkan masyarakat. Saya hanya khawatir jika lembaga pendidikan Islam tidak berubah dan tidak mampu membaca arah perubahan, maka ia hanya akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua di tengah masyarakat yang mayoritas muslim atau menjadi lembaga alternatif terakhir bagi mereka yang menemui jalan buntu masuk ke perguruan tinggi pilihan utama.

Atas dasar itu, Rektor berupaya melakukan sejumlah terobosan dan strategi untuk memperkokoh jatidiri almamater melalui sejumlah gerakan perubahan, baik perubahan mental (dari analog ke mental digital) maupun perubahan fisik.

Hadirnya buku dari program GSB pada tahun ketiga kali ini merupakan realisasi dari visi-misi Rektor, sekaligus respon atas fenomena perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa kesadaran akan pentingnya perubahan dan perbaikan ini tidak saja dipandang sebagai sebuah doktrin institusional, tetapi sebagai sebuah ladang amal saleh sebagai implikasi dari pengamalan firman Allah dan sunnah Rasulullah saw.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku GSB kali ini, semoga program ini menjadi pioner dan *Institutional branding* bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun penguatan *inner capacity* bagi civitas akademika UIN Alauddin.

Samata, November 2013
Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'aalamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT semata, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan buku yang berjudul **GURU: SEBUAH IDENTITAS**. Shalawat dan salam, serta kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah kepada Baginda Rasullullah saw penyempurna risalah Ilahi, dan rahmatan lilalamin, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah, akhirnya buku ini dapat dipublikasikan. Buku ini disusun dengan maksud membantu para praktisi pendidikan, mulai dari guru, dosen, instruktur, widyaiswara, penilik, pengawas, para pengembang, pengelola, dan penentu kebijakan serta siapa saja yang menaruh minat dalam bidang kependidikan, kiranya buku ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan proses pendidikan, dan bahan untuk mengingatkan kembali dalam profesinya sebagai pendidik dan bukan hanya pengajar. Selain dari hal tersebut, buku ini juga diharapkan bermanfaat untuk para mahasiswa kependidikan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) FKIP, STKIP, dan UIN, IAIN, STAIN yang memiliki Fakultas dan atau Jurusan Ilmu Pendidikan (Fakultas Tarbiyah), sebagai referensi dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan, di perguruan tinggi.

Penulis sangat menyadari, bahwa tulisan ini tentu tidak akan pernah ada jika tidak didukung dan dibantu oleh mereka, yang banyak terlibat dalam penulisan ini. Karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing H.T., M.S. selaku, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang

selalu mendorong para dosen untuk senantiasa meningkatkan potensi *inner capacity*.

2. Panitia penyelenggara penyusunan Gerakan Seribu Buku Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2013 yang dengan sabar senantiasa mendorong dan mengingatkan agar penulisan Gerakan Seribu Buku dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam buku ini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan tegur sapa dari para pembaca, terutama dari pakar pendidikan agar dapat lebih disempurnakan lagi sehingga buku ini akan memberi manfaat yang maksimal.

Makassar, Agustus 2013
Penulis

Dr. Muh. Ilyas Ismail, M.Pd., M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	

BAB I

GURU: SOSOK YANG HARUS CERDAS

A. Pendahuluan.....	1
B. Guru: Pedagogik, Didaktik Metodik	1
C. Guru; Transformasi Tatanilai dan Model Perubahan.....	6
D. Guru yang Cerdas Sebuah Tuntutan.....	8

BAB II

PENGEMBANGAN GURU: KEWAJIBAN YANG TERABAIKAN

A. Pendahuluan	15
B. Kondisi Guru di Indonesia.....	15
C. Peningkatan Kemampuan Guru.....	17
D. Pengembangan Kompetensi Guru.....	18
E. Pelatihan Bagi Guru.....	20

BAB III

GURU: MEMBANGUN MANUSIA BERBUDAYA

A. Pendahuluan	23
B. Guru Model Manusia Berbudaya	24
C. Peran Guru Membentuk Manusia Berbudaya	27
D. Peran Guru dalam Pendidikan Nilai Budaya .	31

BAB IV

GURU PROFESIONAL : PENCERDASAN YANG TAK PERNAH HENTI

A. Pendahuluan	35
B. Guru dan Permasalahannya.....	36
C. Membangun Citra Guru yang Profesional.....	43
D. Masa Depan Guru di Tengah Masyarakat Modern.....	46

BAB V

GURU: ANTARA KOMPETENSI dan KINERJA

A. Pendahuluan	65
B. Kinerja Guru.....	67
C. Kompetensi Guru.....	77
D. Kompetensi Guru Menurut Undang-Undang	82

BAB VI

GURU: DIPANDANG SEBELAH MATA

A. Pendahuluan	87
B. Guru dengan Mutu Pendidikan Rendah.....	90
C. Guru dengan Lembaga Pendidikan.....	104
D. Guru di Pandang Sebelah Mata	110
E. Guru dan Penelitian Tidakan Kelas.....	115

BAB VII

HOME SCHOOLING SEBUAH PENDIDIKAN ALTERNATIF

A. Pendahuluan	121
B. Guru sebagai Model Sepanjang Masa	122
C. Seberapa Besar Guru Dihargai.....	129
D. Belajar dari Negara Tetangga bagaimana menghargai guru.....	142
E. Penghargaan pada Guru tidak memadai.....	146

BAB VIII

GURU: PENDIDIK INTELEKTUAL

A. Pendahuluan	165
B. Teori Intelegensi Ganda.....	168

C. Metode Hubungan Kausalitas John Stuart Mill	172
D. Kebiasaan Bertanya dalam Pembelajaran	177
E. Demokrasi dalam Pendidikan.....	180
F. Diskusi Sebagai Bentuk Latihan Intelektual ...	186
G. Latihan dan Pembiasaan.....	195
H. Tantangan Berpikir dan Pengembangan Intelektual.....	202

BAB I

GURU: SOSOK YANG HARUS CERDAS

A. Pendahuluan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, guru memegang peranan penting karena gurulah yang berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan. Sebagai tokoh sentral guru harus dapat diteladani, menjadi tempat bertanya bagi orang awam, menjadi pelopor dalam melakukan kegiatan pendidikan termasuk mereformasi pendidikan jika diperlukan.

Kualitas atau mutu guru memang sangat beragam. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa tingkat penguasaan materi ajar, penggunaan metode mengajar serta kreativitas yang inovatif masih sangat kurang. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar guru SD, sekitar 50% guru SMP dan sekitar 20% guru SMA masih berpendidikan kurang (*underqualified*) dari yang dituntut seharusnya.¹

Salah satu pendorong dinamika dan gerak peradaban adalah pendidikan. Maju mundurnya dunia pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Gurulah yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan sehingga mereka memiliki peran strategis dalam “melahirkan” anak-anak bangsa, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, sosial, dan spiritual. Namun, agaknya apresiasi masyarakat dan pemerintah pun masih menimbulkan tanda tanya. Sudahkah masyarakat memposisikan guru pada aras yang sebenarnya? Bagaimanakah perhatian pemerintah dalam

¹Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21 (SPTK-21)*. Jakarta: Depdiknas, p. 262.

mengangkat harkat dan kehormatan guru selain melalui lagu “Hymne Guru” yang lebih terasa sebagai sebuah sindiran dan parodi ketimbang penghormatan? Sudah siapkah guru menjadi panutan bagi siswanya?

Daftar pertanyaan semacam itu masih bisa terus bertambah seiring dengan makin banyaknya derita guru, mulai dari penghasilannya yang pas-pasan, guru tukang ojek, hingga penjual rokok ketengan. Dus, dari sisi mana pun jadi guru itu sangat tidak menguntungkan. Secara sosial, guru tak jarang mendapatkan perlakuan “istimewa” sehingga pantang berbuat khilaf dan dosa. Secara ekonomi sangat jelas. Penghasilan guru belum menjanjikan untuk bisa hidup layak. Rumah pun terpaksa masih ngontrak. Kalau mampu beli, umumnya mereka pilih rumah tipe RSSSSSSSS (Rumah sangat sederhana sekali sampai-sampai selonjor saja susah sekali.) model kreditan. Dari segi akademikpun, masih banyak guru yang mempunyai kemampuan yang pas-pasan.

Sementara itu, jika kita melihat fakta di lapangan, banyak kalangan mulai meragukan kapabilitas dan kredibilitas guru. Perannya sebagai pengajar dan pendidik mulai dipertanyakan. Misinya sebagai pencetak generasi terampil dan bermoral belum sepenuhnya terwujud. Para pelajar kita justru kian menjauh dari kondisi ideal seperti yang diharapkan. Yang lebih memperihatinkan, para pelajar itu dinilai mulai kehilangan kepekaan moral, terbius ke dalam atmosfer zaman yang serba gemerlap, tersihir oleh peri kehidupan yang memburu selera dan kemaanjaan nafsu, terjebak ke dalam sikap hidup instan. Tawuran antar pelajar merajalela, pesta “pil setan” menyeruak, pergaulan bebas semakin mencuat ke permukaan.

B. Guru: Pedagogik, Didaktik, Metodik

‘Ilmu guru’ dahulu, pada dasarnya terdiri dari tiga pelajaran: pedagogik, didaktik, dan metodik. Istilah pedagogik diterjemahkan dengan kata ‘ilmu mendidik’ dan yang dibahas

adalah bagaimana mengasuh dan membesarkan anak orang. 'Didaktik' adalah pengetahuan tentang interaksi belajar mengajar secara umum. Yang dipelajari antara lain cara membuat persiapan pengajaran, cara menyalin bahan-bahan pelajaran, dan cara menilai hasil pelajaran. Sedangkan 'Metodik' adalah pengetahuan tentang cara mengajarkan suatu bidang pengetahuan. Beberapa mata pelajaran dipandang memerlukan cara-cara khusus untuk menyajikannya, dan untuk ini dikembangkan metodik khusus.

Dengan sistem yang tidak memisah-misahkan 'ilmu guru' dari 'pengetahuan umum' dan 'pengetahuan dasar' ini setiap tamatan sekolah guru mempunyai kemampuan mendidik siswa-siswanya melalui sejumlah media pendidikan, MIPA, IPS dan lain-lain yang cukup dikuasainya. Secara institusional, tujuan sekolah guru dalam mengajarkan berbagai mata pelajaran dari kategori 'pengetahuan umum' adalah agar para calon guru mampu mempergunakan berbagai ilmu tersebut sebagai sarana pekerjaan pendidik, sebagai media pendidikan.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan difokuskan kepada upaya pengidentifikasian langkah-langkah yang interaksinya akan melahirkan pertemuan (tatap muka) guru-murid yang bermutu. Apa saja yang harus kita lakukan untuk membantu guru-guru di sekolah, sehingga mampu mengadakan pertemuan (tatap muka) yang baik dengan murid-muridnya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun?

Dari endapan berbagai jenis pengalaman pendidikan, sampailah pada kesimpulan bahwa, yang dinamakan 'mutu pendidikan' itu pada akhirnya adalah keseluruhan dari mutu setiap perjumpaan guru-murid yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Suatu perjumpaan guru-murid dapat dikatakan bermutu apabila perjumpaan tadi berdampak atau terasa membantu perkembangan diri murid. Sebaliknya suatu perjumpaan guru-murid harus dipandang tidak bermutu

apabila perjumpaan tadi tidak berdampak mendorong atau tidak terasa mendorong perkembangan diri murid atau lebih parah lagi: menghambat perkembangan diri murid. Jadi perjumpaan guru-murid yang ditandai oleh murid-murid yang mengantuk atau murid-murid yang tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan guru bukanlah suatu perjumpaan yang bermutu.

Episode-episode pedagogis dari masa lampau melintas kembali, tentang kualitas pendidikan. Pertanyaan yang selalu muncul adalah: Haruskah proses kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia dewasa ini berlangsung secara berlarut-larut, tanpa dapat dihentikan? Pertanyaan ini membuat saya bertanya-tanya lebih lanjut: Apa sebenarnya merupakan inti pendidikan yang bermutu? Guru, kurikulum, peralatan, atau sesuatu yang lain lagi?

Menurut para ahli, ada lima faktor yang sangat mempengaruhi kualitas perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya. Kelima faktor ini ialah: (1) jenis kewenangan yang benar-benar diserahkan kepada guru; (2) kualitas atasan yang mengawasi dan mengontrol perilaku guru; (3) kebebasan yang diberikan kepada guru, baik di dalam maupun di luar kelas; (4) hubungan guru dengan murid-muridnya; (5) pengetahuan guru tentang dirinya sendiri dan kepercayaan terhadap diri sendiri.² Kalau dilihat, bahwa tiga faktor pertama merupakan persoalan-persoalan yang terletak seluruhnya dalam daerah kekuasaan birokrasi pendidikan, sedangkan dua faktor yang terakhir merupakan persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan oleh para guru sendiri. Dengan demikian masalah peningkatan kualitas guru tidak hanya bergantung kepada para guru sendiri, melainkan sangat dipengaruhi pula oleh sikap birokrasi pendidikan. Dalam kerangka ini persoalan

² Munawar Sholeh. 2007. *Cita-cita Realita Pendidikan*. Jakarta: Institute for Public Education. P. 126.

hubungan guru dengan birokrasi pendidikan lalu menjadi persoalan yang perlu dievaluasi secara terus-menerus.

Kata orang lagi, guru yang baik adalah guru yang mampu melaksanakan *inspiring teaching*, yaitu guru yang melalui kegiatan mengajarnya mampu mengilhami murid-muridnya. Melalui kegiatan mengajar yang memberikan ilham ini guru yang baik menghidupkan gagasan-gagasan yang besar, keinginan yang besar pada murid-muridnya. Kemampuan ini harus dikembangkan, harus ditumbuhkan sedikit demi sedikit. Untuk itu guru harus menyisihkan waktu untuk mencernakan pengalamannya sehari-hari dan memperluas pengetahuannya secara terus-menerus. Nah, untuk menjadi guru yang baik, disamping mengajar ia harus terus banyak membaca dan merenung. Untuk itu, maka guru memerlukan waktu. Kalau waktu dihabiskan untuk mengajar setiap hari, dari pagi sampai malam, tidak akan ada kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kemampuannya sebagai pendidik. Dengan demikian tidak ada harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa ini.

Untuk itu, marilah kita bantu guru untuk dapat melaksanakan tugas mereka yang sungguh tidak ringan. Menurut pikiran saya, guru yang cerdaslah yang dibutuhkan, cerdas untuk membagi waktu, merenung, membaca, dan memperluas ilmu secara terus-menerus.

Dari segi kurikulum, memang terdapat beberapa pembaruan di Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pembaruan itu menyangkut "ruang kreativitas" yang mesti diisi guru yang bersangkutan untuk mengembangkan bahan ajar, disesuaikan dengan situasi daerah, dan minat anak didik. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dideskripsikan kompetensi dasar, dijabarkan indikator, dan bahkan dipetakan pula materi pokok pelajaran. Dalam KTSP hanya dideskripsikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru sendiri yang mesti menentukan indikator dan materi pokok pelajaran, disesuaikan dengan situasi daerah dan minat

anak didik. Hal ini sangat menguntungkan, sehingga kreativitas dan kecerdasan guru sangat dibutuhkan.

C. Guru: Transformasi Tatanilai dan Perubahan Model

"Digugu lan ditiru" itulah ungkapan untuk seorang guru. Artinya guru adalah orang yang harus selalu dapat ditaati dan diikuti. Tetapi dalam masyarakat yang sedang mengalami proses transformasi kultural seperti masyarakat sekarang, persoalan pengembangan model-model baru untuk mengganti model yang klasik. Berdasarkan kenyataan, timbulnya berbagai model guru dalam dunia pendidikan, ada model yang bersifat 'progresif' yang ditandai oleh keinginan untuk menyongsong perkembangan-perkembangan baru: Model ini bersikap antisipatoris. Sebaliknya ada pula model yang bersifat 'konservatif' yang ditandai oleh keinginan untuk memelihara dan tetap menerapkan cara-cara mendidik yang telah ada. Model ini cenderung untuk berorientasi ke masa lalu.³

Pada tulisan ini akan diberikan ilustrasi suatu personifikasi dari model progresif. Seorang teman yang sangat benci sekali kepada guru-guru tipe kuno, yang menurut beliau berhenti belajar pada saat ujian berakhir selesai ditempuh. "Guru yang begitu pengetahuannya pas-pasan". Begitu beliau menjelaskan. Kalau ada perubahan kurikulum, dia akan kelabakan. Lalu kalau mengajar, ngomongnya tidak mantap, tidak meyakinkan. Kalau ada murid bertanya, lalu marah. Lalu ia akan berteriak: Diamlah, perhatikan saja apa yang saya katakan. Pada waktu ujian, kalau ada murid yang memberikan jawaban yang berbeda dengan rumusan yang sudah dia berikan, maka murid tersebut tidak akan lulus. Meskipun mungkin jawaban sang murid lebih baik daripada rumusan yang diketahuinya, dan yang ada, hasilnya akan membuat

³ Mochtar Buchori, 1994. *Spektrum Problematika Pendidikan Di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, P. 105.

murid menjadi frustrasi. Nah inilah yang disebut dengan dosa pedagogik.

Seorang guru harus berpengalaman luas. Dia harus terus belajar. Pergaulan dan bacaannyapun harus luas. Jangan hanya bergaul dengan sesama guru! Apalagi teman sesama guru dari satu sekolah atau teman sesama guru yang mengajar mata pelajaran yang sama.⁴ Dari ilustrasi di atas dapat diambil makna bahwa jadi guru harus siap baik pedagogik, didaktik, maupun metodenya. Jadi guru yang malas belajar pada dasarnya tidak akan dapat menghasilkan murid-murid yang cinta belajar. Guru yang kemampuannya hanya membeo, tidak mampu berpikir sendiri, pada dasarnya tidak akan dapat membuahtkan murid-murid yang berani berpikir sendiri, orang-orang yang kritis dan kreatif. Demikian makna prinsip pedagogis.

Unsur-unsur baru dalam model yang sedang kita cari akan berupa konsekuen-konsekuen dari pemahaman kita terhadap sifat transformasi sosio-kultural yang sedang kita jalani saat ini. Demi keselamatan Bangsa Indonesia di masa depan generasi harus lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih ulet. Untuk membenahi beragam persoalan tersebut, perlu dikembalikan pada hakikat pendidikan. Merujuk rumusan arti, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003, maka pendidikan di Indonesia harus bisa membaharui dan membebaskan. Untuk mencapai rumusan ideal tersebut, perubahan paradigma belajar harus terjadi, dari yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. "Yang terjadi selama ini paradigma belajar yang terpusat pada guru, di mana guru lebih aktif dan murid cenderung pasif. Materi pembelajaran standar dan seragam, sementara sumber pembelajaran dari buku pelajaran dan terbatas di ruang kelas. Pola ini hanya menghasilkan reproduksi pengetahuan.

⁴ Mochtar Buchori, op.cit., P. 108.

Perubahan paradigma yang berpusat pada siswa atau *student center learning* yang dimaksudkannya adalah murid yang lebih aktif dan guru hanya menjadi fasilitator. Sumber belajar tidak lagi terbatas pada buku pelajaran atau hanya di dalam ruang kelas. Dengan pola ini diharapkan akan terjadi proses produksi pengetahuan, sehingga mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. "Dalam konteks ini, organisasi guru seperti KKG, MGMP diperlukan untuk menerjemahkan gagasan paradigma *student center learning* ke dalam praktik kelas. Masyarakat, guru harus menjadi pelopor dalam perubahan paradigma, memiliki konsep yang selanjutnya diperjuangkan dan dipraktikkan.

D. Guru Yang Cerdas Sebuah Tuntutan

Guru yang cerdas adalah guru yang senantiasa ingin belajar menjadi guru yang cerdas. Guru yang tidak cerdas adalah guru yang hanya mengajar, mengikuti training, mengikuti pelatihan untuk memenuhi kredit kenaikan pangkat. Guru yang lebih cerdas adalah guru yang senantiasa belajar mengenai ilmunya, peduli terhadap perkembangan pendidikan di lingkungannya, harus berdiskusi melalui forum guru, peka terhadap masalah yang muncul, selalu bertanya 'Mengapa ?' dan sekaligus mencari tahu jawabannya.

Ibarat serdadu, guru di medan pendidikan mengemban misi memerdekakan generasi bangsa dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan. Mereka berada di garda depan dalam "menciptakan" generasi-generasi muda yang cerdas, terampil, tangguh, kreatif, penuh inisiatif, bermoral tinggi, berwawasan luas, memiliki basis spiritual yang kuat, dan beretos kerja andal, sehingga kelak mampu menghadapi kerasnya tantangan peradaban.

Mengemban misi tersebut jelas bukan tugas yang ringan. Selain harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup, guru juga dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi dan keterampilan mengajar yang dapat diandalkan,

sehingga mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif, sehat, dan menyenangkan. Hanya dengan bekal ideal tersebut, guru akan tampil sebagai figur yang benar-benar mumpuni, disegani, dan digugu lan ditiru (dipercaya dan teladani). Menurut versi UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan PP 19/2009 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru mesti memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan dan menguasai empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional).

Upaya yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dan kondusif adalah dengan cara menyediakan guru yang berkualitas dan profesional. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 mengamanatkan, bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, antara lain memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas tersebut. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa kualifikasi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi jenjang S1 atau D4. Kualifikasi akademik guru merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diambalnya.

Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi yang perlu mendapat perhatian, mengingat kenyataan di lapangan belum sesuai dengan tuntutan undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut. Berdasarkan data Ditjen PMPTK, bahwa secara nasional (2.245.952 guru) yang berkualifikasi minimal S1 atau D4 adalah sebesar 837.460 (37,3 %), dan sisanya 1.408.492 (62,7%) adalah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik, minimal yang diamanatkan oleh undang-undang. Agar sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang,

maka guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 perlu ditingkatkan kualifikasinya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan memberikan subsidi peningkatan kualifikasi guru bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi minimum.

Melalui peningkatan kualifikasi guru diharapkan dapat membawa dampak terhadap terlaksananya proses pembelajaran dengan terciptanya suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Selanjutnya menyikapi guru ke depan adalah guru yang profesional. Pemerintah telah mengeluarkan Standar Kompetensi Guru yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru yang dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Berikut dijelaskan keempat kompetensi tersebut yang terintegrasi dalam kinerja guru.

Kompetensi Pedagogik:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual;
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik;
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik;

6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki;
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar;
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran;
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi Kepribadian:

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
4. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri;
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi Sosial:

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;
2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat;
3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya;
4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi Profesional:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu;
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu;
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif;
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif;
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Indonesia sangat membutuhkan guru-guru yang cerdas, berkualitas dan berintegritas. Dunia pendidikan sangat menginginkan mereka untuk memahami dan menerjemahkan kurikulum secara cerdas serta mencari, menemukan dan mengembangkan bahan dan media pengajaran. Orang-orang inilah yang akan mampu mengembangkan tes dan sistem pengujian yang tepat serta senantiasa mengembangkan wawasan untuk menunjang profesinya. PR bagi kita semua, untuk dapat menciptakan dan mempertahankan guru yang cerdas di negeri ini sesuai dengan Permen No. 16 tahun 2007. Guru cerdas mungkin bukan satu-satunya solusi agar tiap murid di negeri ini bisa menghargai pendidikan, tapi juga semua elemen yang ada di masyarakat. Orang tua dan si pelajar sendiri juga patut diperhitungkan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menjadi sosok guru yang cerdas, seorang guru perlu menguasai 'Ilmu guru', pada dasarnya terdiri dari tiga pelajaran: pedagogik, didaktik, dan metodik. Istilah pedagogik diterjemahkan dengan kata 'ilmu mendidik' dan yang dibahas adalah bagaimana mengasuh dan membesarkan anak orang. 'Didaktik' adalah pengetahuan tentang interaksi belajar mengajar secara umum. Sedangkan

'Metodik' adalah pengetahuan tentang cara mengajarkan suatu bidang pengetahuan.

2. Dalam KTSP hanya dideskripsikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru sendiri yang mesti menentukan indikator dan materi pokok pelajaran, disesuaikan dengan situasi daerah dan minat anak didik. Hal ini sangat menguntungkan, sehingga kreativitas, kecerdasan guru sangat dibutuhkan.
3. Perubahan paradigma yang berpusat pada siswa atau *studentcenter learning* yang dimaksudkannya adalah murid yang lebih aktif dan guru hanya menjadi fasilitator. Di sini guru harus cerdas dalam memfasilitasi segala situasi yang muncul. Sumber belajar tidak lagi terbatas pada buku pelajaran atau hanya di dalam ruang kelas. Dengan pola ini diharapkan akan terjadi proses produksi pengetahuan, sehingga mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.
4. Guru yang cerdas adalah guru yang senantiasa ingin belajar menjadi guru yang cerdas. Guru yang tidak cerdas adalah guru yang hanya mengajar, mengikuti training, mengikuti pelatihan untuk memenuhi kredit kenaikan pangkat.

Guru yang cerdas adalah guru yang profesional. Pemerintah telah mengeluarkan Standar Kompetensi Guru yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

BAB II

PENGEMBANGAN GURU: KEWAJIBAN YANG TERABAIKAN

A. Pendahuluan

Pendidikan menjadi barometer kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya kebijakan pemerintah dalam pendidikan haruslah mengacu kepada suatu upaya strategi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan menuntun kepada suatu sistem kerja yang tidak parsial, karena penyelenggaraan pendidikan terjadi karena adanya jaringan kerja sama dari berbagai komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan (sekolah) ataupun lembaga lain.

Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan adalah guru. Guru sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada di garis depan berhadapan dengan siswa, dituntut memiliki kompetensi yang memadai. Melalui guru penanaman nilai-nilai dan pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan kekinian dan masa depan dapat berlangsung. Namun apa yang terjadi di lapangan, masih jauh panggang dari api. Kondisi guru di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Mengingat tugas guru begitu berat maka perlunya guru untuk selalu di-*update* pengetahuan, wawasan, keterampilannya menuju kepada pengembangan profesi yang diharapkan. Menurut Ace Suryadi (2001) telah ditemukan di berbagai studi bahwa mutu guru secara konsisten menjadi salah satu faktor terpenting dari mutu pendidikan. Lebih lanjut, guru yang bermutu mampu membelajarkan murid secara efektif sesuai dengan kendala sumber daya dan lingkungan.

B. Kondisi Guru di Indonesia

Saat ini banyak ditemui tenaga pengajar yang belum memenuhi standar. Belum terpenuhinya standar itu, dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan bagaimana mereka menyampaikan materi. Banyak guru yang tingkat pendidikannya belum memenuhi standar S-1. Fakta di

lapangan menunjukkan bahwa 65 persen guru di Indonesia belum menyelesaikan S1 atau diploma empat (D4). Tingkat pendidikan yang dimiliki masih setaraf D-2 dan D-3. Ini akan berpengaruh terhadap materi yang disampaikan. Meskipun sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen, pemerintah berkewajiban meningkatkan kualifikasi mereka. Mengingat masih tersisa 65% guru yang belum S1 atau D4 dibandingkan ketika UU ditandatangani hanya 30% guru memenuhi persyaratan.

Banyak guru yang tidak menguasai materi, disebabkan guru mengajar tidak sesuai bidangnya. Misalnya, guru Fisika merangkap mengajar Matematika. Karena tidak sesuai dengan bidangnya, maka penyampaian materinya pun tidak bisa optimal.

Dengan tidak terpenuhinya standar guru, wajar apabila beberapa waktu lalu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali mengusulkan agar pemerintah menanggukkan pengangkatan guru kontrak. Alasannya dedikasi dan kualifikasi guru kontrak yang akan direkrut jauh dari harapan yang seharusnya. Yang semestinya harus diangkat adalah guru-guru yang kompeten, berdedikasi, dan berkualifikasi.

Sementara guru-guru kontrak yang ada ditingkatkan kemampuan dan profesionalismenya, dengan mengangkatnya menjadi guru tetap. Selektivitas dalam pengangkatan guru tetap melalui kriteria yang cukup ketat, agar didapatkan guru yang mempunyai komitmen dan semangat belajar untuk mampu memberikan suasana pembelajaran yang kondusif dan menjadi teladan bagi peserta didik.

Strategi pengembangan tenaga pendidik yang visioner penting dan darurat untuk segera dibenahi mengingat berbagai instrumen daya saing Indonesia semakin melorot. Bahkan beberapa tahun terakhir hasil kajian yang dikeluarkan *global competitiveness report*, yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum*, menunjukkan terpuruknya kita dalam berkompetisi dengan negara lain. Hal ini semakin memperukuh kita sebagai bangsa yang masih tidak sadar akan pentingnya *human capital development* (HCD).

Hasilnya indeks saing pertumbuhan (*growth competitiveness Index* (GCI) Indonesia makin melorot menempati urutan ke-67 dari 80 negara, di bawah Filipina dan Vietnam. Dan, bukan tak mungkin tidak lama lagi Kamboja pun akan menyalip kita, bila kesadaran hanya sebatas nikmatnya hangar-bingara wacana dan langkah-langkah strategis yang mengantisipasi ke depan, jauh dari harapan.

Pengembangan tenaga pendidik, tidak semata-mata asal ada, dengan kualitas yang tidak memadai serta tanpa disertai detail perencanaan yang matang. Apalagi kalau lokakarya itu didanai oleh pinjaman Bank Dunia. Pengembangan guru juga tidak hanya menyekolahkan guru asal mendapat gelar. Manakala hasil temuan dari sebuah *LSM Education Watch* baru-baru ini menunjukkan kecenderungan jual beli gelar semakin meningkat dari lembaga pendidikan tinggi kita. Bahkan terdapat lebih dari seratus perguruan tinggi ilegal dan bermasalah dalam hal persyaratan pendirian, tenaga pendidik dan statuta.

C. Peningkatan Kemampuan Guru

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui UU No. 14 Tahun 2005 pasal 7 mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Di samping itu menurut pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas, selayaknya pemerintah melalui Depdiknas/Ditjen PMPTK untuk memfasilitasi terlaksananya pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan agar kompetensi guru sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Unsur-unsur yang berperan dalam peningkatan profesionalisme guru diantaranya adalah KKG/MGMP, LPMP/ P4TK, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Pemerintah Daerah. Di samping itu organisasi profesi, perguruan tinggi, industri dan patner internasional merupakan unsur yang dapat berperan secara signifikan dalam peningkatan profesionalisme guru berkelanjutan.

Karena itu, rencana pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sebaiknya disertai dengan pemetaan terhadap permasalahan pendidikan. Melalui pemetaan tersebut, pengalokasian anggaran menjadi lebih tepat sasaran, seperti masalah guru. Saat ini banyak ditemui tenaga pengajar yang belum memenuhi standar. Belum terpenuhinya standar itu, dapat dilihat dari

tingkat pendidikan dan bagaimana mereka menyampaikan materi. Menurut dia, banyak guru yang tingkat pendidikannya belum memenuhi standar S-1. Tingkat pendidikan yang dimiliki masih setaraf D-2 dan D-3. Ini akan berpengaruh terhadap materi yang disampaikan. Di samping belum memenuhi standar, mungkin banyak guru yang tidak menguasai materi. Kondisi ini disebabkan guru mengajar tidak sesuai bidangnya. Misalnya, guru Fisika merangkap mengajar Matematika. Karena tidak sesuai dengan bidangnya, maka penyampaian materinya pun tidak bisa optimal.

Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran tidak bisa berlangsung baik. Dalam hal ini, pemetaan juga perlu dilakukan. Hal ini untuk mengetahui bagian-bagian mana saja yang perlu segera diperbaiki dan mana yang tidak. Depdiknas sampai ke Dinas Pendidikan, harus menggunakan anggaran itu untuk peningkatan mutu pendidikan. Sarana dan prasarana yang lengkap tidak akan membantu peningkatan mutu pendidikan, apabila pendidiknya belum memiliki kualitas.

Sebab berdasarkan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, anggaran pendidikan tersebut lebih diprioritaskan pada pengembangan dan peningkatan mutu guru. Hal itu bukan berarti komponen lain terus dibiarkan, tetapi utamakan dahulu untuk guru. Apalagi dananya kan besar. Selain mutu pendidik, hal lain yang sebaiknya diperhatikan oleh Dinas Pendidikan adalah peningkatan kualitas proses pembelajaran. Dalam hal ini, beberapa komponen di dalamnya adalah sarana penunjang pendidikan seperti fasilitas sekolah dan buku pelajaran. Yang lebih penting, seharusnya jangan hanya mengejar persentase, yang penting proporsional. Namun kalau dananya besar dan proporsional, tentu akan lebih baik lagi. Ini tugas berat Dinas Pendidikan untuk mewujudkannya.

D. Pengembangan Kompetensi Guru

Kompetensi guru dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pendekatan ini berasumsi bahwa perubahan kurikulum dibebankan oleh pengelola pendidikan atau tenaga ahli dari luar. Kompetensi guru dapat dikembangkan secara mudah untuk memuaskan semua kebutuhan dan kurikulum sekolah.

Konsep pengembangan profesionalisme guru melalui KKG/MGMP berorientasi pada proses. Artinya pentahapan proses

menuju guru profesional mendapat penekanan penuh. Guru dipandang sebagai individu-individu yang dapat berkembang jika terjadi proses internal untuk berkembang di dalam diri para guru tersebut. Proses internal dalam diri guru akan tumbuh jika guru masuk dalam jangkauan informasi dalam jumlah mencukupi dan terus menerus. Embrio kemauan berkembang ini akan menghantarkan guru untuk mencari teman seprofesinya atau kelompok seprofesinya guna *sharing* dan berdiskusi. Kelompok-kelompok guru ini dapat berupa kelompok informal maupun formal. Kelompok formal yang ada diantaranya adalah KKG/MGMP. Di dalam KKG/MGMP para guru akan saling mendapatkan lebih banyak informasi lagi yang semakin mempercepat proses internalisasi kemajuan.

Jika KKG/MGMP tersebut disinergikan dengan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh LPMP/P4TK sesuai dengan bidang studinya maka kelompok tersebut akan dapat tumbuh. Keterlibatan kepala sekolah dengan KKKS/MKKS dan pengawas sekolah dengan KKPS/MKPS, asosiasi profesi dan Pemerinath Dacrah setempat memberikan dukungan dan memfasilitasi, maka guru melalui proses KKG/MGMP akan dapat berkembang.

Keberlangsungan perkembangannya guru ditentukan oleh faktor external yaitu dukungan dari pihak luar dan internal yaitu dorongan dari dalam diri para guru sendiri. Agar faktor internalnya perkembangan muncul, maka perlu ada tantangan-tantangan nyata yang menggerakkan mereka untuk maju. Tantangan yang berkelanjutan, yang selalu ada di sekitarnya, merupakan elemen pendorong kemajuan yang terus menerus. Tantangan yang dapat memacu guru dalam KKG/MGMP untuk berkembang diantaranya adalah tantangan untuk peningkatan kualifikasi minimal setingkat D4 atau S1 dan sertifikasi profesi sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan fungsional maupun tunjangan profesi.

Tantangan yang lain adalah tuntutan masyarakat dimana guru harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. Hasil karya profesional berupa buku, produk bahan ajar, produk karya cipta, produk alat peraga yang bisa dibeli atau diserap masyarakat akan berdampak pada semakin termotivasinya guru dalam wadah KKG dan MGMP untuk terus maju. Di samping menjadi anggota KKG/MGMP yang ada, para guru dapat bergabung dan aktif dalam asosiasi manapun untuk kemajuan mereka, sekaligus dapat membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan pendidikan. Semakin luas

jaringan kerja para guru dalam KKG/MGMP baik individual maupun secara kelompok yang sejalan dengan profesinya, akan semakin meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya.

E. Pelatihan Bagi Guru

Kegiatan pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru, sehingga pada gilirannya diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, mereka dapat bekerja secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Alan Cowling & Phillips James (1996:110) memberikan rumusan pelatihan sebagai: “perkembangan sikap/ pengetahuan/ keterampilan pola kelakuan yang sistematis yang dituntut oleh seorang karyawan (baca: guru) untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan memadai”.

Pada bagian lain Alan Cowling & Phillips James (1996:110) mengemukakan pula tentang apa yang disebut *learning organization* atau organisasi yang mau belajar. Dalam hal ini organisasi diperlakukan sebagai sistem (suatu konsep yang akrab disebut *systems theory*) yang perlu menanggapi lingkungannya agar tetap hidup dan makmur. Menurut pandangan ini, sebuah organisasi akan mengembangkan suatu kemampuan untuk menanggapi perubahan-perubahan di dalam lingkungannya, yang memastikan bahwa transformasi internal terus-menerus terjadi. Dengan demikian, suatu organisasi atau sekolah yang mau belajar dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang memberikan kemudahan kepada anggotanya untuk melakukan proses belajar dan terus-menerus mengubah dirinya sendiri. Salah satu wujud sekolah sebagai *learning organization* adalah adanya kemauan belajar dari para guru untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya, dan salah satunya melalui kegiatan pelatihan. Dengan demikian, upaya belajar tidak hanya terjadi pada kalangan siswa semata.

Dengan tingkat kemauan belajar guru yang tinggi akan memungkinkan untuk menguasai kelas secara baik. Karenanya, kelas yang kondusif untuk belajar memerlukan guru-guru yang juga aktor atau aktris, yang pandai menciptakan suasana bergairah. Dan di sinilah kadang guru kurang memperhatikan keterampilan bermain karakter. Sebagai contoh, kelas yang tiba-tiba berisik dan ribut, sering disikapi oleh guru

dengan teriakan atau bentakan atau kadang pukulan papan tulis agar menimbulkan bunyi yang keras. Padahal masih ada banyak cara untuk mencapai itu. Untuk siswa dengan usia sekolah dasar, beberapa cara yang dapat digunakan adalah bertepuk tangan, atau menggunakan bahasa tubuh seperti guru terdiam dengan mimik yang tidak bahagia, atau dengan mengangkat tangannya yang kemudian diikuti oleh setiap siswanya sambil menunggu semua menjadi tenang. Langkah berikutnya adalah mengatakan apa yang ingin disampaikan kepada kelas dan tetap menggunakan suara dengan volume rendah.

Bila guru secara konsisten menggunakan pendekatan seperti ini, maka siswa akan terpola. Maka konsistensi guru terhadap pendekatan dalam manajemen kelas menjadi amat penting. Prinsip lain yang harus dipegang erat oleh guru adalah jangan bicara ketika ada siswanya yang masih bercakap-cakap dengan teman sebelahnya. Pola ini harus dipegang erat agar prinsip menghormati sesama menjadi benar-benar hidup. Pembelajaran tentang hal ini harus dimulai dari dalam kelas kita jika kita menginginkan para anggota dewan efektif saat bersidang pada 20-30 tahun mendatang.

Sebagai salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, maka guru harus menjadi perhatian yang utama oleh pemerintah. Sebab, guru sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada di garis depan berhadapan dengan siswa, dituntut memiliki kompetensi yang memadai. Sebab, melalui gurulah penanaman nilai-nilai dan pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan kekinian dan masa depan dapat berlangsung.

Karena itu, pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan yang didukung penuh oleh pihak-pihak yang terkait dan dilakukan dengan tahapan yang runtut serta dilakukan dengan sinergis dengan pola kerja *networking*, akan dapat meningkatkan capaian sertifikasi dan kompetensi guru yang berstandar profesional.

Dengan kegiatan pelatihan bagi guru pada intinya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru, sehingga pada gilirannya diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Selain kebijakan dari pemerintah, adanya kemauan belajar dari para guru untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya salah satunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan memungkinkan akan terkatrol kemampuan guru. Dengan demikian, upaya belajar tidak hanya terjadi pada kalangan siswa semata. Dengan tingkat kemauan belajar guru yang tinggi akan memungkinkan untuk menguasai kelas secara baik.

BAB III

GURU: MEMBANGUN MANUSIA BERBUDAYA

A. Pendahuluan

Berita tentang berbagai perilaku menyimpang setiap hari merebak di media massa. Mulai berita tentang pencurian, penipuan, sampai berita tentang perampokan dan bahkan pembunuhan. Berita tentang penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, pornografi, perkosaan, pengguguran kandungan, pelacuran, perjudian, dan merusak milik orang lain, juga selalu menghiasi media cetak dan elektronika. Pelaku perilaku menyimpang tersebut tidak hanya terjadi dari kalangan tertentu dari masyarakat. Pelakunya terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan juga dari kalangan orang-orang yang telah lanjut usia. Pelaku perilaku menyimpang meliputi masyarakat dari berbagai suku, daerah, agama, masyarakat awam, cendekiawan, artis, pendidik, dan bahkan dari kalangan agamawan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada masa orde baru, telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut materi. Meskipun kenyataannya terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi sejalan dengan itu terjadi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menggerogoti kehidupan ekonomi bangsa. Akibatnya, bukan pemerataan yang dialami masyarakat, tetapi kekayaan yang menumpuk pada sekelompok kecil yang memegang kekuasaan, dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Pada akhirnya KKN merasuki seluruh elemen bangsa, seakan-akan merupakan

budaya bangsa Indonesia, dan menimbulkan krisis ekonomi, serta krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Reformasi yang telah dilaksanakan bangsa Indonesia hampir sepuluh tahun, belum mampu menghilangkan budaya KKN di Indonesia.

Jika berita-berita seperti itu disimak dengan seksama, timbul pertanyaan di dalam hati sanubari ; Apakah bangsa ini masih berbudaya ? Dimana nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sering dibanggakan lewat retorika ? Dimana nilai-nilai Pancasila yang selalu dihafal peserta didik di sekolah ? Apakah sekolah kita mampu mewujudkan manusia berbudaya ? bagaimana strategi yang dapat dilakukan sekolah dalam mewujudkan manusia berbudaya ?

B. Guru Model Manusia Berbudaya

Definisi manusia berbudaya bisajadi berbeda antara satu ahli dengan ahli lain, berbeda antara satu agama dengan agama lain, berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Tulisan ini berupaya merumuskan ciri manusia berbudaya yang dapat berlaku umum bagi bangsa Indonesia. Variasi nilai budaya dikalangan masyarakat Indonesia diasumsikan saling melengkapi, bukan saling bertentangan.

Bagi kalangan agama Islam, manusia berbudaya adalah, berbudi luhur, berahlak mulia, ber aqidah yang benar, jauh dari musyrik. Jadi ukuran berbudaya menggunakan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Agama lain, seperti Kristen Hindu dan Budha juga memiliki nilai-nilai yang mengatur perilaku anggota pemeluk agama tersebut. Nilai-nilai budaya tidak hanya bersumber dari ajaran agama, tetapi ada yang bersumber dari adat istiadat masyarakat. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki adat istiadat, memiliki sistem nilai yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari agama dan adat istiadat bisa jadi saling berinteraksi membentuk pola tingkah laku anggota masyarakat. Ditinjau dari sistem nilai, manusia berbudaya

dapat didefinisikan sebagai manusia yang memiliki pola perilaku sesuai dengan sistem nilai yang dianut masyarakat.

Bagi masyarakat Indonesia, yang telah berkomitmen menjadi satu bangsa bangsa Indonesia, satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, serta satu tanah air yaitu tanah air Indonesia, telah menetapkan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber nilai dan membentuk sistem nilai yang berfungsi mengatur pola tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Manusia Indonesia disebut berbudaya jika perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Definisi di atas memiliki cakupan yang luas, karena itu untuk memudahkan pembahasan pada pasal berikut, perlu dirumuskan definisi yang esensial dalam mengatur pola perilaku manusia. Setidaknya ada empat ciri pokok manusia berbudaya, yaitu :

1. Memiliki rasa empati. Rasa empati adalah suatu kondisi merasakan perasaan orang lain. Orang yang berempati berarti mampu untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain dan ikut berperan dalam kehidupannya. Empati merupakan salah satu unsur afeksi yang berperan mengendalikan perilaku manusia. Empati dibangun berdasarkan kesadaran diri. Semakin terbuka seseorang kepada emosi diri sendiri, semakin terampil ia membaca perasaan orang lain. Kegagalan untuk mengetahui perasaan orang lain, merupakan kekurangan utama dalam kecerdasan emosional, dan merupakan cacat yang menyedihkan sebagai seorang manusia. Tidak adanya rasa empati, menyebabkan orang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, dan menjauhkan seseorang dari perilaku yang berbudaya.

Pada masa remaja, rasa empati muncul ketika mereka telah sanggup memahami kesulitan-kesulitan yang ada di lingkungannya, dan menyadari bahwa situasi atau status seseorang dalam kehidupan dapat menjadi beban stres.

Pada tahap ini, mereka dapat merasakan kesengsaraan suatu kelompok masyarakat, misalnya masyarakat miskin, dan masyarakat tertindas.

2. Memiliki rasa toleransi. Toleransi merupakan sikap yang menunjukkan adanya pengertian dari seseorang terhadap orang lain. Kata toleransi digunakan untuk menunjukkan hubungan yang harmonis antara satu individu dengan individu lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang rukun dan damai, pada masa orde baru pemerintah dan tokoh - tokoh masyarakat menggunakan konsep toleransi, terutama dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda-beda, dan antar pemeluk agama dengan pemerintah. Toleransi beragama misalnya, menunjukkan adanya sikap hormat menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, tidak saling mencela, tidak saling menyalahkan, dan sebaliknya jika pada suatu masyarakat terdapat rasa toleransi yang tinggi, akan lahir sikap-sikap dan perilaku yang positif, saling mendukung, bekerjasama, dan tolong menolong untuk mencapai kesejahteraan bersama.
3. Memiliki rasa persaudaraan. Selain dari membina hubungan baik dengan keluarga dan saudara, seorang muslim harus dapat berhubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas, baik di lingkungan pendidikan, sosial dan lingkungan lainnya, baik dengan orang-orang seagama maupun dengan pemeluk agama lain, karena kita diikat oleh satu negara, bangsa dan tanah air.
Hubungan baik dengan masyarakat diperlukan karena tidak seorangpun yang dapat hidup tenang dan tenteram tanpa bantuan masyarakat. Lagi pula hidup bermasyarakat sudah merupakan fitrah manusia. Manusia itu pada dasarnya hanya dua macam saja, yaitu orang yang berbuat kebajikan dan bertaqwa, dialah yang mulia disisi Allah.

Dan kedua adalah orang durhaka, dialah yang celaka dan yang sangat hina disisi Allah.

4. Menyadari hak dan kewajiban. Perkataan hak mempunyai beberapa arti menurut pemakaiannya, menurut bahasa, kata hak memiliki arti antara lain : Menetapkan, mewajibkan/ketetapan, kewajiban, keharusan, kenyataan, kekhususan bagi sesuatu/ seseorang, ketentuan kebenaran, lawan salah, kebenaran lawan kesalahan. Menurut istilah, hak mengandung pengertian; (1) kebenaran yang mutlak, hakikat, (2) kekhususan bagi seseorang bukan bagi yang lainnya, sebagai lawan kewajiban yaitu sesuatu yang tidak sah bagi orang lain untuk membantah atau menghalang-halangi atau melanggar sesuatu yang menjadi hak baginya. Adapun tentang kewajiban, menurut ilmu akhlak, berarti sesuatu yang diperintahkan oleh perasaan suci hati nurani untuk berbuat, sebab menurut hati nurani dan undang-undang akhlak perbuatan itu adalah baik dan benar. Antara hak dan kewajiban selalu bertimbang balik. Sesuatu yang menjadi hak bagi seseorang, adalah menjadi kewajiban bagi yang lainnya. Dalam ajaran Islam tidak ada suatu perintahpun untuk menuntut hak lebih dulu. Yang ada adalah perintah melaksanakan kewajiban dan memberi hak kepada yang lain. Baik bersifat perintah ataupun bersifat larangan dalam ajaran Islam ditujukan agar hak semua pihak terpenuhi. Menuntut hak antara makhluk dengan makhluk pada dasarnya adalah karena orang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga akhirnya orang tersebut mau melakukan kewajibannya.

C. Peran Guru Membentuk Manusia berbudaya

Tujuan pendidikan nasional dirumuskan dengan berdasarkan kepada falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Rumusan tujuan pendidikan nasional bersifat umum dalam bentuk perilaku ideal, dan menjadi acuan utama dalam merumuskan tujuan pendidikan yang lebih khusus, seperti

perumusan tujuan institusional atau perumusan kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran.

Rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya pemerintah telah merumuskan tujuan dari masing-masing tingkatan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan atau kompetensi lulusan pada tingkat dasar, menengah, kejuruan, dan perguruan tinggi, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, sesuai dengan kejuruannya.

Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang akhlak mulia, memiliki pengetahuan,

keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pada rumusan tujuan pendidikan nasional dan rumusan standar kompetensi lulusan masing-masing jenjang pendidikan, secara jelas menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, pada hakikatnya bertujuan mewujudkan manusia berbudaya. Tetapi, masing - masing sekolah masih perlu merumuskan tujuan-tujuan yang lebih rinci dan sekaligus merumuskan langkah - langkah konkrit, sesuai dengan karakteristik dan latar belakang budaya peserta didik.

Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, memiliki peran strategis mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya. Sekalipun masih banyak institusi lain yang turut berperan membangun manusia Indonesia berbudaya, seperti institusi agama, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga, akan tetapi sekolah secara khusus didirikan untuk membangun budaya masyarakat, dan terikat secara legal dengan berbagai undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, antara lain menjelaskan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan

atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni, dan budaya, dan pendidikan jasmani.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, merupakan kelompok mata pelajaran yang diharapkan mampu mewujudkan manusia Indonesia berbudaya sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan adat istiadat masyarakat.

Pembentukan manusia berbudaya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, tidak cukup hanya dengan melaksanakan satu atau dua mata pelajaran. Proses pembentukan manusia berbudaya memerlukan proses yang panjang, proses pembiasaan, dan harus berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas.

Tugas guru di sekolah tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Jadi, selain membimbing peserta didik untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan, guru juga bertugas membimbing peserta didik mengembangkan aspek kepribadian mereka. Mendidik merupakan tugas seluruh guru mata pelajaran, bukan hanya tugas guru agama. Untuk itu, setiap guru harus mengetahui nilai-nilai apa yang dapat disentuh oleh materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Dengan demikian, sekolah dapat berperan secara maksimal melaksanakan pendidikan yang membudayakan manusia.

D. Peran Guru dalam Pendidikan Nilai Budaya

Nilai-nilai budaya yang pertama-tama dikenal peserta didik adalah nilai budaya lokal. Oleh karena itu, guru-guru perlu mengetahui, memahami, dan menghayati nilai-nilai budaya lokal. Peserta didik telah memiliki nilai-nilai budaya yang diperoleh dari lingkungan keluarga, dan masyarakat. Agar internalisasi nilai tidak mengalami hambatan, guru perlu menyesuaikan nilai budaya baru dengan apa yang telah dimiliki peserta didik.

Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan nilai budaya bertujuan membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia. Proses pembentukan akhlak mulia pada hakikatnya terjadi melalui internalisasi nilai. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam rangka internalisasi nilai budaya, salah satunya adalah dengan cara keteladanan. Keteladanan adalah metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk akhlak peserta didik. Orang tua dan pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, yang akan ditirunya dalam tindakan dan perilakunya serta tata krama kehidupannya, baik disadari maupun tidak. Keteladanan menjadi faktor penting dalam perkembangan baik buruknya akhlak anak. Pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan pergaulan antara ibu dan bapak, perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka, dan perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, akan menjadi teladan bagi anak-anak. Jika orang tua atau pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama, maka anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, memiliki keberanian dan bersikap menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama. Sebaliknya jika orang tua atau pendidik berbohong, berkhianat, durhaka,

kikir, penakut dan hina, maka anak juga akan tumbuh dengan memiliki sikap-sikap yang demikian.

Namun bagaimanapun besarnya usaha untuk mempersiapkan anak ke arah kebaikan, ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama selama anak tidak melihat orang tua atau pendidik sebagai teladan nilai-nilai moral yang tinggi. Tidak sulit bagi orang tua atau pendidik untuk mengajari anak dengan berbagai metode pendidikan, tetapi sangat sulit bagi anak untuk melaksanakannya jika ia melihat orang yang membimbingnya tidak mengamalkan metode dan tidak menerapkan pokok-pokok prinsip tersebut. Lebih dari itu keteladanan bertopang pada asas pendidikan yang kuat serta memiliki implikasi paedagogis.

Cara lain untuk menanamkan nilai dalam membangun akhlak mulia, adalah dengan pemberian hukuman. Metode hukuman dilakukan semata-mata untuk membuat anak jera dan sadar akan kesalahannya. Hukuman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu

1. Hukuman asosiatif. Umumnya orang mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menjungkirkan perasaan tidak enak itu, biasanya orang/remaja menjauhi perbuatan yang tidak baik atau yang dilarang.
2. Hukuman logis. Hukuman ini diberikan terhadap anak yang telah agak besar, agar ia mengerti bahwa hukuman itu adalah akibat yang logis dari perbuatannya yang tidak baik atau akibat dari kesalahan yang diperbuatnya.
3. Hukuman normatif. Hukuman yang bermaksud memperbaiki moral anak, diberikan terhadap pelanggaran norma-norma etika seperti berdusta, menipu, mencuri. Hukuman ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak. Dengan ini pendidik berusaha

mempengaruhi “kata hati” anak, menginsafkan anak dari perbuatannya yang salah, dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan.

Hukuman yang bernilai paedagogis disyaratkan antara lain :

1. Dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.
2. Sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki.
3. Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam.
4. Jangan diberikan ketika sedang marah.
5. Diberikan dengan sadar setelah melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang.
6. Dapat dirasakan si terhukum sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya.
7. Jangan melakukan hukuman badan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan dapat berupa penganiayaan sesama makhluk.
8. Tidak boleh merusakkan hubungan baik antara orang tua atau pendidik dengan anak atau muridnya. Hukuman harus dapat dimengerti dan difahami oleh anak atau murid.
9. Ada kesanggupan memberi maaf dari orang tua atau pendidik sesudah memberikan hukuman dan setelah anak atau peserta didik menginsafi kesalahannya.
10. Pemberian hukuman dilakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Sesungguhnya siapa saja yang memperlakukan orang lain dengan kekerasan, ia telah menjadikan orang itu sebagai beban orang lain. Karena ia tidak mampu melindungi kehormatan dan keluarganya karena kekosongan semangat pada saat ia berhenti mencari keutamaan dan akhlak yang mulia. Dengan demikian berbaliklah jiwa dari tujuan dan kadar kemanusiaannya
11. Dalam upaya memperbaiki hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras. Dalam hal ini pulalah orang tua atau pendidik harus arif dan bijaksana memilih metode atau cara yang paling sesuai,

yang didasarkan atas pertimbangan dan segi perbedaan yang dimiliki anak, baik dalam hal kecerdasan, kultur, maupun dalam hal kepekaan dan pembawaannya masing-masing. Metode hukuman ini merupakan cara yang terakhir. Metode dengan hukuman ini bertitik tolak dari kebutuhan-kebutuhan setiap individu seorang anak yang menerima hukuman memahaminya sebagai suatu tanda penerimaan terhadap pribadinya, yang menyebabkan ia merasa tentram. Sedang ketentraman itu adalah salah satu kebutuhan azas dalam segi psikologis dan hukuman sangat dibenci sebab ia mengancam ketentraman.

Manusia berbudaya adalah manusia yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama memiliki beragam nilai budaya. Untuk mewujudkan pendidikan nilai budaya di sekolah, para guru secara keseluruhan harus terlibat melaksanakan proses internalisasi nilai budaya, baik yang bersumber dari agama, maupun budaya lokal. Sekolah memiliki peran strategis untuk mengantar peserta didik menjadi manusia berbudaya, dengan cara menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya, keteladanan, dan hukuman yang edukatif.

BAB IV

GURU PROFESIONAL : PENCERDASAN YANG TAK PERNAH HENTI

A. Pendahuluan

Banyak orang berpendapat bahwa sebagai suatu bangsa, kita tidak memiliki lagi kebanggaan seperti di awal terbentuknya negara ini. Dari sisi ekonomi bangsa ini terpuruk sejak tahun 1997 yang diawali dengan krisis ekonomi, di sisi pertahanan keamanan, kita tidak diperhitungkan lagi sebagai suatu bangsa yang memiliki pertahanan yang kokoh, dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, malah dianggap negara terkebelakang, dan dari sisi pendidikan lebih menyedihkan, karena bangsa ini dianggap gagal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbicara tentang pendidikan, maka yang harus menjadi fokus telaah adalah guru. Hal ini harus disadari bahwa maju mundurnya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh guru. Namun sampai saat ini masalah guru masih menjadi masalah nasional yang tidak kelihatan di mana ujung pangkal permasalahannya.

Masalah utama yang berkaitan dengan guru dewasa ini adalah (a) kualifikasi dan kompetensi yang kurang memadai, (b) rendahnya etos kerja dan komitmen, (c) krisis etika dan moral, dan (d) kesejahteraan yang belum layak.

Untuk mengatasi hal tersebut maka seorang guru dituntut untuk (a) mengembangkan diri melalui kegiatan ilmiah dan studi lanjut, (b) membuat perencanaan konkrit dalam kegiatan pembelajaran, (c) mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru dengan berperan sebagai mitra siswa, (d) bersikap kreatif dalam menghasilkan karya pendidikan, dan

(e) melakukan inovasi pendidikan yang dapat dipertahankan dengan argumentasi logis dan kritis.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengharuskan seorang guru memiliki pendidikan akademik minimal S-1. Padahal, dari 2.667.655 orang guru yang ada, hanya 887.751 orang yang memiliki kualifikasi S-1 atau D-4. Khusus guru SD, dari sekitar 1.131.000 orang yang ada, baru sekitar 8,3% (99.500 guru) yang memenuhi kualifikasi akademik jenjang Strata Satu (S1).

Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu program sertifikasi guru melalui portofolio. Hal ini tentu merupakan suatu langkah percepatan dalam meningkatkan kualifikasi, kesejahteraan, dan kualitas guru bahkan harkat dan martabat guru. Namun dalam pelaksanaan sertifikasi melalui portofolio ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

B. Guru dan Permasalahan

1. Lembaga Kependidikan Tenaga Kependidikan

Tugas guru sebagai pengajar merupakan perkara yang tidak terlalu sulit, tetapi tugas guru sebagai pengajar dan pendidik adalah luar biasa. Prof. Masaaki Sato, pakar pendidikan dari Jepang, mengemukakan kelemahan pendidikan calon guru pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan kelemahan guru di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Kuliah yang diberikan di kampus difokuskan pada transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) keilmuan suatu disiplin ilmu, sedangkan pengetahuan praktis untuk meningkatkan keilmuan dan kompetensi guru dalam mengajar pada kenyataannya tidak pernah diajarkan. Pembelajaran di kelas sangat bersifat pribadi, rumit, dan sensitif. Untuk itu, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam memahami kondisi kelas secara jeli. Dan kemampuan seperti ini tidak

dapat tumbuh dan berkembang hanya dengan mendengarkan kuliah teoretis di dalam kelas saja.

- b. Seorang dosen di universitas, secara umum, mengajarkan suatu disiplin ilmu tidak berdasarkan situasi dan kondisi di sekolah. Apa pun jenis teorinya tidak akan pernah diketahui kebenarannya jika tidak diujikan. Oleh sebab itu, seorang dosen seharusnya tidak hanya mengajar teori tentang pembelajaran dari dalam buku referensi saja, tetapi dosen tersebut harus juga selalu belajar dari proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan sekolah (SD/SMP/SMA) yang selalu dinamis.
- c. Pengetahuan mengenai pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan kebutuhan khusus "*learning disorder*" (anak yang memiliki kesulitan belajar) harus dipraktikkan di lapangan (ruang kelas). Dengan banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah, kita akan banyak bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus dalam belajar. Mereka membutuhkan bim-bingan untuk menentukan penanganan secara nyata yang tepat berdasarkan hasil penelitian atau keilmuan. Setali tiga uang dengan kelemahan calon guru di tingkat universitas, kelemahan guru di lapangan pun menjadi sebuah realitas yang mesti dicarikan solusinya. Kelemahan utama guru di lapangan adalah banyaknya guru yang tidak memiliki inisiatif untuk belajar.

Mochtar Bohari (1994) mengemukakan bahwa problematika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dewasa ini adalah (1) bagaimana mengembangkan sistem pendidikan guru yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang benar-benar mau menjadi guru dan mampu mengajar dan mendidik, (2) bagaimana mengembangkan ilmu-ilmu pendidikan yang mampu memberikan pedoman kepada bangsa dalam melaksanakan jenis berbagai kegiatan pendidikan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipikirkan kembali dari sistem yang berlaku sekarang ini untuk mempersiapkan calon guru sebagai berikut.

1. Masalah penjurusan, yaitu mempersiapkan guru-guru yang mampu mengajar anak-anak untuk berfikir *wholistik* dan *sistematik* bukan *spesialistic*.
2. Masalah pengembangan jurusan-jurusan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yaitu seolah-olah tidak ada limit mengenai pengembangan jurusan.
3. Mahasiswa tidak dituntut untuk menguasai medium pendidikan, yaitu pengetahuan tentang proses pendewasaan, organisasi kurikulum, sistematika evaluasi hasil pengajaran, dan penyelenggaraan program pendidikan di luar sekolah.

2. Cinta Pada Profesi Guru

Cepat merasa puas diri dengan kemampuan mengajar yang telah dimiliki merupakan jebakan ampuh terwujudnya profil guru yang stagnan dalam berkarya, resisten terhadap perubahan, dan keengganan untuk terus belajar sepanjang hayat dalam menjalankan perannya sebagai pengajar. Apa yang harus dilakukan guru untuk keluar dari perangkap 'kejumudan' pengembangan kemampuan profesionalismenya? Hanya ada dua pilihan bagi Anda sebagai guru, bergabung di komunitas agen pembelajar atau tetap bersikukuh dengan ikrar "Aku Guru Paling Hebat" yang berhenti belajar. Untuk menjadi agen pembelajar, terlebih dahulu guru harus memahami hakikat menjadi manusia pembelajar. Andrias Harefa dalam bukunya "Menjadi Manusia Pembelajar" (PT.Kompas Media Nusantara, 2005) secara lugas mencoba mende-finisikan manusia pembelajar dalam pengertian: "Setiap orang (manusia) yang bersedia menerima tanggung jawab untuk melakukan dua hal penting, yakni: pertama, beru-saha mengenali hakikat dirinya, potensi dan bakat-bakat terbaiknya, dengan selalu berusaha mencari jawaban yang lebih baik tentang beberapa pertanyaan eksistensial seperti "Siapakah aku?", "Dari manakah aku datang?", "Ke manakah aku akan pergi?", "Apakah yang menjadi tanggungjawabku dalam

hidup ini?", dan "Kepada siapa aku harus percaya?"; dan kedua, berusaha sekuat tenaga mengaktualisasikan segenap potensinya itu, mengeks-presikan dan menyatakan dirinya sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya dengan cara menjadi dirinya sendiri dan menolak untuk dibanding-bandingkan dengan segala sesuatu yang bukan dirinya". Belajar sepanjang hayat, mengembangkan terus potensi diri, dan mengerahkan se-luruh kemampuan terbaik dalam mengemban tanggung jawab merupakan 3 karakteristik utama seorang manusia pembelajar. Bagi guru sebagai agen pembelajar, kemauan kuat untuk terus belajar mengembangkan kemampuan profesionalismenya merupakan modalitas utama dalam memberikan kontribusinya yang optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Jika guru sudah tidak mau lagi belajar memperbaiki segala kekurangan diri, pada hakikatnya dia sudah tidak mencintai lagi profesinya sepenuh hati. Gordie Howe (Asep Sapa'at, 2007) menyatakan, "Jika Anda tak mencintai pekerjaan Anda, berhentilah, dan berilah kesempatan kepada orang lain yang mencintainya." Saat ini guru sudah tidak memiliki waktu lagi untuk sekedar berdiam diri dalam menyikapi setiap perubahan cepat yang terjadi di dunia pendidikan. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis melihat ada 4 hal penting yang dapat diusahakan oleh guru untuk menjadi agen pembelajar, di antaranya: (1) membangun kemantapan-diri daripada mereduksi ekspektasi dengan terus melakukan regulasi diri yang relevan dengan pengembangan profesinya; (2) mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, dsb) secara berkesinambungan dalam merespon secara aktif setiap isu-isu terbaru yang berkembang di dunia pendidikan; (3) mempelajari hasil-hasil penelitian dari berbagai literatur tentang kompetensi mengajarnya yang berhubungan dengan prestasi subjek didik; (4) sebagai hasil dari analisis tugas mengajar pada tingkat dan kurikulum yang berbeda.

Sungguh guru tidak memiliki banyak pilihan lagi untuk bersikap dalam situasi sekarang ini, kecuali terus berpacu meningkatkan kualitas personalnya. Pastikan karya terbaik Anda dapat mengubah wajah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Namun, bagaimana kalau pembuat kebijakan dan *stakeholders* pendidikan lainnya bersikap acuh tak acuh? Sudah dapat dipastikan badai pendidikan Indonesia takkan pasti berlalu.

3. Kesejahteraan yang Tidak Mensejahterakan

Gaji yang diterima oleh seorang guru masih kecil, jika dibandingkan dengan profesi yang lain. Pasalnya dengan gaji kecil seorang tenaga pendidik kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga optimalisasi dari kemampuannya baik dari segi pemanfaatan waktu dan kecerdasan melahirkan ide-ide baru sangat kurang.

Tentu hal ini menjadi efek yang serius dalam dunia pendidikan, bila tenaga pendidiknya tidak berkonsentrasi pada bidang pekerjaannya. Jika kita runut kembali permasalahan gaji guru yang kecil juga merupakan salah satu faktor besar terhadap kemunduran pendidikan karena menyangkut masalah kesejahteraan.

Mengapa banyak yang tidak mau menjadi seorang guru? Pertanyaan ini merupakan hal yang sangat klasik namun sangat mudah jawabannya; karena gaji guru kecil sehingga tidak menjamin masa depan. Sekaligus penghar-gaan terhadap profesi guru juga masih kalah dibandingkan dengan profesi dokter, pengacara atau profesi lainnya yang keren.

Karena banyaknya lulusan SMU yang berkualitas dan mempunyai kecerdasan emosional lebih memilih menempuh disiplin ilmu di bidang lain daripada menjadi guru. Karena persoalan tadi alhasil tenaga guru yang berpotensi sangat minim sekali.

Salah satu upaya dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan ke depan pemerintah harus juga menaikkan gaji

guru sebagai upaya memotivasi profesi yang dijalankan oleh seorang guru. Sebutan pahlawan tanpa tanda jasa saja tidak cukup dalam mendongkrak motivasi pendidik.

4. Penerimaan Guru yang Tidak Proporsional

Rekrutmen guru yang berlangsung selama ini belum menunjukkan ke arah yang proporsional. Rekrutmen guru seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pendidikan dan profesionalisme yang dimiliki. Kalau kita amati penerimaan guru PNS, menunjukkan masih banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan profesionalisme, ditambah lagi dengan isu adanya nepotisme.

Dalam hal profesionalisme, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Juga masih banyak guru yang tidak berlatarbelakang pendidikan keguruan, tetapi dari ilmu murni. Sedangkan dari segi kualifikasi masih jauh dari standar, Padahal, dari 2.667.655 orang guru yang ada, hanya 887.751 orang yang memiliki kualifikasi S-1 atau D-4. Khusus guru SD, dari sekitar 1.131.000 orang yang ada, baru sekitar 8,3% (99.500 guru) yang memenuhi kualifikasi akademik jenjang Strata Satu (S1).

Jika hal ini terus terjadi maka kita jangan pernah bermimpi paradigma dan wajah pendidikan di negeri akan berubah. Jika beberapa faktor penyebab kegagalan pendidikan itu telah diubah, Insya Allah, wajah pendidikan di negeri ini akan berubah dan bermutu serta sejajar dengan kualitas pendidikan di negara lain.

5. Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan

Toharuddin (2005) mengemukakan bahwa sedikitnya 50 persen guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standarisasi pendidikan nasional (SPN). Untuk itu perlu dibangun landasan kuat untuk meningkatkan kualitas guru dengan standarisasi rata-rata bukan standarisasi minimal.

Prof. Sutjipto (mantan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ)) mengemukakan "Saat ini baru 50 persen dari guru se-Indonesia yang memiliki standardisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan catatan *Human Development Index (HDI)*, fakta ini menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar macam kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dari data statistik HDI terdapat 60% guru SD, 40% SLTP, SMA 43%, SMK 34% dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. Dengan demikian, kualitas SDM kita adalah urutan 109 dari 179 negara di dunia.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru adalah lahirnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun realitasnya setelah undang-undang tersebut diundangkan 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Malahan yang lebih mengkhawatirkan adalah muncul *image* yang kurang baik dikalangan guru tentang keseriusan pemerintah melaksanakan undang-undang tersebut.

Dalam pembelajaran di kelas telah diterapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), namun masih jauh dari harapan, bahkan realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru benar-benar paham prinsip-prinsip maupun penerapan dari KBK ini secara tuntas. Para guru bahkan belum mengenal pengajaran dengan menggunakan proyek-proyek yang menggabungkan beberapa mata pelajaran sekaligus. Menurut Prof. Suyanto, Ph.D., (mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta), "Guru harus diajak berubah dengan dilatih terus menerus dalam pembuatan satuan pelajaran, metode

pembelajarannya yang berbasis *Inquiry, Discovery, Kontekstual Teaching and Learning*, menggunakan alat bantu, menyusun evaluasinya, dan perubahan filosofinya, dan sebagainya."

C. Membangun Citra Guru yang Profesional

Mohammad Abduhzen (Kompas, 1 Oktober 2007), mengemukakan bahwa untuk pembinaan dan peningkatan profesional guru perlu dikembangkan kegiatan professional kesejawatan yang baik, harmonis, dan obyektif.

1. Pencitraan Guru

Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, martabat guru harus diakui, semakin jatuh dibandingkan dengan profesi yang lain. Status sosial guru lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

- a. Profesi guru tidak bergengsi, hal sudah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda. Ketika itu, Peme-rintah Belanda mulai mendirikan sekolah kejuruan (*vakscholen*), anak kalangan priyayi dan orang pribumi kaya lebih tertarik kepada "Sekolah Radja" (*Hoofden-scholen*/Sekolah Calon Pegawai Sipil Pribumi) ketimbang masuk Sekolah Pelatihan Guru Pribumi (*Kweekschool*). Sebab, guru dianggap sebuah karier yang tidak prestisius dan menjanjikan. Kecenderungan itu tampaknya terus berlanjut sehingga kebanyakan siswa berprestasi tidak tertarik masuk lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Semua ini berdampak buruk pada kompetensi guru, ditandai oleh rendahnya penguasaan materi dan metodologi pembelajaran, kurangnya kematangan emosional dan kemandirian berpikir, serta lemahnya motivasi dan dedikasi. Selanjutnya, pekerjaan sebagai guru tertinggal dan tidak seistimewa profesi lain. Status profesionalisme guru baru diundangkan tahun 2003 dan dicanangkan pada 2004.

- b. Penghormatan terhadap sesama lebih didasarkan pada perolehan kuantitas kasat mata seperti mobil mengkilap, rumah megah, dan pakaian mentereng, ketimbang kualitas abstrak seperti kecerdasan, integritas, dan pengabdian seseorang. Sebagai kaum termarginalkan, guru kita miskin dari simbol-simbol duniawi tersebut. Tingkat sosial ekonomi mereka pun rata-rata menengah ke bawah. Kebijakan pemerintah, sejak orde baru hingga era reformasi kini, belum secara signifikan memperbaiki keadaan ini.
- c. Ketiga, pudarnya martabat guru diperparah oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang dapat diakses oleh mereka. Perkembangan ilmu keguruan dan ilmu kependidikan, juga inovasi-inovasi model pembelajaran, hampir tidak menyentuh kinerja guru kita. Akhirnya praktik kelas menjadi "ritual" usang yang tak tersentuh pembaruan selama bertahun-tahun.
- d. Keempat, jajaran birokrasi kependidikan turut menindas jati diri guru, dan "organisasi profesi" mereka kurang mengadvokasi dan tidak melindungi hak-hak anggotanya.

Pudarnya citra guru telah menurunkan kualitas pendidikan kita, dan jalan utama meningkatkan martabatnya adalah dengan memperbaiki kompetensi dan remunerasinya.

2. Pendidikan Profesi

Gagasan pendidikan profesi guru semula dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk mengatasi problem mutu keguruan kita karena perbaikan itu tidak akan terjadi dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab itu, pendidikan profesi diperlukan sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Tetapi sangat disayangkan implementasi gagasan pendidikan profesi lebih ditekankan pada uji sertifikasi (terutama untuk guru dalam jabatan). Padahal, Pasal 11 UU Sisdiknas mensyaratkan untuk memperoleh sertifikat pendidik

tidak lain adalah kualifikasi S1/D4 dan menempuh pendidikan profesi guru.

Program uji sertifikasi yang tengah dijalankan pemerintah dengan mengandalkan penilaian portofolio, dipilih oleh pemerintah kabupaten/kota. Bahkan akan dibuka peluang bagi mereka yang tidak berkualifikasi S1/D4. Kenyataan ini bukan saja tidak menghasilkan perbaikan mutu, tetapi akan memunculkan masalah birokratisasi yang pada akhirnya mempersulit guru.

Program sertifikasi tidak boleh dilepaskan dari proses pendidikan profesi, dan tidak seharusnya dipandang sekadar cara memberikan tunjangan profesi. Tunjangan profesi hanyalah insentif agar para guru mau kembali belajar, sedangkan perbaikan kesejahteraan guru harus diberlakukan kebijakan lain tentang remunerasi.

Memang persoalan ekonomi yang dihadapi guru sangat mempengaruhi kinerja dan citranya di dalam masyarakat. Melalui tunjangan profesi kesejahteraan guru sulit diperbaiki karena mensyaratkan adanya kualifikasi dan sertifikat pendidik.

Penghasilan guru seharusnya diperbaiki agar profesi ini menjadi kompetitif dengan menaikkan tunjangan fungsional secara progresif dan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pemberian insentif seperti yang telah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sekarang ini. Dengan demikian perbaikan remunerasi terlaksana secara merata dan proses sertifikasi tidak didesak untuk mengambil jalan pintas.

3. Guru Menjadi Pekerjaan Pelarian

Sejumlah mahasiswa yang kuliah pada disiplin ilmu keguruan mengatakan bahwa kuliah di bidang kependidikan bukanlah tujuannya, hanya karena keterpaksaan baik dari tekanan orang tua maupun tekanan karena mudahnya mendapat pekerjaan saja. Jarang dibarengi dengan bakat dan kecintaan terhadap profesi ini. Akibatnya, selama menempuh

pendidikan di perguruan kurang memahami mata kuliah yang diberikan dosen dan juga sangat minim aplikasinya dalam sehari-hari

Selain itu dengan dibukanya program Akta IV pada beberapa perguruan tinggi secara tidak langsung telah membuka peluang bagi sarjana non kependidikan untuk terjun ke dalam dunia pendidikan. Hal ini sangat tidak efektif bahkan, kemampuannya jauh sekali dibandingkan dengan mereka yang sarjana khusus ilmu kependidikan yang lebih menguasai persoalan dalam tata cara mendidik.

Sarjana non kependidikan yang mengambil program Akta IV hanya ingin mendapat legalisasi profesi guru saja yang disebabkan sangat susah diterima apabila tidak ada ijazah Akta IV tersebut. Ini juga merupakan salah satu kemunduran dalam dunia pendidikan. Karena yang mendidik bukan orang yang menguasai bidangnya. Jelas itu merupakan kesalahan pemerintah.

D. Masa Depan Guru di Tengah Masyarakat Modern

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Depdiknas, 2003 : 5).

Pada saat ini, pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol seperti: (1) masih rendahnya pemerataan pendidikan dan kesempatan belajar; (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan seperti yang

dinyatakan dalam Isu-isu Strategik Kebijakan pendidikan. (Depdiknas, 2001: 16-25).

Pada pasal 45 Bab XII UU 20/2003 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pada pasal 46 Bab XIII tertulis bahwa: (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta (2) pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Selain itu, pada pasal 47 dinyatakan bahwa: (1) sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan dan (2) pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Depdiknas, 2003: 20-21). Sedangkan pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APED) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk RAPBN 2004, pemerintah memberikan alokasi anggaran sektor pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga sebesar Rp 15,2 trilyun atau 22,4 persen dari anggaran pembangunan sebesar Rp 68,1 trilyun. Menurut Winarno, persentase ini dinilai tidak sesuai dengan amandemen UUD 1945 dan UU No. 20/2003 dengan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari jumlah APBN sebesar Rp 368,8 trilyun. Akibatnya, sektor pendidikan tidak bisa meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. (Kompas, 20 Agustus 2003).

Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan disadari satu kebenaran fundamental, yakni bahwa kunci keberhasilan

mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional, yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang baru untuk merencanakan pendidikan di masa depan. Dalam kaitan mempersiapkan guru yang berkualitas di masa depan, dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada persoalan bagaimana meningkatkan kualitas sekitar 2 juta guru yang sekarang ini sudah bertugas di ruang-ruang kelas.

Pada dasarnya peningkatan kualitas diri seseorang harus menjadi tanggung jawab diri pribadi. Oleh karenanya usaha peningkatan kualitas guru terletak pada diri guru sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran pada diri guru untuk senantiasa dan secara terus menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan guru peningkatan kualitas kerja sebagai pengajar profesional. Kesadaran ini akan timbul dan berkembang sejalan dengan kemungkinan pengembangan karir mereka. Oleh karena itu pengembangan kualitas guru harus dikaitkan dengan perkembangan karir guru sebagai pegawai, baik negeri maupun swasta. Gambaran yang ideal adalah bahwa pendapatan dan karir, dalam hal ini jenjang jabatan dan kepangkatan merupakan hasil dari peningkatan kualitas seseorang selaku guru.

Urutan proses di atas menunjukkan bahwa jenjang kepangkatan dan jabatan yang tinggi hanya bisa dicapai oleh guru yang memiliki kualitas profesional yang memadai. Sudah barang tentu alur pikir tersebut didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan jenjang kepangkatan dan jabatan guru berjalan seiring dengan peningkatan pendapatannya.

Proses dari timbulnya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan profesional di kalangan guru, timbulnya kesempatan dan usaha, meningkatnya kualitas profesional sampai tercapainya jenjang kepangkatan dan jabatan yang tinggi memerlukan iklim yang memungkinkan berlangsungnya proses di atas. Iklim yang kondusif hanya akan muncul apabila di kalangan guru timbul hubungan

kesejawatan yang baik, harmonis, dan obyektif. Hubungan tersebut bisa dimunculkan antara lain lewat kegiatan profesional kesejawatan.

Dengan demikian, untuk pembinaan dan peningkatan kemampuan profesional guru perlu dikembangkan kegiatan professional kesejawatan yang baik, harmonis, dan obyektif. Secara sistematis pengembangan kesejawatan ini memerlukan: a) wadah / kelembagaan, b) bentuk kegiatan, c) mekanisme, d) *standard professional practice*.

Wadah dan kelembagaan untuk pengembangan kesejawatan adalah kelompok yang merupakan organ bersifat non-struktural dan lebih bersifat informal. Wadah ini dikembangkan berdasarkan bidang studi atau rumpun bidang studi pada masing-masing sekolah. Anggota yang memiliki kepangkatan tertinggi dalam setiap rumpun diharapkan bisa berfungsi sebagai pembimbing.

Kalau ada anggota memiliki kepangkatan yang sama, maka diharapkan secara bergiliran salah satu darinya berfungsi sebagai pembimbing anggota yang lain. Dengan bentuk wadah dan kelembagaan semacam ini maka di setiap sekolah akan terdapat lebih dari satu kelompok. Keberadaan kelompok akan memungkinkan para guru untuk bisa tukar pikiran dengan rekan sejawat mengenai hal ikhwal yang berkaitan interaksi guru dengan para siswa. Bagi seorang pekerja profesional, termasuk guru, komunikasi kesejawatan tentang profesi yang ditekuni sangatlah penting. Namun sayangnya, justru komunikasi kesejawatan inilah yang belum ada di kalangan profesi guru di tanah air kita.

Kelompok yang dibentuk merupakan wadah kegiatan di mana antara anggota sejawat bisa saling asah, asuh dan asih untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing khususnya dan mencapai kualitas sekolah serta pendidikan pada umumnya. Asah artinya satu dengan anggota sejawat yang lain saling membantu untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Asuh berarti di antara anggota kesejawatan

saling membimbing dengan tulus dan ikhlas untuk peningkatan kemampuan profesional dan asih berarti di antara anggota kesejawatan terdapat hubungan kekeluargaan yang akrab. Oleh karena itu kelompok yang beranggotakan para guru suatu bidang studi sejenis harus menitik-beratkan pada aktifitas profesional.

Secara terperinci kegiatan kelompok ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Diskusi tentang satuan pelajaran.
 - b. Diskusi tentang substansi materi pelajaran.
 - c. Diskusi pelaksanaan proses belajar mengajar termasuk evaluasi pengajaran.
 - d. Melaksanakan observasi aktivitas rekan sejawat di kelas.
 - e. Mengembangkan evaluasi penampilan guru oleh peserta didik.
 - f. Mengkaji hasil evaluasi penampilan guru oleh peserta didik sebagai *feedback* bagi anggota kelompok.
2. Meningkatkan penguasaan dan pengembangan keilmuan, khususnya bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - a. Kajian jurnal dan buku baru.
 - b. Mengikuti jalur pendidikan formal yang lebih tinggi.
 - c. Mengikuti seminar-seminar dan penataran-penataran.
 - d. Menyampaikan pengalaman penataran dan seminar kepada anggota kelompok.
 - e. Melaksanakan penelitian.
3. Meningkatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah akademis. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - a. Menulis artikel.
 - b. Menyusun laporan penelitian.
 - c. Menyusun makalah.
 - d. Menyusun laporan dan review buku.

Upaya peningkatan kualitas guru saat ini sudah ada dalam bentuk kemauan politik, hal ini ditandai dengan lahirnya: (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di dalam Bab IV tentang guru bagian I mengenai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pasal 8 yang mengatur tentang kualifikasi guru yakni guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Dan juga ditandai dengan lahirnya Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dengan portofolio. Juga di dalamnya mensyaratkan tentang kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta sertifikasi pendidikan. Tetapi belum ada upaya maksimal peningkatan kualitas guru dalam bentuk kebijakan dan tindakan politik secara sungguh-sungguh. Misalnya Undang-Undang telah mengatur tentang anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20 % dari APBN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, yang tentunya harus lebih dahulu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (guru) sebagai pilar utama pendidikan. Pemerintah juga belum secara sungguh-sungguh menjalankan Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Contoh Pemerintah menginginkan peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas guru, tetapi di lain pihak pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak sejalan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang. Contoh dengan mudah mengeluarkannya izin mendirikan LPTK yang dikelola oleh swasta, tanpa memperhatikan kondisi PT tersebut yang pada akhirnya melahirkan calon guru yang tidak berkualitas atau tidak dapat dipertanggung jawabkan secara maksimal.

Peran serta Pemerintah Daerah dalam membangun Pendidikan lewat memperbaiki kualitas guru telah diatur di dalam UU RI No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan. Persoalan besar dalam UU RI No. 22 tahun

1999 adalah perubahan radikal dalam otoritas pengembangan pendidikan yang semula berada dalam kekuasaan pemerintah pusat melalui Depdiknasnya, kini terdelegasikan pada pemerintah daerah. Dan kini perubahan radikal tersebut memperoleh penguatan dengan diundangkannya UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan dalam pasal Pasal 10 Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Namun peran serta Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas guru belum ada yang menyelenggarakan secara penuh perintah Undang-Undang tentang penggunaan anggaran pendidikan 20%.

Selanjutnya peran LPTK tidak mungkin terlupakan karena lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru (LPTK). Selama ini LPTK adalah lembaga pendidikan guru yang secara langsung bertanggung jawab untuk menghasilkan tenaga guru, mulai dari program diploma maupun strata satu, dua dan tiga. Dulu kita mengenal lembaga pendidikan guru, yang menghasilkan tenaga guru, terutama untuk guru Sekolah Dasar dikenal dengan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO). Selanjutnya era tahun 1984-1985 LPTK tersebut dilikuidasi, dan beberapa tahun kemudian muncul lembaga pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Apa yang kita lihat sekarang, bahwa program pendidikan guru yang ada masih dalam kondisi adaptasi dan proses pengembangan, baik dari sisi program pengajaran

maupun kualitas dan kapasitas SDM. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap kualitas lulusannya. Karena apa? Peserta didik program pendidikan guru pada umumnya adalah mereka yang berasal dari berbagai jalur SMA yang tentunya kurang memiliki motivasi sepenuhnya untuk menjadi guru. Karena banyaknya beban mata kuliah yang harus diambil mahasiswa, sehingga belum sepenuhnya dilakukan pemantapan dalam pembentukan dan pembinaan sikap profesional serta menjadi kebanggaan berprofesi sebagai guru.

Disadari atau tidak, program pendidikan guru yang terjadi saat ini lebih berorientasi pada pembinaan kemampuan akademis teoritis dan kurang menekankan pada pembinaan kemampuan fungsional praktis di lapangan, sehingga kurang memiliki kesiapan untuk menjalankan tugasnya sebagai guru. Kita menyadari bahwa mahasiswa pendidikan guru yang ada sekarang ini, kalaulah boleh dikatakan, hanya 30 persen saja yang memilih FKIP sebagai pilihan pertama, dan umumnya lulus ternyata pilihan alternatif. Nilai yang diperoleh dari UAN pada umumnya di bawah rata-rata, dan 90 persen lebih adalah wanita. Hal ini berkaitan dengan SDMnya, tidak memadainya sarana dan prasarana perkuliahan.

Kadang ada polemik mengenai institusi pendidikan yang menyiapkan guru di Indonesia ini. Banyak IKIP telah berubah menjadi universitas. Persoalannya adalah apakah dengan perubahan itu penyiapan tenaga pendidikan sungguh disiapkan semakin profesional atau malah sebaliknya? Apakah dengan perubahan itu perhatian institusi terhadap keperluan peningkatan kualitas guru semakin besar? Nampaknya sudah saatnya dibutuhkan refleksi yang mendalam dari institusi penyelenggara pendidikan di Indonesia ini.

Permasalahan Lulusan LPTK terkadang dianggap kurang berkualitas, maka saya menawarkan alternatifnya pemecahannya adalah: *Pertama* membangun (menghadirkan) Sekolah Menengah Pendidikan Guru yang disingkat (SMPG). *Input* dari SMPG adalah siswa-siswa SMP sederajat yang

memiliki motivasi menjadi guru, karena guru memang sudah menjadi pilihan batinnya atau panggilan hatinya. Kemudian mereka diseleksi, baik tes maupun psikotes, mereka yang lulus selanjutnya diasramakan dan diberikan fasilitas (Beasiswa) pembelajaran selama tiga tahun. Bila mereka ingin menjadi guru SD meneruskan ke PGSD(S1), dan untuk menjadi guru Sekolah Menengah meneruskan ke program S1 FKIP.

Secara hakiki mereka belum diperbolehkan menjadi guru, akan tetapi lembaga ini sebagai wadah dalam mempersiapkan tenaga guru profesional dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan, SMPG tentunya lebih memfokuskan kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Manajemen Berbasis Peningkatan Mutu Belajar (MBPMB). Pola pembelajaran mengembangkan model pengembangan pendidikan guru ini dilakukan dengan target yakni Bergulir, Bertahap, Tuntas dan Berkualitas. Lulusan SMPG langsung diterima sebagai mahasiswa undangan di FKIP (LPTK). Langkah ini diambil sebagai pertimbangan strategis untuk mengatasi masalah merosoknya mutu pendidikan guru.

Peningkatan kualitas pendidikan, bagi guru merupakan harga mati, karena kualitas SDM yang dihasilkan guru sangat tergantung kepada kualitas guru itu sendiri. Ada korelasi positif antara guru berkualitas dengan anak berkualitas. Peningkatan kualitas guru dapat saja berkaitan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada mereka, baik berupa TOT, *workshop*, penyetaraan kualifikasi pendidikan, magang dan sebagainya.

Profesionalisme dan tanggung jawab terhadap profesi merupakan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh seorang guru. Pekerjaan guru adalah profesi, sehingga setiap guru harus profesional, dan profesional inilah yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Karena profesi ini akan berkaitan dengan orang banyak, dan menentukan masa depan bangsa, serta karakter anak bangsa. Oleh sebab itu, semua guru harus

mempertanggungjawabkan secara moral profesinya, baik untuk dirinya maupun peserta didiknya.

Peningkatan kesejahteraan guru, memang ini sangat riskan untuk dibicarakan, akan tetapi karena tuntutan ekonomi guru yang sangat memprihatinkan. Guru di negeri ini kurang diperhatikan, bahkan bisa dikatan diabaikan. Gaji guru rendah, bahkan terkadang disunat. Upaya yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya tunjangan khusus kepada guru, di samping menaikkan tunjangan fungsional.

Cara lain untuk meningkatkan kualitas guru ke depan adalah dengan cara memposisikan guru sebagai pegawai (PNS) pusat artinya pengangkatan dan kebijakan yang berlaku pada guru ditentukan oleh pusat, sehingga guru muda dikontrol dan dievaluasi kinerja dan kualitasnya. Adapun model pengangkatan guru harus melalui lembaga-lembaga kampus dalam hal ini LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah. Caranya adalah setiap pemerintah membutuhkan guru, maka pemerintah bekerjasama dengan lembaga kampus dalam hal ini LPTK mengadakan penerimaan calon guru yang berijazah minimal S1, Kemudian calon guru yang dinyatakan lulus dibekali kompetensi keguruan secara professional berdasarkan disiplin ilmu yang akan diajarkan di sekolah atau bidang studi yang dipilih. Adapun lamanya pendidikan yang harus ditempuh untuk mencapai kompetensi yang diharapkan adalah selama satu tahun.

Sampai di sini harus dipahami bahwa guru profesional yang layak diapresiasi tinggi itu adalah guru yang menjadi pelaku aktif sebuah proses pembentukan ilmu pengetahuan (*knowledge construction*), dimana meneliti, menulis, dan pertemuan ilmiah adalah tiga serangkai kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari usaha pembentukan pengetahuan yang dilakukan guru tersebut. Oleh karena itu sejak awal penulis berkeyakinan bahwa ketika kita bicara tentang profesionalisme guru, sulit bagi kita untuk tidak berbicara tentang dunia penelitian di kalangan guru ini.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mutu pendidikan saat ini masih rendah. Cukup banyak bukti yang dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan itu. Hasil survei TIMSS 2003 (*Trends in International Mathematics and Sciences Study*) di bawah payung *International Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA)* menempatkan Indonesia pada posisi ke-34 untuk bidang matematika dan pada posisi ke-36 untuk bidang sains dari 45 negara yang disurvei (Kompas, 22-12-2004).

Segera muncul pertanyaan, mengapa kualitas pendidikan di Indonesia rendah? Pertanyaan itu sebenarnya juga telah menjadi pertanyaan umum dan klasik di tengah masyarakat. Jawabannya pun juga telah diketahui, yakni yang paling utama karena kualitas guru umumnya rendah.

Mengapa mutu guru rendah? Jawaban pokok, karena gaji guru rendah. Karena gaji guru rendah, generasi muda yang tertarik menjadi calon guru umumnya bukan calon-calon terbaik. Calon-calon terbaik akan bersekolah di sekolah lanjutan tingkat atas favorit atau berkuliah di jurusan favorit, misalnya kedokteran, teknik, hubungan internasional, atau lainnya.

Lulusan non kependidikan yang kemudian tertarik menjadi guru dengan mengambil program akta mengajar dapat dipastikan juga bukan lulusan terbaik. Mereka umumnya mengambil program akta mengajar karena kesulitan mencari pekerjaan di luar profesi guru.

Sebaliknya, apabila gaji guru tinggi, generasi muda yang tertarik menjadi guru pastilah pilihan. Oleh karena calon yang bersekolah dan berkuliah di sekolah guru dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) adalah calon-calon yang berkualitas tinggi (lulusan terbaik), dan tentu dengan kepribadian yang terbaik, maka dapat dipastikan akan diperoleh guru-guru yang berkualitas.

Guru yang berkualitas juga akan mampu mengembangkan tes dan sistem pengujian yang tepat. Guru

yang berkualitas juga akan mau terus mengembangkan wawasannya untuk menunjang profesinya. Sebaliknya, calon guru yang selama ini berasal dari generasi muda kelas bawah (karena gaji guru rendah), walaupun diikutkan dalam berbagai kegiatan penataran dan lokakarya, mereka akan tetap tidak beranjak. Karena secara akademis kemampuan dasar mereka memang lemah.

Setelah gaji guru ditetapkan tinggi, langkah lanjutannya adalah jabatan seorang guru dievaluasi secara periodik (5-7 tahun), sanksi diberikan secara jelas dan tegas, dan karier guru sangat jelas dan ditetapkan secara obyektif. Oleh karena gaji guru tinggi, mereka yang telah menjadi guru akan dievaluasi secara periodik oleh lembaga independen yang kredibel.

Hasil evaluasi terhadap guru tersebut setidaknya ada tiga kemungkinan, yakni (a) guru memenuhi standar dan akan dievaluasi sekali dalam lima tahun; (b) guru yang memenuhi standar rendah dan akan dievaluasi dua tahun sekali (dua tahun untuk berbenah diri, dan bila tetap belum lulus diberi kesempatan dua tahun lagi, dan setelah itu diberhentikan dari jabatan guru); dan (c) guru yang tidak memenuhi standar langsung diberhentikan dari jabatan guru dan dipindahkan menjadi PNS non guru.

Guru yang tidak memenuhi standar atau melakukan tindakan yang tidak terpuji harus diberi sanksi tegas. Selanjutnya, guru-guru yang diberhentikan dari jabatan guru tersebut diisi dengan guru muda yang diseleksi dengan cara sangat ketat atau bila sudah ada lulusan LPTK "model baru" mereka langsung ditempatkan untuk mengisi formasi guru yang diberhentikan tersebut. Dengan demikian, dalam waktu lima tahun yang akan datang hanya guru bermutu saja yang berdiri di depan kelas dan guru-guru baru bermutu yang akan bekerja secara profesional di sekolah.

Selain itu, karier guru harus jelas dan ditetapkan secara obyektif. Guru yang berprestasi secara otomatis akan menjadi wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah

atau kepala sekolah yang berprestasi akan berkompetisi menjadi kepala dinas pendidikan. Pendek kata, karier kependidikan hanya boleh ditempati oleh guru-guru yang berprestasi. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Pada saat yang bersamaan, yakni saat gaji guru ditetapkan tinggi.

Penerimaan mahasiswa calon guru di LPTK harus sangat ketat. Demikian juga, tidak sembarang perguruan tinggi boleh menyelenggarakan program pendidikan calon guru. Hanya yang terakreditasi A saja yang boleh menyelenggarakan program studi kependidikan, itu pun dengan pengawasan yang sangat ketat oleh lembaga independen yang ditunjuk. Cara itu dipastikan akan menghasilkan calon-calon guru yang bermutu yang siap menjadi guru profesional di lapangan.

Dengan lima kebijakan di atas (gaji guru tinggi, jabatan guru dievaluasi secara periodik, karier guru jelas, seleksi calon guru sangat ketat, dan hanya LPTK bermutu (berkualitas) yang boleh menyelenggarakan pendidikan guru) dapat dipastikan bahwa guru yang berdiri di depan kelas adalah orang-orang yang secara akademik dan profesional benar-benar berkualitas. Mereka itu akan bekerja dengan penuh konsentrasi, sangat hati-hati dan bersungguh-sungguh mengingat gaji mereka tinggi dan setiap lima tahun kinerjanya akan dievaluasi. Apabila lima gagasan ini dapat diakomodasi dalam waktu 5-6 tahun yang akan datang kita pasti memiliki guru yang bermutu, yang berimplikasi pula pada terwujudnya pendidikan yang bermutu di Tanah Air.

Gagasan Lain untuk menyiapkan guru ke depan adalah: Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya mencoba mengajukan pertanyaan tambahan yaitu; Bagaimana masa depan guru dan guru untuk masa depan yang penuh dengan tantangan?

Masa depan guru merujuk kepada dua hal yaitu; Pertama Bagaimana nasib kesejahteraan kehidupan guru; Kedua posisi strategi guru dalam penyiapan sumber daya manusia yang unggul dan andal yang sangat dibutuhkan untuk

masa depan. Sementara itu penyiapan guru untuk masa depan merujuk kepada bagaimana profil guru yang ideal yang diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan andal untuk membangun Indonesia baru memasuki abad ke 21 dan seterusnya.

1) Masa Depan Guru

Masa depan guru adalah topik klasik yang sering didiskusikan, diseminarkan dan bahkan menjadi pembicaraan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Walaupun begitu, kesejahteraan guru tak kunjung memenuhi harapan mereka. Berbagai seminar telah memberikan rekomendasi bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan guru di tanah air.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam setiap kongresnya juga selalu mengusulkan agar kesejahteraan guru ditingkatkan. Akan tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Pemerintah selalu memberikan alasan bahwa keuangan negara belum memungkinkan untuk menambah penghasilan guru. Akan tetapi sebaliknya untuk menyehatkan perbankan nasional (rekapitalisasi pemerintah berani menyediakan anggaran melalui APBN hampir 600 triliun?

Perbandingan itu mungkin tidak seluruhnya tepat, akan tetapi setidaknya dapat menunjukkan betapa tidak seimbangny perhatian pemerintah terhadap investasi jangka panjang melalui pendidikan itulah nantinya akan diperoleh calon-calon pemimpin dan pekerja masa depan.

Secara umum, masa depan guru ditentukan oleh tiga pihak, yakni pemerintah, organisasi profesi, dan pribadi guru masing-masing. Dengan diberlakukannya otonomi daerah (UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah), pemerintah daerahlah (Daerah Tingkat II) nantinya yang akan cukup menentukan kesejahteraan guru. Sekiranya ada standar gaji secara nasional untuk semua pegawai negeri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan

Undang-Undang Kepegawaian yang baru), pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada guru. Apabila hal ini benar-benar dapat terwujud, kesejahteraan guru akan sedikit lebih meningkat.

Pihak kedua yang juga ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah organisasi profesi, tempat guru bergabung, yakni PGRI. Untuk waktu yang akan datang, PGRI hendaknya tidak ikut-ikutan memotong gaji guru, tetapi sebaliknya mengupayakan tambahan penghasilan bagi guru. PGRI juga jangan hanya berkongres lalu menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah, sementara mereka sendiri tidak pernah melakukan tindakan nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

Pihak terakhir yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan guru adalah pribadi guru itu sendiri. Untuk itu, guru perlu belajar bagaimana menulis artikel, menulis cerita anak-anak, dan menulis karya-karya yang lain. Guru yang mampu inilah yang diharapkan juga dapat menularkan kemampuannya kepada siswanya di sekolah. Sungguh membanggakan dan sangat positif dapat berbuat demikian.

Bagaimana dengan posisi strategis guru? Sampai kapan pun guru akan tetap menduduki posisi yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan bangsa. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila semua pihak wajib ikut memikirkan dan berbuat secara nyata bagaimana caranya agar kesejahteraan dan kemampuan profesional guru terus meningkat. Bukankah investasi jangka panjang melalui peningkatan khususnya melalui peningkatan kesejahteraan guru hasilnya akan dapat dinikmati oleh generasi penerus pengemban masa depan bangsa?

2) Guru Untuk Masa Depan

Guru untuk masa depan akan menghadapi tantangan yang lebih berat. membanjirnya informasi, terbukanya hubungan antar negara yang semakin mengglobal, dan

tantangan-tantangan problematik lainnya menuntut guru memiliki kemampuan-kemampuan profesional yang tidak hanya memindahkan informasi, pengetahuan, dan teori kepada siswa seperti yang terjadi saat ini. Guru dituntut memiliki kemampuan-kemampuan yang jauh lebih tajam dan beragam. Kemampuan-kemampuan guru untuk masa depan setidaknya dapat diidentifikasi dalam delapan kemampuan berikut ini.

- a. Guru dituntut memiliki kemampuan membimbing pengembangan kemahirwacanaan (*literacy*) siswa. Kemahirwacanaan itu meliputi tiga kemampuan sinergis, yakni membaca-berpikir-menulis, yang sangat dibutuhkan dalam abad informasi, abad ke-21 nanti.
- b. Guru dituntut dapat membimbing siswa bagaimana belajar yang benar. Pengetahuan dan keterampilan bagaimana belajar yang benar ini jauh lebih penting bagi siswa daripada apa yang (akan) dipelajari.
- c. Guru dituntut mampu membimbing siswa agar dapat mengembangkan secara seimbang kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), rasa, karsa, dan prakarsa. Dengan kemampuan itu, guru dapat menghasilkan siswa yang cerdas sekaligus juga memiliki ketekunan, ketelatenan, kesabaran, mampu bekerja sama, memiliki inisiatif, kreatif, dan produktif.
- d. Guru dituntut memiliki kemampuan membimbing siswa belajar memahami dan menerima keberagaman dan perbedaan-perbedaan. Keberagaman dan perbedaan-perbedaan yang bersumber dari etnis, budaya, bahasa daerah, adat istiadat, agama dan lain-lain hendaknya sejak dini ditanamkan kepada siswa agar mereka dapat memahami dan menerimanya sebagai kekayaan dalam wadah negara yang besar ini. Sebaliknya, tidak menjadikannya sebagai sumber perpecahan.
- e. Sebagai kelanjutan kemampuan keempat di atas, guru juga dituntut mampu membimbing siswa memelihara keutuhan bangsa dan wilayah dengan wawasan keadilan dan

kesejahteraan untuk seluruh warga negara. Itu semua dibutuhkan untuk mengantisipasi disintegrasi bangsa yang sudah sangat terasa mulai saat ini.

- f. Guru yang dituntut memiliki kemampuan membimbing siswa menjadi warga negara yang sadar hukum, sadar politik, sadar ekonomi, sadar ideologi, sadar hankam, dan sadar budaya bangsa. Selain itu, guru juga dituntut mampu menanamkan sejak dini kepada siswa untuk menjadi warga negara yang dapat menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan dalam tatanan masyarakat madani yang kita dambakan bersama.
- g. Guru hendaknya juga memiliki kemampuan membimbing siswa untuk peka atau sensitif terhadap keadaan dan segala hal yang ada di sekitarnya. Kepekaan ini sangat dibutuhkan manakala suatu bangsa menghadapi berbagai kesulitan seperti yang terjadi saat ini. Kepekaan terhadap lingkungan alam (kelestaraan alam) dan sosial sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan kelestarian bangsa. Kita bisa merasakan saat ini, betapa pentingnya penanaman berbagai kepekaan tersebut kepada siswa di sekolah.
- h. Guru dituntut dapat membimbing siswa meningkatkan pengamalan agama, budi pekerti yang luhur, bermoral dan berakhlak mulia. Kemampuan ini ditempatkan terakhir bukan berarti tidak penting, tetapi sebaliknya. Kemampuan-kemampuan di atas akan "tidak ada gunanya apabila ternyata guru tidak mampu membimbing siswanya menjadi anak-anak yang taat beribadah sesuai dengan agama masing-masing, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia tersebut.
- i. Kemampuan yang telah dikemukakan di atas bagaimana dapat diperoleh guru? Kemampuan-kemampuan tersebut dapat diperoleh guru melalui pendidikan prajabatan (*preservice training*), pendidikan dalam jabatan (*inservice training*), dan belajar secara mandiri. Melalui pendidikan prajabatan (PGSD dan berbagai program S1 kependidikan),

Guru dan calon guru ditempa memiliki kedelapan kemampuan di atas. Itu berarti kedelapan kemampuan itu seharusnya diintegrasikan ke dalam kurikulum PGSD dan berbagai program S1 kependidikan (LPTK) yang menghasilkan tenaga guru. Selanjutnya, ketika guru memperoleh pendidikan dalam jabatan misalnya melalui berbagai penataran, lokakarya, seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya, kedelapan kemampuan itu hendaknya juga menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan dalam jabatan. Forum-forum pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang biasanya ada di setiap daerah tingkat II juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kedelapan kemampuan tersebut. Namun, berbagai upaya tersebut akan tidak banyak berarti manakala guru tidak mampu mengembangkan secara mandiri seluruh perolehanannya tersebut. Untuk itu, setiap guru dituntut memiliki kemampuan kuat untuk mengembangkan dirinya guna menyongsong masa depan guru yang lebih baik dan sekaligus menyiapkan dirinya menjadi guru untuk masa depan yang dapat diandalkan.

BAB V

GURU: KOMPETENSI DAN KINERJA

A. Pendahuluan

Guru dalam proses pembelajaran di kelas dipandang dapat memainkan peran penting terutama dalam membantu peserta didik untuk membangun sikap positif dalam belajar, membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong kemandirian dan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan kondisi-kondisi untuk sukses dalam belajar.

Kinerja dan kompetensi guru memikul tanggung jawab utama dalam transformasi orientasi peserta didik dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak terampil menjadi terampil, dengan metode-metode pembelajaran bukan lagi mempersiapkan peserta didik yang pasif, melainkan peserta didik berpengetahuan yang senantiasa mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan informasi baru dengan berfikir, bertanya, menggali, mencipta dan mengembangkan cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ditegaskan bahwa pendidik (guru) harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini. Arahkan normatif tersebut yang menyatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran menunjukkan pada harapan, bahwa guru merupakan pihak pertama yang paling bertanggung jawab dalam pentransferan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Terkait dengan pernyataan tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Fuad Hasan berpendapat bahwa, "sebaik apapun kurikulum jika tidak dibarengi oleh guru yang berkualitas, maka semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, kurikulum yang kurang baik akan dapat ditopang oleh guru yang berkualitas. Oleh sebab itu, peningkatan mutu guru sepatutnya menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Kompas, 2 Maret 2006).

Hal senada dipertegas lagi oleh Mulyasa (2003: 147) bahwa betapapun bagus suatu kurikulum (*official*), tetapi hasilnya sangat tergantung pada apa yang dilakukan oleh guru dan juga siswa dalam kelas (*actual*). Bila dicermati kedua pernyataan tersebut di atas, maka keduanya menunjukkan bahwa berhasil-tidaknya pelaksanaan kurikulum di sekolah sangat tergantung pada kinerja guru.

Di negara kita, bukan rahasia lagi bahwa masyarakat mempunyai harapan yang berlebih terhadap guru. Keberhasilan atau kegagalan sekolah sering dialamatkan kepada guru. Justifikasi masyarakat tersebut dapat dimengerti karena guru adalah sumber daya yang aktif, sedangkan sumber daya-sumber daya yang lain adalah pasif. Oleh karena itu, sebaik-baiknya kurikulum, fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi jika kualitas gurunya rendah maka sulit untuk mendapatkan hasil pendidikan yang bermutu tinggi. Oleh karena itu, kajian tentang kinerja dan kompetensi guru masih merupakan hal penting untuk dibahas di dalam tulisan ini, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar (*legal aspect*) dalam upaya perancangan dan pengembangan kinerja dan kompetensi guru dalam pembelajaran.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas: Pengertian kinerja guru; Fungsi kinerja dalam pembelajaran; Kompetensi guru, dan diakhiri dengan kesimpulan.

B. Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja

Kata kinerja adalah terjemahan dari kata *performance* yang didefinisikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai & Basri, 2005: 14).

Samsudin (2006:159) memberikan pengertian kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Nawawi (2005:234) memberikan pengertian kinerja sebagai hasil pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kinerja merupakan suatu perbuatan atau perilaku seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati oleh orang lain.

Di pihak lain, Gibson, *et al.* (2006: 149), dan Hersey & Blanchard (1993: 5), mendefinisikan kinerja sebagai tingkat keberhasilan yang dinyatakan dengan fungsi dari motivasi dan kemampuan. Sedangkan, Mulyasa (2004:136) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja.

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi perlu dilakukan penilaian kinerja.

Evaluasi kinerja (*performance evaluation*) juga dikenal dengan penilaian kinerja (*performance appraisal*), yaitu suatu aktivitas untuk menentukan keberhasilan pegawai dalam

melakukan suatu pekerjaan dengan hasil yang baik (Ivancevich, 2007: 253). Untuk memudahkan penilaian kinerja diperlukan indikator-indikator kinerja yang jelas. Rivai dan Basri (2005:17) menjelaskan faktor-faktor yang menandai kinerja seseorang, antara lain: (1) kebutuhan yang ingin dibuat, (2) tujuan khusus, (3) kemampuan, (4) komitmen, (5) perhatian pada setiap kegiatan, (6) usaha, (7) ketekunan, (8) ketaatan, (9) kesediaan untuk berkorban, dan (10) memiliki standar yang jelas.

Penilaian kinerja dapat juga dilakukan melalui fungsi interaksi dari beberapa faktor yang didefinisikan mempengaruhi kualitas dan kuantitas kinerja. Ainsworth, Smith & Millership (2007: 5). menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil akhir dari persamaan kemampuan (A), dengan motivasi (M), sedangkan Robbins (1996: 219) memberikan definisi kinerja sebagai fungsi dari kemampuan atau *ability* (A), motivasi atau *motivation* (M) dan kesempatan atau *opportunity* (O), atau kinerja = $f(A, M, O)$. Formulasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa kinerja merupakan hasil interaksi antara kemampuan, motivasi dan kesempatan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu maka seseorang harus memiliki tingkat kesediaan dan kemampuan yang mendukung penyelesaian pekerjaan tersebut. Kesediaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu tidaklah efektif tanpa didukung oleh pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oleh karena itu, aspek kemampuan dan kesediaan seseorang secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Implementasi penyelesaian tugas, seseorang tidak sekedar memerlukan motivasi, tetapi lebih menuntut komitmen seseorang dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung-jawabnya. Komitmen berkaitan dengan kesediaan, kepedulian, ketertarikan atas sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, komitmen menjalankan tugas

dinyatakan sebagai salah satu kemampuan yang digunakan untuk mengukur kinerja guru. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kinerja seseorang terhadap pekerjaan tertentu dalam kurun waktu tertentu dapat diukur berdasarkan kemampuan dan komitmen dalam menjalankan tugas. Kemampuan yang terkait dengan tugas guru adalah penguasaan terhadap bahan ajar yang akan diajarkan dan kemampuan mengelola proses pembelajaran.

Oleh karena itu, kinerja lebih berkonotasi pada sejauh mana seseorang melakukan aktifitas baik yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan tingkat kompetensi yang dikuasainya atau dengan kata lain kinerja sebagai perilaku lebih banyak dimotori dan koordinasikan oleh sejumlah pengetahuan maupun informasi yang dikuasai seseorang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan tugasnya.

2. Fungsi Kinerja dalam Pembelajaran

Pembelajaran sebagai wujud dari kinerja guru yang piawai dan berhasil secara memuaskan, maka segala kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru harus menyatu, menjiwai, dan menghayati tugas-tugas yang relevan dengan tingkat kebutuhan, minat, bakat dan tingkat kemampuan peserta didik serta kemampuan guru dalam mengorganisasi materi pembelajaran dengan penggunaan ragam teknologi pembelajaran yang memadai.

Menurut Silverius (2003: 97), guru adalah tokoh sentral pendidikan dalam upaya menyiapkan kader bangsa di masa depan, kunci sukses reformasi pendidikan. Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, faktor guru mendapat perhatian yang pertama dan utama, karena baik-buruknya pelaksanaan suatu kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan arahan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, guru harus profesional dalam menjalankan

tugasnya.

Syafaruddin dan Nasution (2003: 97), menjelaskan guru profesional yang bertugas mengajar di sekolah memerlukan keahlian khusus. Sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan potensi anak yang sedang mengalami perkembangan, maka guru harus benar-benar ahli dalam tugasnya. Sedangkan Nurdin (2005: 22), menjelaskan seorang guru profesional harus memahami apa yang diajarkannya dan menguasai bagaimana mengajarkannya.

Brown dalam Sardiman (2000: 142) menjelaskan tugas dan peranan guru, antara lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan belajar siswa. Menurut Sanjaya (2005:13-14), kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolalan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Sebagai perencana, maka guru harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan, sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai evaluator maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

Pembelajaran menurut Hudoyo (1979: 25), menjelaskan bahwa tugas guru sebagai pelaksana kurikulum harus memahami empat pertanyaan kurikulum, yaitu mengapa, apa, bagaimana dan kepada siapa topik-topik harus diajarkan? Pertanyaan **pertama**, mengapa topik-topik harus diajarkan, berkaitan dengan pemahaman guru tentang kegunaan dan hakekatnya. Pertanyaan **kedua**, apa yang akan diajarkan, berkaitan dengan penguasaan guru terhadap bahan ajar yang akan diajarkan. Pertanyaan **ketiga**, bagaimana mengajarkan, berkaitan dengan penguasaan guru tentang strategi pembelajaran, dan pertanyaan **keempat**, kepada siapa bahan ajar diajarkan berkaitan dengan pemahaman guru tentang karakteristik siswa yang belajar.

Uraian teoretis di atas memberikan arahan bahwa tugas guru dalam pembelajaran menuntut penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan dan penguasaan tentang bagaimana mengajarkan bahan ajar yang menjadi pilihan. Pemilihan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran oleh guru tentunya disesuaikan dengan karakteristik siswa yang akan belajar dan kurikulum yang berlaku.

Agar guru dapat mengajar dengan baik, maka syarat pertama yang harus dimiliki adalah menguasai betul dengan cermat dan jelas apa-apa yang hendak diajarkan. Seorang guru yang tidak menguasai bahan ajar, tidak mungkin dapat mengajar dengan baik kepada para siswanya. Oleh karena itu, penguasaan bahan ajar merupakan syarat essensial bagi guru. Hal penting dalam pembelajaran setelah guru menguasai bahan ajar adalah peran guru dalam mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas belajar siswa. Upaya guru untuk menguasai bahan ajar yang akan diajarkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan optimal dapat terwujud jika dalam diri guru tersebut ada dorongan dan tekad yang kuat (komitmen) untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan proses dan hasil belajar siswa yang berkualitas tentu memerlukan kinerja guru yang maksimal. Agar guru dapat menunjukkan kinerjanya yang tinggi, paling tidak guru tersebut harus memiliki penguasaan terhadap materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya agar pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien serta komitmen untuk menjalankan tugas-tugas tersebut.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kinerja guru dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan seorang guru secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur berdasarkan tiga indikator yaitu: penguasaan bahan

ajar, kemampuan mengelola pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas. Berikut ini secara berturut-turut ketiga indikator tersebut dibahas secara teoretik.

a. Penguasaan Bahan Ajar

Halsey (1994: 148) menyatakan bahwa syarat pertama agar berhasil dalam mengajar ialah menguasai betul dengan cermat dan jelas apa-apa yang hendak diajarkan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Nurdin (2005: 80) bahwa penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan adalah mutlak dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru. Sedangkan Woolfolk (1984: 436) menjelaskan bahwa pengetahuan bahan ajar oleh guru adalah salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan guru dalam pembelajaran.

Oleh karena itu, agar guru berhasil dalam kegiatan pembelajaran, maka seorang guru harus menguasai bahan ajar yang akan diajarkan dengan sebaik-baiknya.

Hal ini dipertegas oleh Hudoyo (1990: 16) bahwa penguasaan, bidang studi (bahan ajar), oleh guru akan sangat membantunya dalam mengajar, sebab mengajar adalah suatu proses mengkomunikasikan pengetahuan kepada peserta didik. Dengan demikian, kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan pengetahuan sangat bergantung pada penguasaan pengetahuan yang akan dikomunikasikannya itu. Hal ini berarti bahwa dalam proses komunikasi dengan peserta didik, faktor penguasaan bidang studi adalah yang dapat memungkinkan guru dalam mengkomunikasikan bahan ajarnya.

Penguasaan bidang studi oleh guru akan tampak dalam perilaku nyata ketika ia mengajar. Penguasaan itu akan tampak pada kemampuan guru dalam menjelaskan, mengorganisasikan bahan ajar, dan sikap guru. Semakin baik penguasaan bahan ajar oleh guru, maka kemampuan guru dalam menjelaskan dan mengorganisasikan bahan ajar juga semakin baik. Dengan demikian kinerja guru, salah satunya

dipengaruhi oleh penguasaan bahan ajar.

Guru yang kurang mantap penguasaan bidang studi atau kurang yakin apa yang dikuasainya akan kehilangan kepercayaan diri bila berada dalam kelas, selalu ragu-ragu, dan tidak dapat memberikan jawaban yang tepat dan tuntas atas pertanyaan peserta didik. Hal ini akan berakibat kurang baik dalam mengajarkan bahan ajar, sebab akan merendahkan mutu pembelajaran dan dapat menimbulkan kesulitan pemahaman oleh peserta didik. Lebih dari itu, guru yang tidak menguasai bidang studi (bahan ajar) akan diremehkan oleh peserta didik.

Bagaimana dapat menguasai bahan ajar dengan mudah?, maka guru perlu memperbanyak membaca, mempelajari, mendalami, dan mengkaji bahan ajar yang ada dalam buku teks maupun buku pelajaran. *Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kinerja guru, salah satunya dipengaruhi oleh penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan. Penguasaan bahan ajar oleh guru adalah kemampuan yang dimiliki guru dalam menerapkan sejumlah fakta, konsep, prinsip dan keterampilan untuk menyelesaikan dan memecahkan soal-soal atau masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diajarkan.*

b. Kemampuan Mengelola Pembelajaran

Menurut Uno (2006: 129) kemampuan merujuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang dapat dilihat dari pikiran, sikap, dan perilakunya. Hal ini berarti kemampuan berhubungan dengan kinerja efektif dalam suatu pekerjaan. Sedangkan pengelolaan menunjuk kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses suatu kegiatan (Rohani HM, 2004: 123). Pengertian pengelolaan *dipertegas Djamarah (2005: 144) bahwa pengelolaan berhubungan dengan keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal bagi terjadinya proses interaksi antar pihak yang terkait.*

Sanjaya (2005: 150) menjelaskan bahwa salah satu tugas guru adalah mengelola sumber belajar untuk mewujudkan tujuan

belajar; sedangkan Usman (2002: 21), menjelaskan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran, salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan guru mengelola pembelajaran.

Menurut Woolfolk (1984: 436), keberhasilan guru dalam pembelajaran, di samping ditentukan oleh pengetahuan guru tentang bahan ajar dan metode-metode mengajar juga ditentukan oleh pengelolaan kelas. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas belajar siswa di kelas. Guru harus berupaya memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesempatan belajar bagi siswanya.

Mulyasa (2005: 69) menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Aspek-aspek yang saling berkaitan tersebut, antara lain: guru, siswa, bahan ajar, sarana pembelajaran, lingkungan belajar. Sedangkan, Syafuruddin dan Nasution (2005: 110) menjelaskan bahwa mengorganisir dalam pembelajaran adalah pekerjaan yang dilakukan seorang guru dalam mengatur dan menggunakan sumber belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar dengan cara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pengertian kemampuan mengelola pembelajaran yang telah dijelaskan di atas, maka salah tugas guru adalah mengupayakan dan memberdayakan semua aspek yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: guru, siswa, bahan ajar, sarana pembelajaran, dan lingkungan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung efektif. Pernyataan tersebut dipertegas lagi oleh Usman (2002: 21) bahwa pengelolaan pembelajaran terkait dengan upaya guru untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung, mengembangkan bahan ajar dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk

memahami materi pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus mereka capai.

Kondisi pembelajaran yang efektif dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pembelajaran, mampu menjalin hubungan interpersonal dengan siswa serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang efektif akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan mengelola pembelajaran merupakan upaya guru dalam mengelola pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung dengan dimensi: (1) menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, (3) membina hubungan yang positif dengan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Upaya guru menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran meliputi indikator: (1) menunjukkan sikap tanggap, (2) memberi perhatian dan petunjuk yang jelas, (3) menegur/memberi ganjaran, (4) memberi penguatan, (5) mengatur ruangan belajar sesuai kondisi kelas; upaya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi indikator: (1) membuka pembelajaran, (2) melaksanakan pembelajaran, (3) melakukan penilaian dan tindak lanjutnya terhadap kegiatan pembelajaran, dan (4) menutup pembelajaran-, sedangkan upaya guru membina hubungan positif dengan siswa meliputi indikator: (1) membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa, (2) bersikap luwes dan terbuka terhadap siswa, (3) menunjukkan kegairahan dan kesungguhan dalam mengajar, dan (4) mengelola interaksi perilaku siswa di dalam kelas.

c. Komitmen Terhadap Tugas

Guru merupakan faktor yang pertama dan utama yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah harus diawali dengan adanya komitmen guru untuk menjalankan tugas

yang aktif, kreatif dan inovatif. Menurut Karlof dan Ostblom (1994: 17), menjelaskan bahwa keberhasilan suatu pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh adanya partisipasi atau keterlibatan seseorang tetapi juga dipengaruhi oleh adanya komitmen seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menurut Partanto & Al Barry (1994: 352) komitmen berkaitan dengan kesatuan janji dan kesepakatan bersama. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa komitmen merupakan pengaturan diri di dalam pekerjaan masing-masing atau keterikatan *psikologis seseorang pada organisasi*. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa komitmen berkaitan dengan kesediaan, kepedulian, ketertarikan dan keterlibatan atas sesuatu dengan penuh tanggung jawab.

Mulyasa (2003: 151) menjelaskan bahwa komitmen secara mandiri perlu dibangun pada setiap individu warga sekolah termasuk guru, terutama untuk menghilangkan setting pemikiran dan budaya kekakuan birokrasi, seperti harus menunggu petunjuk atasan dengan mengubalnya menjadi pemikiran yang kreatif dan inovatif.

Pernyataan Mulyasa tersebut dipertegas Syafaruddin & Nasution (2005: 154) yang menyatakan bahwa untuk memantapkan budaya mutu dalam menuju sekolah unggul perlu dibangun komitmen menanamkan dalam diri personil sekolah untuk mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen merupakan suatu kesediaan untuk berpihak kepada sesuatu tugas yang didasari atas kreatifitas untuk mencapai suatu tujuan. Perasaan keberpihakan dan keterlibatan dalam tugas dapat diartikan sebagai unsur kebanggaan dan menyenangkan sesuatu, rela berkorban dan bertanggung jawab.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa komitmen adalah suatu keberpihakan diri terhadap suatu pekerjaan atau tugas atas dasar loyalitas, tanggung jawab, dan keterlibatan secara psikologis dalam tugas, seperti kebanggaan dan rela berkorban.

Komitmen tersebut dapat diraih melalui beberapa aktivitas, antara lain: (1) membangun arti penting tugas yang menjadi tanggung jawab, (2) menyederhanakan berbagai tugas yang rumit, dan (3) berorientasi terhadap penyelesaian tugas. Tugas guru salah satunya adalah mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa

sehingga siswa mau belajar (Osman, 2002: 21). Untuk itu, agar siswa cenderung aktif dalam kegiatan pembelajaran maka guru harus dapat mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa. Tugas pengarahan dan pembimbingan tersebut dapat terwujud, jika dalam diri guru tersebut ada dorongan dan komitmen untuk melakukannya.

Terkait dengan tugas guru tersebut, Timpe (1991: 177) menyatakan bahwa dasar komitmen adalah komunikasi dan peran serta. Adanya komunikasi dan peran guru ditentukan oleh komitmen guru itu sendiri. Untuk itu, diperlukan komitmen guru mewujudkan proses komunikasi dan peran guru dalam mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung efektif.

Ainsworth, Smith & Millership (2007: 134) mempertegas peran komitmen dalam mendukung keberhasilan suatu pekerjaan, bahwa jika mereka kurang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dan arah strategis suatu organisasi maka mereka tidak pernah memiliki kinerja sesuai dengan harapan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komitmen terhadap tugas adalah keberpihakan seorang guru secara psikologis dalam mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa sehingga kondisi pembelajaran efektif, yang ditandai oleh: (1) kepedulian terhadap kesulitan belajar siswa, (2) partisipasi dalam membimbing kegiatan belajar siswa (secara individu dan kelompok), (3) menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, (4) adanya kemauan yang tinggi dalam membelajarkan siswa, (5) tingkat kehadiran yang tinggi dan (6) memiliki tanggung jawab dalam tugas pembelajaran.

C. Kompetensi Guru

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *competence*. Maknanya sama dengan *being competent*, sedangkan *competent* sama artinya dengan *having ability, power, authority, skill, knowledge, attitude* dan sebagainya. Dengan demikian kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keterampilan dan pengetahuan seseorang di bidang tertentu. Jadi kata

kompetensi diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau suatu keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan.

Elliot (2005:5) mengemukakan bahwa kompetensi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau kualitas dari keefektifan, kemampuan, atau kesuksesan. Depdiknas (2002:1) merumuskan bahwa bahwa kompetensi adalah suatu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam keputusan Mendiknas Tahun 2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Selain itu ada juga yang memberi makna kompetensi hampir sama dengan keterampilan hidup atau "*life skills*". Kompetensi atau keterampilan hidup dinyatakan dalam bentuk kinerja atau performansi yang dapat diukur.

Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi. Kompetensi memiliki lima karakteristik, yaitu (1) motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu-, (2) sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan komite terhadap situasi atau informasi; (3) konsep diri, yaitu sikap, nilai, image diri seseorang; (4) pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu; dan (5) keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kompetensi seseorang terbentuk karena adanya dua faktor utama yang mempengaruhi, yakni (1) faktor internal, yaitu potensi bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir yang diturunkan dari orangtua; (2) faktor eksternal, yaitu potensi lingkungan yang membentuk seseorang untuk memiliki potensi. Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh

seseorang dapat berupa pengetahuan, keterampilan dan sebagainya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.

a. Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan lama mengajar. Pengembangan kompetensi merupakan suatu proses konsolidasi dalam memaliratkan seperangkat keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai domain kehidupan (Sternberg, 2005:15). Kompetensi guru dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru, yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka penubinaan dan pengembangan tenaga guru.

Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti (Mulyasa, 2007:25). Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme guru. Guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Kurnia (2005) mengemukakan ciri-ciri guru yang profesional, yaitu (1) memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan tertentu agar dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik melalui pendidikan dan dalam jabatan yang dilaksanakan secara terpadu, (2) standar kompetensi sesuai dengan tuntutan kinerja sebagai guru profesional, (3) sertifikasi dan lisensi sebagai tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai guru profesional, (4) kode etik guru yang mengatur perilaku guru sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, (5) pengakuan masyarakat yang menggunakan jasa guru melalui pemberian kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan dan status hukum yang lebih baik yang dibandingkan ketika guru masih dianggap sebagai suatu pekerjaan (vokasionan), dan (6) organisasi profesi guru yang merwadhahi anggotanya dalam mempertahankan, memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraan serta pengembangan profesional guru.

Kompetensi utama yang harus dikuasai guru adalah

membelajarkan peserta didik. Namun demikian, kompetensi ini tidak berdiri sendiri. Hadiyanto (2004:12) mengemukakan ada sembilan karakteristik citra guru yang ideal, yaitu: (1) memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap, (2) mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek, (3) mampu belajar dan bekerjasama dengan profesi lain, (4) memiliki etos kerja yang kuat, (5) memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan karir, (6) berjiwa profesional tinggi, (7) memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material, dan non material, (8) memiliki wawasan masa depan, dan (9) mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara terpadu. Kemudian dijelaskan bahwa guru harus mempunyai: (1) kepribadian yang matang dan berkembang, (2) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, (3) keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik, dan (4) mengembangkan profesinya secara berkesinambungan.

Menurut Drexel (2003:6-7), seseorang yang memiliki kompetensi, yaitu: selalu berorientasi pada hasil, memperluas prosedur dalam mengidentifikasi dan menilai hasil proses pembelajaran, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan formal dan informal serta berperilaku terhadap kenajuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah suatu performansi (kemampuan) yang dimiliki seorang guru meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam melaksanakan profesi sebagai guru. Melaksanakan kegiatan, seorang guru berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus sesuai dengan kompetensinya.

b. Standar Kompetensi Guru

Secara umum seorang guru harus memenuhi dua kategori, yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*. *Capability*, yakni guru harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik; mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi. *Loyalitas* keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan, tidak semata di dalam kelas, tapi juga

di luar kelas.

Untuk itu seorang guru harus memiliki sifat: (1) menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan, (2) memikul tugas mendidik dengan bebas, berani dan gembira, (3) sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya, (4) menghargai orang lain, (5) bijaksana dan hati-hati, dan (6) taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Djamarali, 2005:36). Seorang guru harus memiliki sepuluh kemampuan dasar sehingga dapat dikatakan profesional. Kemampuan dasar tersebut yaitu: (1) menguasai bahan pelajaran, (2) mengelola program belajar mengajar, (3) mengelola kelas, (4) menggunakan media/ sumber, (5) menguasai landasan-landasan kependidikan, (6) mengelola interaksi belajar mengajar, (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, (8) mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran (Sardiman, 1994:163-181).

Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (INTASC) Standar bagi seorang guru yaitu harus memiliki pemahaman tentang: bidang ilmu, pengembangan potensi anak, berbagai strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, kemampuan berkomunikasi, perencanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, komitmen, dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak.

Pembahasan di atas maka untuk menjadi seorang guru harus memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasar seorang guru merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sebagai seorang guru. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus sebagai seorang guru. Standar kompetensi guru merupakan suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku bagi seorang guru agar berkeelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, dan mata pelajaran (bidang

keahlian) yang diajarkan harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Lebih lanjut seorang guru harus memiliki sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan suatu pengakuan/ lisensi yang diberikan kepada guru untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai profesi di bidang kependidikan. Konsekuensi dengan adanya sertifikasi dan lisensi guru menuntut pendidikan dan pengembangan kemampuan guru, sehingga guru tersebut memiliki standar profesi yang dicerminkan dari kompetensi yang dimilikinya.

D. Kompetensi Guru Menurut Undang-Undang

Di dalam kenyataannya kompetensi guru tidak dapat dipilah satu sama lainnya, namun terintegrasi dalam suatu tindakan atau perilaku kehidupan sehari-hari. Dalam kajian ini kompetensi guru secara teoritis dikaji secara terpisah berdasarkan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar mendapat sertifikasi untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tenaga kependidikan yaitu meliputi: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik mempunyai arti ilmu mendidik. Kompetensi pedagogik merupakan suatu performansi (kemampuan) seseorang dalam bidang ilmu pendidikan. Untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki kompetensi pedagogik. Seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan dan keterampilan pada bidang profesi kependidikan. Menurut Depdiknas (2002:27) pengetahuan dan pemahaman yang harus dimiliki seorang guru sebagai profesi kependidikan meliputi hal: a) peserta didik, b) teori belajar dan pembelajaran, c) kurikulum dan perencanaan pengajaran, d) budaya dan masyarakat sekitar sekolah, e) filsafat dan teori pendidikan, f) evaluasi, g) teknik dasar dalam mengembangkan proses belajar, h) teknologi dan pemanfaatannya dalam pendidikan, i) penelitian, j) moral, etika dan kaidah profesi.

Menurut Valente, Dalam Matondang (2008:9), menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting. Kemudian dikemukakan bahwa: *This kind of competency is the main problem related to the didacted and methodology used in classroom teaching*. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman tentang: (a) sifat dan ciri anak didik serta perkembangannya, (b) konsep-konsep pendidikan yang berguna membantu anak didik, (c) metodologi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak didik, dan (d) sistem evaluasi yang baik dan tepat. Pada bidang pedagogik, seorang guru harus memiliki kompetensi: a) mampu mengidentifikasi dan memahami karakteristik peserta didik dari aspek sosial, moral, kultural, emosional dan intelektual, b) mampu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, c) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, d) mampu merancang pembelajaran yang mendidik, e) mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, f) mampu merancang penilaian proses dan hasil belajar, g) mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, dan h) mampu menggunakan hasil penilaian untuk berbagai kepentingan pembelajaran dan pendidikan.

2. Kompetensi Kepribadian

Kepribadian merupakan suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian seseorang. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Kompetensi kepribadian merupakan suatu performansi pribadi (sifat-sifat) yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi kepribadian bagi guru adalah pribadi guru yang terintegrasi dengan penampilan kedewasaan yang layak diteladani, memiliki sikap dan kemampuan memimpin yang demokratis serta mengayomi peserta didik. Jadi seorang guru harus memiliki kepribadian yang: a) mantap, b) stabil, c) dewasa, d) arif, e) berwibawa, f) berakhlak mulia, dan g) dapat menjadi tauladan (Mulyasa, 2007:118).

Literatur psikologi kepribadian, umumnya mengelompokkan kepribadian atas 5 domain yang dikenal dengan *Big Five Personality*, masing-masing: *extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness to experiences*. Menurut Ryckman (2008: 640:642) ada 5 faktor yang mencerminkan kepribadian manusia yaitu: *surgency, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, and intellect*.

Berdasarkan kompetensi kepribadian tersebut, seorang guru harus: a) mampu bertindak secara konsisten sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, b) mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, c) mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia sebagai tauladan bagi peserta didik dan masyarakat, d) mempunyai rasa bangga menjadi guru, dapat bekerja mandiri, mempunyai etos kerja, rasa percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi, e) berperilaku jujur dan disegani, f) mampu mengevaluasi diri dan kinerja secara terus menerus, g) mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan belajar dari berbagai sumber ilmu dan h) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3. Kompetensi Sosial

Pakar psikologi pendidikan menyebut kompetensi sosial itu sebagai *social intelligence* atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, alam, dan kuliner). Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang, hanya mungkin beberapa diantaranya menonjol dan yang lain biasa saja atau kurang. Unikinya beberapa kecerdasan tersebut bekerja secara terpadu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau mengerjakan sesuatu.

Menurut Ramly (2006:87) guru merupakan suatu cermin. Guru sebagai cermin memberikan gambaran (pantulan diri) bagaimana dia memandang dirinya, masa depannya, dan profesi yang ditekuninya. Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan kompetensi sosial merupakan suatu

kemampuan seorang guru dalam hal berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan: a) peserta didik, b) sesama pendidik, c) tenaga kependidikan, d) orang tua/wali peserta didik dan e) masyarakat sekitar (Depdiknas, 2003:27). Jadi seorang guru harus: a) mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, b) mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, c) mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, d) bersikap kooperatif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi, dan e) mampu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi professional merupakan suatu kemampuan sesuai dengan keahliannya. Seorang guru harus menyampaikan sesuatu (sesuai keahliannya) kepada peserta didik dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. Kanfel (2005:337) mengemukakan bahwa kompetensi di tempat kerja merupakan perpaduan antara performans maksimum dan tipikal perilaku seseorang. Seorang guru harus memiliki kompetensi professional dalam bidang keahliannya.

Seorang guru memiliki kompetensi profesional bila guru tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar di bidangnya. Adapun beberapa disiplin ilmu dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang guru meliputi : a) penguasaan bidang studi (materi) pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkikannya membimbing peserta didik memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, dan b) memilih, mengembangkan kurikulum dan atau silabus sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.

Dari pengetahuan dan kemampuan tersebut, maka

kompetensi profesional guru dapat dikategorikan atas: a) memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang keahliannya, b) mampu memilih dan mengembangkan materi pelajaran, c) menguasai materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang mendukung bidang keahlian, d) menguasai metode untuk melakukan pengembangan ilmu dan telaah kritis terkait dengan bidang keahlian, e) kreatif dan inovatif dalam penerapan bidang ilmu yang terkait dengan bidang keahlian, f) mampu mengembangkan kurikulum dan silabus yang terkait dengan bidang keahlian, g) mampu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, h) mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan maupun tulisan, i) mampu memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran, berkomunikasi dan mengembangkan diri sebagai seorang guru.

BAB VI

GURU: DIPANDANG SEBELAH MATA

A. Pendahuluan

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan atau guru mempunyai tugas yang cukup kompleks antara lain merencanakan dan melaksanakan proses belajar-mengajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi dosen pada perguruan tinggi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan atau guru ialah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1). Dalam Undang-undang tersebut tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan *administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (Pasal 39-ayat 1 dan 2)*

Afrianto Daud dalam harian Kompas, Jumat 14 Desember 2007, menjelaskan bahwa ketika era reformasi (termasuk reformasi dalam dunia pendidikan) bergulir,

keinginan bangsa ini untuk menjadikan guru kita menjadi pendidik profesional bukan guru yang dipandang sebelah mata sangat kencang terdengar. Hampir semua masyarakat pendidikan kita percaya bahwa salah satu agenda utama perbaikan dunia pendidikan nasional adalah dengan terlebih dahulu memperbaiki dunia keguruan kita dalam berbagai dimensinya. Aura semangat ini sangat kentara ketika kita membaca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut profesi guru sebagai profesi yang 'sejajar' (baca: diapresiasi sama) dengan dosen perguruan tinggi. Dengan demikian, guru tidak lagi dianggap sebagai 'pahlawan tanpa tanda jasa' dalam makna negatif, tetapi menjadi seorang yang pantas dan layak diapresiasi tinggi karena profesionalisme mereka.

Sampai di sini harus dipahami bahwa guru profesional yang layak diapresiasi tinggi itu adalah guru yang menjadi pelaku aktif sebuah proses pembentukan ilmu pengetahuan (*knowledge construction*), di mana meneliti, menulis, dan pertemuan ilmiah adalah tiga serangkai kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari usaha pembentukan pengetahuan yang dilakukan guru tersebut. Oleh karena itu sejak awal penulis berkeyakinan bahwa ketika kita bicara tentang profesionalisme guru, sulit bagi kita untuk tidak berbicara tentang dunia penelitian di kalangan guru ini.

Seluruh kalangan pendidik khususnya guru dan dosen menyambut gembira disahkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 23, disebutkan tentang rencana pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru dengan pola ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang dimaksud IKIP, eks IKIP, FKIP, STKIP. Memang tak bisa dimungkiri, lembaga pendidikan guru yang ada saat ini masih **dipandang sebelah mata** oleh kebanyakan calon mahasiswa, orang tua, dan sebagian besar masyarakat kita, dan bahkan pemerintah dilihat dari sisi keberpihakan pada pemberian

anggaran pada sekolah guru. Karena itu, sampai sekarang, Indonesia belum memiliki sekolah unggulan calon guru yang kualitasnya setaraf dengan STAN, IPDN atau seko ah-sekolah tinggi lain yang cukup bergengsi di mata publik.

Kualitas pendidikan tidak terlepas dari seperangkat pelaksana pendidikan, karena perangkat pelaksana pendidikan memiliki lingkup kegiatan langsung berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Salah satu pelaksana pendidikan itu adalah guru, karena guru merupakan ujung tombak dalam membentuk karakter anak didik, mulai dari aspek pemberian pengetahuan (*kognitif*), melakukan perubahan sikap (*afektif*) sampai kepada kemampuan berbuat (*psikomotor*). Tugas guru begitu berat, tetapi terkadang dipandang sebelah mata, hal ini dapat dilihat kurangnya penghargaan yang diberikan kepadanya, gaji yang sangat kecil, dan terkadang mendapat perlakuan yang kurang terpuji dari komponen masyarakat yang lain.

Di pihak lain, julukan guru sebagai "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" bisa tidak menguntungkan bagi para guru dan profesi keguruan bahkan berakibat pada sekolah-sekolah keguruan dalam hal ini LPTK yang termasuk IKIP, eks IKIP, FKIP, dan STKIP, Fakultas Tarbiyah. Dengan julukan itu, ada kesan seakan-akan guru merupakan kelompok masyarakat yang melakukan pekerjaan yang terhormat, bernilai, dan agung dalam mendidik bangsanya, namun atas keringat dan jerih payahnya itu mereka mesti menerima apa adanya. Tidak perlu banyak menuntut atau mengharapkan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka dapatkan sekarang.

Tidak usah pula guru mengeluh jika daya beli gajinya rendah karena jumlah dan tingkat kenaikan gajinya tidak mampu mengimbangi inflasi dan depresiasi. Tidak perlu juga menangis bila kenaikan pangkatnya terlambat, atau gajinya "disunat" untuk biaya upacara di kecamatan, biaya pelantikan dan serah terima jabatan atasannya, atau untuk pembelian pakaian seragam secara massal yang harganya biasa lebih

mahal.

Jawaban klise yang sering mereka dengar bila mereka dengan penuh kerendahan hati, rasa hormat, dan harapan (juga do'a kepada Allah Swt) mengungkapkan isi hatinya yang berkaitan dengan nasibnya ialah: "Siapa menyuruh saudara jadi guru," "Mengapa Anda memilih pekerjaan guru"? atau "Tetap menjadi guru atau mundur. Sungguh jawaban seperti ini tidak empatik, yang membuat guru panas dingin, tidak tahu kepada siapa lagi mereka mesti mengadu untuk menyampaikan isi hatinya.

B. Guru dengan Mutu Pendidikan Rendah

Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor. 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Depdiknas, 2003 : 5).

Pada saat ini, pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol seperti: (1) masih rendahnya pemerataan pendidikan dan kesempatan belajar; (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Isu-isu Strategik Kebijakan Pendidikan. (Depdiknas, 2001: 16-25).

Pada pasal 45 Bab XII UU 20/2003 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pada pasal 46 Bab XIII

tertulis bahwa: (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta (2) pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Selain itu, pada pasal 47 dinyatakan bahwa: (1) sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan dan (2) pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Depdiknas, 2003: 20-21). Sedangkan pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APED) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk RAPBN 2004, pemerintah memberikan alokasi anggaran sektor pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga sebesar Rp 15,2 triliun atau 22,4 persen dari anggaran pembangunan sebesar Rp 68,1 triliun. Menurut Winarno, persentase ini dinilai tidak sesuai dengan amandemen UUD 1945 dan UU No. 20/2003 dengan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari jumlah APBN sebesar Rp 368,8 triliun. Akibatnya, sektor pendidikan tidak bisa meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. (Kompas, 20 Agustus 2003).

Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan disadari satu kebenaran fundamental, yakni bahwa kunci keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional, yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang baru untuk merencanakan pendidikan di masa depan. Dalam kaitan mempersiapkan guru yang berkualitas di masa depan, dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada persoalan bagaimana meningkatkan kualitas sekitar 2 juta guru yang sekarang ini sudah bertugas di ruang-ruang kelas.

Pada dasarnya peningkatan kualitas diri seseorang harus menjadi tanggung jawab diri pribadi. Oleh karenanya

usaha peningkatan kualitas guru terletak pada diri guru sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran pada diri guru untuk senantiasa dan secara terus menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan guru peningkatan kualitas kerja sebagai pengajar profesional. Kesadaran ini akan timbul dan berkembang sejalan dengan kemungkinan pengembangan karir mereka. Oleh karena itu pengembangan kualitas guru harus dikaitkan dengan perkembangan karir guru sebagai pegawai, baik negeri maupun swasta. Gambaran yang ideal adalah bahwa pendapatan dan karir, dalam hal ini jenjang jabatan dan kepangkatan merupakan hasil dari peningkatan kualitas seseorang selaku guru.

Urutan proses di atas menunjukkan bahwa jenjang kepangkatan dan jabatan yang tinggi hanya bisa dicapai oleh guru yang memiliki kualitas profesional yang memadai. Sudah barang tentu alur pikir tersebut didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan jenjang kepangkatan dan jabatan guru berjalan seiring dengan peningkatan pendapatannya.

Proses dari timbulnya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan profesional di kalangan guru, timbulnya kesempatan dan usaha, meningkatnya kualitas profesional sampai tercapainya jenjang kepangkatan dan jabatan yang tinggi memerlukan iklim yang memungkinkan berlangsungnya proses di atas. Iklim yang kondusif hanya akan muncul apabila di kalangan guru timbul hubungan kesejawatan yang baik, harmonis, dan obyektif. Hubungan tersebut bisa dimunculkan antara lain lewat kegiatan profesional kesejawatan.

Dengan demikian, untuk pembinaan dan peningkatan kemampuan profesional guru perlu dikembangkan kegiatan profesional kesejawatan yang baik, harmonis, dan obyektif. Secara sistematis pengembangan kesejawatan ini memerlukan: a) wadah /kelembagaan, b) bentuk kegiatan, c) mekanisme, d) *standard professional practice*.

Wadah dan kelembagaan untuk pengembangan kesejawatan adalah kelompok yang merupakan organ bersifat non-struktural dan lebih bersifat informal. Wadah ini dikembangkan berdasarkan bidang studi atau rumpun bidang studi pada masing-masing sekolah. Anggota yang memiliki kepangkatan tertinggi dalam setiap rumpun diharapkan bisa berfungsi sebagai pembimbing.

Kalau ada anggota memiliki kepangkatan yang sama, maka diharapkan secara bergiliran salah satu darinya berfungsi sebagai pembimbing anggota yang lain. Dengan bentuk wadah dan kelembagaan semacam ini maka di setiap sekolah akan terdapat lebih dari satu kelompok. Keberadaan kelompok akan memungkinkan para guru untuk bisa tukar pikiran dengan rekan sejawat mengenai hal ihwal yang berkaitan interaksi guru dengan para siswa. Bagi seorang pekerja profesional, termasuk guru, komunikasi kesejawatan tentang profesi yang ditekuni sangatlah penting. Namun sayangnya, justru komunikasi kesejawatan inilah yang belum ada di kalangan profesi guru di tanah air kita.

Kelompok yang dibentuk merupakan wadah kegiatan di mana antara anggota sejawat bisa saling asah, asuh dan asih untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing khususnya dan mencapai kualitas sekolah serta pendidikan pada umumnya. Asah artinya satu dengan anggota sejawat yang lain saling membantu untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Asuh berarti di antara anggota kesejawatan saling membimbing dengan tulus dan ikhlas untuk peningkatan kemampuan profesional dan asih berarti di antara anggota kesejawatan terdapat hubungan kekeluargaan yang akrab. Oleh karena itu kelompok yang beranggotakan para guru suatu bidang studi sejenis harus menitik-beratkan pada aktifitas profesional.

Secara terperinci kegiatan kelompok ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain :

- a. Diskusi tentang satuan pelajaran.
 - b. Diskusi tentang substansi materi pelajaran.
 - c. Diskusi pelaksanaan proses belajar mengajar termasuk evaluasi pengajaran.
 - d. Melaksanakan observasi aktivitas rekan sejawat di kelas.
 - e. Mengembangkan evaluasi penampilan guru oleh peserta didik.
 - f. Mengkaji hasil evaluasi penampilan guru oleh peserta didik sebagai *feedback* bagi anggota kelompok.
2. Meningkatkan penguasaan dan pengembangan keilmuan, khususnya bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
- a. Kajian jurnal dan buku baru.
 - b. Mengikuti jalur pendidikan formal yang lebih tinggi.
 - c. Mengikuti seminar-seminar dan penataran-penataran.
 - d. Menyampaikan pengalaman penataran dan seminar kepada anggota kelompok.
 - e. Melaksanakan penelitian.
3. Meningkatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah akademis. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
- a. Menulis artikel.
 - b. Menyusun laporan penelitian.
 - c. Menyusun makalah.
 - d. Menyusun laporan dan review buku.

Upaya peningkatan kualitas guru saat ini sudah ada dalam bentuk kemauan politik, hal ini ditandai dengan lahirnya: (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di dalam Bab IV tentang guru bagian I mengenai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pasal 8 yang mengatur tentang kualifikasi guru yakni guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.(2) Dan juga ditandai dengan lahirnya Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dengan portofolio. Juga di dalamnya mensyaratkan tentang kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta sertifikasi pendidikan. Tetapi belum ada upaya maksimal peningkatan kualitas guru dalam bentuk kebijakan dan tindakan politik secara sungguh-sungguh. Misalnya Undang-Undang telah mengatur tentang anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20 % dari APBN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, yang tentunya harus lebih dahulu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (guru) sebagai pilar utama pendidikan. Pemerintah juga belum secara sungguh-sungguh menjalankan Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Contoh Pemerintah menginginkan peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas guru, tetapi di lain pihak pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak sejalan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang. Contoh dengan mudah mengeluarkannya izin mendirikan LPTK yang dikelola oleh swasta, tanpa memperhatikan kondisi PT tersebut yang pada akhirnya melahirkan calon guru yang tidak berkualitas atau tidak dapat dipertanggung jawabkan secara maksimal.

Peran serta Pemerintah Daerah dalam membangun Pendidikan lewat memperbaiki kualitas guru telah diatur di dalam UU RI No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan. Persoalan besar dalam UU RI No. 22 tahun 1999 adalah perubahan radikal dalam otoritas pengembangan pendidikan yang semula berada dalam kekuasaan pemerintah pusat melalui Depdiknasnya, kini terdelegasikan pada pemerintah daerah. Dan kini perubahan radikal tersebut memperoleh penguatan dengan diundangkannya UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan dalam pasal 10 Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Namun peran serta Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas guru belum ada yang menyelenggarakan secara penuh perintah Undang-Undang tentang penggunaan anggaran pendidikan 20%.

Selanjutnya peran LPTK tidak mungkin terlupakan karena lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru (LPTK). Selama ini LPTK adalah lembaga pendidikan guru yang secara langsung bertanggung jawab untuk menghasilkan tenaga guru, mulai dari program diploma maupun strata satu, dua dan tiga. Dulu kita mengenal lembaga pendidikan guru, yang menghasilkan tenaga guru, terutama untuk guru Sekolah Dasar dikenal dengan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO). Selanjutnya era tahun 1984-1985 LPTK tersebut dilikuidasi, dan beberapa tahun kemudian muncul lembaga pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),

Apa yang kita lihat sekarang, bahwa program pendidikan guru yang ada masih dalam kondisi adaptasi dan proses pengembangan, baik dari sisi program pengajaran maupun kualitas dan kapasitas SDM. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap kualitas lulusannya. Karena apa? Peserta didik program pendidikan guru pada umumnya adalah mereka yang berasal dari berbagai jalur SMA yang tentunya kurang memiliki motivasi sepenuhnya untuk menjadi guru. Karena banyaknya beban mata kuliah yang harus diambil mahasiswa, sehingga belum sepenuhnya dilakukan pementasan dalam pembentukan dan pembinaan sikap

profesional serta menjadi kebanggaan berprofesi sebagai guru.

Disadari atau tidak, program pendidikan guru yang terjadi saat ini lebih berorientasi pada pembinaan kemampuan akademis teoritis dan kurang menekankan pada pembinaan kemampuan fungsional praktis di lapangan, sehingga kurang memiliki kesiapan untuk menjalankan tugasnya sebagai guru. Kita menyadari bahwa mahasiswa pendidikan guru yang ada sekarang ini, kalaulah boleh dikatakan, hanya 30 persen saja yang memilih FKIP sebagai pilihan pertama, dan umumnya lulus ternyata pilihan alternatif. Nilai yang diperoleh dari UAN pada umumnya di bawah rata-rata, dan 90 persen lebih adalah wanita. Hal ini berkaitan dengan SDMnya, tidak memadainya sarana dan prasarana perkuliahan.

Kadang ada polemik mengenai institusi pendidikan yang menyiapkan guru di Indonesia ini. Banyak IKIP telah berubah menjadi universitas. Persoalannya adalah apakah dengan perubahan itu penyiapan tenaga pendidikan sungguh disiapkan semakin profesional atau malah sebaliknya? Apakah dengan perubahan itu perhatian institusi terhadap keperluan peningkatan kualitas guru semakin besar? Nampaknya sudah saatnya dibutuhkan refleksi yang mendalam dari institusi penyelenggara pendidikan di Indonesia ini.

Permasalahan Lulusan LPTK terkadang dianggap kurang berkualitas, maka saya menawarkan alternatifnya pemecahannya adalah: *Pertama* membangun (menghadirkan) Sekolah Menengah Pendidikan Guru yang disingkat (SMPG). *Input* dari SMPG adalah siswa-siswa SMP sederajat yang memiliki motivasi menjadi guru, karena guru memang sudah menjadi pilihan batinnya atau panggilan hatinya. Kemudian mereka diseleksi, baik tes maupun psikotes, mereka yang lulus selanjutnya diasramakan dan diberikan fasilitas (Beasiswa) pembelajaran selama tiga tahun. Bila mereka ingin menjadi guru SD meneruskan ke PGSD(S1), dan untuk menjadi guru Sekolah Menengah meneruskan ke program S1 FKIP.

Secara hakiki mereka belum diperbolehkan menjadi

guru, akan tetapi lembaga ini sebagai wadah dalam mempersiapkan tenaga guru profesional dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan, SMPG tentunya lebih memfokuskan kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Manajemen Berbasis Peningkatan Mutu Belajar (MBPMB). Pola pembelajaran mengembangkan model pengembangan pendidikan guru ini dilakukan dengan target yakni Bergulir, Bertahap, Tuntas dan Berkualitas. Lulusan SMPG langsung diterima sebagai mahasiswa undangan di FKIP (LPTK). Langkah ini diambil sebagai pertimbangan strategis untuk mengatasi masalah merosoknya mutu pendidikan guru.

Peningkatan kualitas pendidikan, bagi guru merupakan harga mati, karena kualitas SDM yang dihasilkan guru sangat tergantung kepada kualitas guru itu sendiri. Ada korelasi positif antara guru berkualitas dengan anak berkualitas. Peningkatan kualitas guru dapat saja berkaitan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada mereka, baik berupa TOT, *workshop*, penyetaraan kualifikasi pendidikan, magang, dan sebagainya.

Profesionalisme dan tanggung jawab terhadap profesi merupakan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh seorang guru. Pekerjaan guru adalah profesi, sehingga setiap guru harus profesional, dan profesional inilah yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Karena profesi ini akan berkaitan dengan orang banyak, dan menentukan masa depan bangsa, serta karakter anak bangsa. Oleh sebab itu, semua guru harus mempertanggungjawabkan secara moral profesinya, baik untuk dirinya maupun peserta didiknya.

Peningkatan kesejahteraan guru, memang ini sangat riskan untuk dibicarakan, akan tetapi karena tuntutan ekonomi guru yang sangat memprihatinkan. Guru di negeri ini kurang diperhatikan, bahkan bisa dikatan diabaikan. Gaji guru rendah, bahkan terkadang disunat. Upaya yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya tunjangan khusus kepada guru, di samping

menaikan tunjangan fungsional.

Cara lain untuk meningkatkan kualitas guru ke depan adalah dengan cara memposisikan guru sebagai pegawai (PNS) pusat artinya pengangkatan dan kebijakan yang berlaku pada guru ditentukan oleh pusat, sehingga guru muda dikontrol dan dievaluasi kinerja dan kualitasnya. Adapun model pengangkatan guru harus melalui lembaga-lembaga kampus dalam hal ini LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah. Caranya adalah setiap pemerintah membutuhkan guru, maka pemerintah bekerjasama dengan lembaga kampus dalam hal ini LPTK mengadakan penerimaan calon guru yang berijazah minimal S1, Kemudian calon guru yang dinyatakan lulus dibekali kompetensi keguruan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu yang akan diajarkan di sekolah atau bidang studi yang dipilih. Adapun lamanya pendidikan yang harus ditempuh untuk mencapai kompetensi yang diharapkan adalah selama satu tahun.

Sampai di sini harus dipahami bahwa guru profesional yang layak diapresiasi tinggi itu adalah guru yang menjadi pelaku aktif sebuah proses pembentukan ilmu pengetahuan (*knowledge construction*), di mana meneliti, menulis, dan pertemuan ilmiah adalah tiga serangkai kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari usaha pembentukan pengetahuan yang dilakukan guru tersebut. Oleh karena itu sejak awal penulis berkeyakinan bahwa ketika kita bicara tentang profesionalisme guru, sulit bagi kita untuk tidak berbicara tentang dunia penelitian di kalangan guru ini.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mutu pendidikan saat ini masih rendah. Cukup banyak bukti yang dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan itu. hasil survei TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Sciences Study) di bawah payung International Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA) menempatkan Indonesia pada posisi ke-34 untuk bidang matematika dan pada posisi ke-36 untuk bidang sains dari 45 negara yang disurvei (Kompas, 22-12-2004).

Segera muncul pertanyaan, mengapa kualitas pendidikan di Indonesia rendah? Pertanyaan itu sebenarnya juga telah menjadi pertanyaan umum dan klasik di tengah masyarakat. Jawabannya pun juga telah diketahui, yakni yang paling utama karena kualitas guru umumnya rendah.

Mengapa mutu guru rendah? Jawaban pokok, karena gaji guru rendah. Karena gaji guru rendah, generasi muda yang tertarik menjadi calon guru umumnya bukan calon-calon terbaik. Calon-calon terbaik akan bersekolah di sekolah lanjutan tingkat atas favorit atau berkuliah di jurusan favorit, misalnya kedokteran, teknik, hubungan internasional, atau lainnya.

Lulusan nonkependidikan yang kemudian tertarik menjadi guru dengan mengambil program akta mengajar dapat dipastikan juga bukan lulusan terbaik. Mereka umumnya mengambil program akta mengajar karena kesulitan mencari pekerjaan di luar profesi guru.

Sebaliknya, apabila gaji guru tinggi, generasi muda yang tertarik menjadi guru pastilah pilihan. Oleh karena calon yang bersekolah dan berkuliah di sekolah guru dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) adalah calon-calon yang berkualitas tinggi (lulusan terbaik), dan tentu dengan kepribadian yang terbaik, maka dapat dipastikan akan diperoleh guru-guru yang berkualitas.

Guru yang berkualitas juga akan mampu mengembangkan tes dan sistem pengujian yang tepat. Guru yang berkualitas juga akan mau terus mengembangkan wawasannya untuk menunjang profesinya. Sebaliknya, calon guru yang selama ini berasal dari generasi muda kelas bawah (karena gaji guru rendah), walaupun diikuti dalam berbagai kegiatan penataran dan lokakarya, mereka akan tetap tidak beranjak. Karena secara akademis kemampuan dasar mereka memang lemah.

Setelah gaji guru ditetapkan tinggi, langkah lanjutannya adalah jabatan seorang guru dievaluasi secara periodik (5-7 tahun), sanksi diberikan secara jelas dan tegas, dan karier guru sangat jelas dan ditetapkan secara obyektif. Oleh karena gaji guru tinggi, mereka yang telah menjadi guru akan dievaluasi secara periodik oleh lembaga independen yang kredibel.

Hasil evaluasi terhadap guru tersebut setidaknya ada tiga kemungkinan, yakni (a) guru memenuhi standar dan akan dievaluasi sekali dalam lima tahun; (b) guru yang memenuhi standar rendah dan akan dievaluasi dua tahun sekali (dua tahun untuk berbenah diri, dan bila tetap belum lulus diberi kesempatan dua tahun lagi, dan setelah itu diberhentikan dari jabatan guru); dan (c) guru yang tidak memenuhi standar langsung diberhentikan dari jabatan guru dan dipindahkan menjadi PNS non guru.

Guru yang tidak memenuhi standar atau melakukan tindakan yang tidak terpuji harus diberi sanksi tegas. Selanjutnya, guru-guru yang diberhentikan dari jabatan guru tersebut diisi dengan guru muda yang diseleksi dengan cara sangat ketat atau bila sudah ada lulusan LPTK "model baru" mereka langsung ditempatkan untuk mengisi formasi guru yang diberhentikan tersebut. Dengan demikian, dalam waktu lima tahun yang akan datang hanya guru bermutu saja yang berdiri di depan kelas dan guru-guru baru bermutu yang akan bekerja secara profesional di sekolah.

Selain itu, karier guru harus jelas dan ditetapkan secara obyektif. Guru yang berprestasi secara otomatis akan menjadi wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah yang berprestasi akan berkompetisi menjadi kepala dinas pendidikan. Pendek kata, karier kependidikan hanya boleh ditempati oleh guru-guru yang berprestasi. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Pada saat yang bersamaan, yakni saat gaji guru ditetapkan tinggi.

Penerimaan mahasiswa calon guru di LPTK harus sangat ketat. Demikian juga, tidak sembarang perguruan tinggi boleh menyelenggarakan program pendidikan calon guru. Hanya yang terakreditasi A saja yang boleh menyelenggarakan program studi kependidikan, itu pun dengan pengawasan yang sangat ketat oleh lembaga independen yang ditunjuk. Cara itu dipastikan akan menghasilkan calon-calon guru yang bermutu yang siap menjadi guru profesional di lapangan.

Dengan lima kebijakan di atas (gaji guru tinggi, jabatan guru dievaluasi secara periodik, karier guru jelas, seleksi calon guru sangat ketat, dan hanya LPTK bermutu (berkualitas) yang boleh

menyelenggarakan pendidikan guru) dapat dipastikan bahwa guru yang berdiri di depan kelas adalah orang-orang yang secara akademik dan profesional benar-benar berkualitas. Mereka itu akan bekerja dengan penuh konsentrasi, sangat hati-hati dan bersungguh-sungguh mengingat gaji mereka tinggi dan setiap lima tahun kinerjanya akan dievaluasi. Apabila lima gagasan ini dapat diakomodasi dalam waktu 5-6 tahun yang akan datang kita pasti memiliki guru yang bermutu, yang berimplikasi pula pada terwujudnya pendidikan yang bermutu di Tanah Air.

Gagasan Lain untuk menyiapkan guru ke depan adalah: Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya mencoba mengajukan pertanyaan tambahan yaitu; Bagaimana masa depan guru dan guru untuk masa depan yang penuh dengan tantangan?

Masa depan guru merujuk kepada dua hal yaitu; Pertama Bagaimana nasib kesejahteraan kehidupan guru; Kedua posisi strategi guru dalam penyiapan sumber daya manusia yang unggul dan andal yang sangat dibutuhkan untuk masa depan. Sementara itu penyiapan guru untuk masa depan merujuk kepada bagaimana profil guru yang ideal yang diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan andal untuk membangun Indonesia baru memasuki abad ke 21 dan seterusnya.

Pertama Masa Depan Guru

Masa depan guru adalah topik klasik yang sering didiskusikan, diseminarkan dan bahkan menjadi pembicaraan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Walaupun begitu, kesejahteraan guru tak kunjung memenuhi harapan mereka. Berbagai seminar telah memberikan rekomendasi bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan guru di tanah air.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam setiap kongresnya juga selalu mengusulkan agar kesejahteraan guru ditingkatkan. Akan tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Pemerintah selalu memberikan alasan bahwa keuangan negara belum memungkinkan untuk menambah

penghasilan guru. Akan tetapi sebaliknya untuk menyehatkan perbankan nasional (rekapitalisas pemerintah berani menyediakan anggaran melalui APBN hampir 600 triliun?

Perbandingan itu mungkin tidak seluruhnya tepat, akan tetapi setidaknya dapat menunjukkan betapa tidak seimbangny perhatian pemerintah terhadap investasi jangka panjang melalui pendidikan itulah nantinya akan diperoleh calon-calon pemimpin dan pekerja masa depan.

Secara umum, masa depan guru ditentukan oleh tiga pihak, yakni pemerintah, organisasi profesi, dan pribadi guru masing-masing. Dengan diberlakukannya otonomi daerah (UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah), pemerintah daerahlah (Daerah Tingkat II) nantinya yang akan cukup menentukan kesejahteraan guru. Sekiranya ada standar gaji secara nasional untuk semua pegawai negeri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Kepegawaian yang baru), pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada guru. Apabila hal ini benar-benar dapat terwujud, kesejahteraan guru akan sedikit lebih meningkat.

Pihak kedua yang juga ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah organisasi profesi, tempat guru bergabung, yakni PGRI. Untuk waktu yang akan datang, PGRI hendaknya tidak ikut-ikutan memotong gaji guru, tetapi sebaliknya mengupayakan tambahan penghasilan bagi guru. PGRI juga jangan hanya berkongres lalu menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah, sementara mereka sendiri tidak pernah melakukan tindakan nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

Pihak terakhir yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan guru adalah pribadi guru itu sendiri. Untuk itu, guru perlu belajar bagaimana menulis artikel, menulis cerita anak-anak, dan menulis karya-karya yang lain. Guru yang mampu inilah yang diharapkan juga dapat

menularkan kemampuannya kepada siswanya di sekolah. Sungguh membanggakan dan sangat positif dapat berbuat demikian.

Bagaimana dengan posisi strategis guru? Sampai kapan pun guru akan tetap menduduki posisi yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan bangsa. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila semua pihak wajib ikut memikirkan dan berbuat secara nyata bagaimana caranya agar kesejahteraan dan kemampuan profesional guru terus meningkat. Bukankah investasi jangka panjang melalui peningkatan khususnya melalui peningkatan kesejahteraan guru hasilnya akan dapat dinikmati oleh generasi penerus pengemban masa depan bangsa?

C. Guru dengan Lembaga Pendidikan

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan atau guru ialah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1). Dalam Undang-undang tersebut tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan *administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.* (Pasal 39-ayat 1 dan 2)

Dari tugas yang komplek itu guru berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas,

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Selain tugas, guru juga mempunyai kewajiban yang cukup berat yaitu harus dapat menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogik. Guru harus mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan harus dapat memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Tetapi kenyataannya sampai saat ini keadaan guru terutama yang menyangkut masalah kesejahteraan dinilai masih jauh dari memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang antara lain mengatur tentang kesejahteraan Guru. seperti yang tertuang dalam Pasal 14, UU No. 14 Tahun 2005 tentang hak dan kewajiban guru disebutkan bahwa " (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Untuk memperoleh hak dan kewajiban seperti tersebut di atas ternyata tidak mudah dan harus melalui persyaratan tertentu seperti yang tertuang dalam pasal 42, UU No. 14 Tahun 2005 ayat (1) yaitu "Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam pengamatan saya, salah satu fenomena

rendahnya kualitas pendidikan kita diawali dengan rendahnya kualitas SDM para guru. Jujur saja kita melihat kebanyakan mahasiswa yang masuk LPTK atau ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) misalnya, bukanlah menempatkan itu pada pilihan pertama. Rata-rata mahasiswa masih memilih FKIP pada pilihan kedua sebagai jawaban "daripada-daripada". Bahkan, bagi yang mengambil pilihan Ilmu Pengetahuan Campuran (IPC) pada saat Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dengan tiga pilihan, maka FKIP pasti menjadi pilihan ketiga.

Sedikit sekali yang menyebut FKIP sebagai pilihan pertama. Ini bisa dibayangkan, bahwa menjadi guru bukanlah pilihan pertama mereka. Oleh karenanya, tidak aneh dalam belajar pun tampak efek dominonya. Mungkin saja dalam pandangan mereka, guru bukanlah profesi yang menjanjikan masa depan. Sehingga tidak jarang, pada akhirnya kuliah menjadi ajang mendapatkan prestise saja.

Kualitas guru juga dipengaruhi oleh kualitas para calon guru. Cukup lama bahwa profesi guru tidak begitu menarik generasi muda (Alumni SLTA) karena memang penghargaannya kecil. Sama-sama lulusan sarjana, lulusan keguruan sangat kecil gajinya. Akibatnya adalah banyak lulusan SMA yang sungguh pandai dan cerdas, tidak mau menjadi guru. Maka tidak mustahil bahwa calon guru adalah manusia kelas kedua, yang dalam perjalanan seterusnya lebih membutuhkan bimbingan untuk belajar lebih baik. Minat yang kecil menjadi guru mengakibatkan juga banyak calon mahasiswa keguruan kurang cerdas, kurang kreatif, dan kurang dapat mengembangkan profesinya sebagai guru yang berkualitas. Tentu analisis ini tidak berlaku untuk semua, tetapi lebih kebanyakan.

Pengaruh negatif itu pun akhirnya berlanjut. Setelah tamat dan memasuki era baru, yakni menghadapi lapangan pekerjaan sangat sulit, akhirnya dengan sangat terpaksa mereka pun melamar menjadi guru, walaupun itu hanya guru

honor. Realita ini sungguh luar biasa dampaknya pada dunia pendidikan kita, apalagi kalau kita bicara masalah mutu. Sebab, logika dasarnya saja, untuk mendapatkan *output* yang bagus, tentunya harus diawali dengan *input* yang bagus pula. Ke depan menjadi tugas kita semua melakukan upaya maksimal agar hal ini tidak lagi terjadi. Pemerintah sudah harus punya kebijakan yang jelas dalam hal peningkatan kualitas guru.

Unsur penting dalam pendidikan guru adalah dosen yang membimbing dan mendampingi para mahasiswa calon guru. Apakah dosennya sungguh berkualitas tinggi dan berkompetensi dalam bidangnya? Apakah dosen memberikan contoh relasi demokratis dan dialogis dengan mahasiswa selama perjalanan perkuliahan dan dalam banyak kegiatan di FKIP? Apakah para mahasiswa dapat merasakan dan mengalami dosennya sungguh sebagai pendidik yang baik?

Banyak dosen di FKIP atau universitas pendidikan yang memang bermutu dalam bidang keahlian mereka. Namun, yang sering dikeluhkan para mahasiswa adalah sikap mereka kepada mahasiswa yang masih sering tidak demokratis, kurang terbuka, dan kurang berdialog dengan mahasiswa. Istilah dosen *killer*, masih sering terdengar di kalangan mahasiswa. Dosen yang otoriter, yang maunya dihormati dan memaksa mahasiswa seenaknya masih sering terdengar. Beberapa dosen tidak terbuka pada perubahan baru, dengan penemuan baru. Akibatnya, selama bertahun-tahun, bahan yang diajarkan tetap sama dengan cara yang sama pula, bahkan sampai leluconnya pun sama untuk puluhan tahun.

Masih banyak dosen yang dalam mengajar menggunakan model ceramah, seperti namanya *lecturer*, dan mahasiswa lebih banyak diam. Mahasiswa tidak dilibatkan dalam proses pendidikan, tidak diperlakukan secara demokratis. Beberapa dosen tidak rela jika mahasiswanya lebih pandai, maka mencoba membatasi mahasiswa dalam mengakses sarana dan buku. Misalnya, ada beberapa dosen yang sulit dipinjam bukunya oleh mahasiswa, khawatir

mahasiswanya menjadi lebih pandai dari mereka. Maka, jika kelak mahasiswa itu menjadi guru, mereka akan mudah meniru sikap dosen yang tidak mereka sukai.

Dari keadaan di atas, tampak jelas diperlukan transformasi dan reformasi dalam diri para dosen sehingga mahasiswa dapat belajar secara nyata bagaimana paradigma baru pendidikan zaman ini. Salah satu hal yang kiranya amat penting diperhatikan adalah kesempatan dosen untuk studi lanjut, sehingga ilmunya tidak terbelakang. Kesempatan yaitu menyegarkan pengetahuannya setelah bekerja beberapa tahun, kiranya perlu diadakan sehingga para dosen terus memperbarui pengetahuan mereka. Tentu hal ini tidak mudah bagi universitas atau FKIP yang dananya kecil.

Meski banyak dosen yang memiliki kualifikasi dalam bidang yang mampu, tidak berarti proses pendampingan dosen terhadap mahasiswa berjalan lancar dan baik. Masih banyak dosen yang *ngobyek* mengajar di berbagai tempat dan mempunyai proyek di luar universitas yang membutuhkan waktu dan pemikiran tinggi. Akibatnya, dosen itu tidak mempunyai waktu dan energi banyak untuk membantu mahasiswa. Beberapa dosen sulit dicari mahasiswa ketika hendak bimbingan tesis karena selalu pergi mengerjakan proyek lain.

Para dosen itu tidak dapat membagikan secara tuntas semua keahliannya kepada mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa tidak sungguh berkembang, meski dosennya memiliki kualifikasi. Tentu secara finansial kegiatan dosen dengan proyek itu dapat dimengerti, karena mereka berpenghasilan kecil, tidak cukup untuk hidup layak bagi keluarganya. Ambil contoh, rata-rata gaji dosen hanya sekitar Rp 2.5 juta sebulan. Ini jelas tidak cukup untuk hidup keluarga dengan istri dan dua anak. Makin tidak cukup lagi bila mereka belum mempunyai rumah. Maka tidak mengherankan jika mereka masih harus mencari proyek di luar dengan akibat perhatian pada kuliah menjadi rendah.

Seluruh kalangan pendidik menyambut gembira

disahkannya undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam pasal 23, disebutkan tentang rencana pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru dengan pola ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang dimaksud IKIP, eks IKIP, FKIP, STKIP. Memang tak bisa dipungkiri, lembaga pendidikan guru yang ada saat ini masih dipandang sebelah mata oleh kebanyakan calon mahasiswa, orang tua, dan sebagian besar masyarakat kita. Karena itu, sampai sekarang, Indonesia belum memiliki sekolah unggulan calon guru yang kualitasnya setaraf dengan STAN, IPDN atau sekolah-sekolah tinggi lain yang cukup bergengsi di mata publik.

Menurut pendapat Muh. Suyatno Gerbang, Edisi 2 tahun v - 2005, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas guru di Indonesia adalah mayoritas sekolah keguruan kita hanya dianggap sebagai bibit kedua atau bahkan ketiga dan mahasiswanya juga berasal dari bibit kelas dua, bukan bibit unggul. Memang ada satu dua bibit unggul yang sejak awal ingin menjadi guru, tetapi kebanyakan bibit unggul lebih suka menyerbu, bangku sekolah ekonomi, teknik, kedokteran dan sejenisnya yang dinilai lebih menjanjikan di masa depan.

Sebenarnya, jika kita menyadari pendapat di atas itu sesuai dengan realitas di lapangan, kita tidak perlu tersinggung atau malu. Justru dari kenyataan inilah, selaku pendidik, kita harus menemukan terobosan baru untuk mendorong berdirinya lembaga pencetak guru yang prestisius.

Peraturan pemerintah (PP) berkenaan dengan pengembangan sistem pendidikan guru yang berpola ikatan dinas dan berasrama di lembaga pendidikan tenaga guru. **Pertama**, harus diadakan dulu sistem penyeleksian yang ketat dan efektif guna menampung calon mahasiswa yang tidak hanya unggul dari sisi akademis, tapi juga punya minat dan bakat menjadi guru. **Kedua**, tidak ada jenjang pendidikan di bawah strata satu (S1). **Ketiga**, demi menjamin efisiensi dan mutu pendidikan, para mahasiswa diharuskan mengikuti

kuliah teori selama delapan semester dan dua semester untuk kuliah praktik atau PPL. Keempat, setiap semester berlaku sistem gugur atau *drop out* bagi mereka yang mendapatkan indeks prestasi kurang dari indeks nilai yang telah ditentukan pihak fakultas. Kelima, setelah melewati sepuluh semester, mereka berhak meraih gelar sarjana pendidikan, tapi tidak otomatis mengantongi ijazah Akta IV. Untuk mendapatkannya, mereka mesti magang dulu di sekolah tertentu selama satu tahun dan mengikuti ujian Akta IV.

Secara implisit, sekolah keguruan jenis ini menyadarkan semua orang bahwa menjadi guru yang profesional tidak mudah. Kendati demikian, sekolah keguruan ini memberikan prospek yang lebih baik dibandingkan sekolah keguruan pada umumnya, karena para calon gurunya sudah siap pakai dan langsung ditempatkan di lembaga-lembaga pendidikan yang ditunjuk pemerintah.

Sebuah harapan bagi semua bahwa di tengah menjamurnya lembaga pendidikan guru di Indonesia, sekolah unggulan calon guru ini bisa dijadikan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Namun perlu digaris bawahi, sehebat apa pun lembaga pendidikan yang melahirkan guru, tidak akan berarti apa-apa tanpa ada kemauan pemerintah dalam menyejahterakan kehidupan guru atau selama pemerintah masih memandang sebelah mata sekolah guru bahkan guru itu sendiri.

D. Guru Di Pandang Sebelah Mata

Nasib guru masuki babak baru, setelah menanti dalam perjuangannya selama hampir 15 tahun, para guru akhirnya memperoleh hasil dengan disahkannya RUU Guru dan Dosen menjadi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 6 Desember 2005. Lamanya waktu penantian para guru telah menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah tidak serius

memberikan perhatian terhadap nasib para guru atau pemerintah memandang sebelah mata terhadap nasib para guru.

Pengamat Pendidikan Prof Dr Sutjipto dalam suatu kesempatan mengungkapkan keheranannya karena berdekade lamanya dan sudah begitu banyak usaha yang dilakukan, namun guru di Indonesia tetap saja dinilai sebagai kelompok manusia yang bermasalah. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap jabatan profesi guru belum sejajar dengan profesi lain. "Banyak guru merasa kurang bangga dengan predikat gurunya". Kekhawatiran muncul ketika pemerintah tidak melakukan usaha yang serius terhadap peningkatan martabat guru.

Menurut Arief Rachman yang seorang guru sekaligus dosen dan juga pengamat pendidikan, banyak orang tidak mau menjadi guru karena penghargaan terhadap profesi ini secara ekonomi tergolong kecil. "Jika pemikiran dan opini seperti ini langgeng dalam masyarakat, maka jangan heran jika pada gilirannya yang mau menjadi guru adalah orang-orang yang tidak terlalu cerdas karena orang-orang cerdas lebih memilih profesi lain yang menurut opini masyarakat cukup menjanjikan," katanya. Guru tak bisa lagi dihibur dengan gelar "pahlawan tanpa tanda jasa" yang sangat identik dengan keprihatinan. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata dari pemerintah yang tidak terhenti pada lahirnya sebuah kebijakan baru yang tidak pernah diterapkan. Status guru dengan julukan "Umar Bakri" ini secara sosial budaya masih menempati kelas ke sekian dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya yang juga setingkat sarana. Padahal, peran guru menentukan perjalanan bangsa. "Semakin tinggi tingkat penghargaan yang diberikan kepada guru, semakin tinggi pula pengabdian dan dedikasi guru terhadap profesinya," kata Arief. Banyak harapan disandang dari lahirnya UU Guru dan Dosen tersebut.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Mohamad Surya mewakili suara para guru menilai

Undang-Undang tersebut memberikan jaminan adanya peningkatan dedikasi dan tanggung jawab karena hak dan kewajibannya terlindungi sehingga mendorong timbulnya motivasi tinggi untuk bekerja secara lebih profesional. Urgensi dari kelahiran UU tentang guru dan Dosen beranjak dari kenyataan bahwa Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas tidak mengatur guru secara komprehensif dan bahkan tidak ada satu kata pun yang menyebutkan tentang guru. Kehadiran UU Guru diharapkan akan melengkapi berbagai kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah khususnya terkait dengan jabatan guru dan dosen yang selama ini belum diperhitungkan baik dalam UU Ketenagakerjaan dan Kepegawaian bahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sekalipun belum menjamin perlindungan hukum bagi guru. Sertifikat Profesi di atas kertas, pasal-pasal UU Guru dan Dosen sangat ideal untuk menjadikan guru dan dosen yang profesional sekaligus terpenuhi hak-haknya. Namun demikian, masih banyak permasalahan dalam UU tersebut yang harus diuraikan, khususnya terkait dengan kewajiban guru sebelum memiliki sertifikasi profesi.

Sertifikasi profesi pendidik dalam UU tersebut masih menuai pro kontra karena tidak membedakan untuk memperoleh sertifikat pendidik antara guru lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan guru bukan lulusan non LPTK, kata Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Drs Suyatno M.Pd. Ia mengatakan, jika tidak ada perbedaan antara guru lulusan LPTK dan non LPTK maka orang tidak akan mau masuk LPTK atau fakultas pendidikan. Hal tersebut, katanya, akan membahayakan dunia pendidikan. Hal itu juga bisa diartikan bahwa profesi guru adalah rendah. Jika tidak ada perbedaan, katanya, masyarakat lebih senang menempuh pendidikan umum karena selain bisa bekerja di profesi lain juga bisa menjadi pendidik setelah ikut pendidikan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sementara itu, seorang

guru akan sulit untuk bekerja di profesi lain, misalnya menjadi notaris.

Program sertifikasi guru itu sejalan dengan UU Guru dan Peraturan pemerintah mengenai standar pendidikan, sehingga perlu diterapkan. Ini demi peningkatan kualitas para guru, kami akan mendukung sepenuhnya," kata Ketua Umum PGRI, Muhammad Surya. Sertifikasi itu akan menimbulkan dampak positif yang besar terhadap profesi guru di tanah air. Selain meningkatkan kualitas guru juga ada pengakuan dari pemerintah terhadap profesi guru. "Tapi harus ada lembaga yang benar-benar independen yang akan menerbitkan sertifikat. Selain agar tidak ada campur tangan pemerintah, juga dimaksudkan untuk menghindari pemalsuan dan permainan dalam penerbitan sertifikat," katanya. Pemerintah melalui Depdiknas telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan perhatian terhadap proses untuk mendapatkan sertifikasi profesi bagi para guru itu.

Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Fasli Jalal, menjelaskan bahwa dalam UU Guru dan dosen, salah satunya menetapkan tentang tunjangan profesi guru dan dosen baik negeri maupun swasta. Jika anggaran Pendidikan tidak mencapai 20 persen maka tidak mungkin bisa memenuhi tunjangan guru dan dosen. Sesungguhnya pelaksanaan UU Guru dan Dosen tidak hanya tergantung pada peraturannya saja tetapi harus ada kemauan politik dari pemerintah yang berkuasa untuk memenuhi amanat UUD 1945 itu.

Secara umum kita akan menyatakan bahwa guru adalah seseorang yang berdiri di depan kelas yang memberikan pengajaran pada setiap jam sekolah atau selama proses belajar mengajar berlangsung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan guru sebagai kualifikasi dari tenaga kependidikan. Bab I, Pasal 1, ayat 5, menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan ketentuan tentang pendidik dinyatakan dalam ayat 6, yang menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Selanjutnya, pasal 39 menguraikan tugas dari tenaga kependidikan dan pendidik. Ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pendidik atau tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru adalah orang yang bekerja dengan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Ini merupakan beban berat bagi para guru. Dari para guru inilah diharapkan akan lahir manusia pembangunan yang handal dan kelak menjadi para pemimpin yang dapat mengangkat harkat bangsa ini dari keterpurukan yang sedang dialami sekarang. Walaupun demikian tidak seharusnya seluruh masalah pendidikan dibebankan pada pundak guru.

Dalam masyarakat Indonesia, pekerjaan seorang guru masih dipandang sebagai pekerjaan yang mulia dan terhormat. Pada jaman kebudayaan Hindu, orang yang paling dihormati adalah para pembimbing atau pemimpin agama. Demikian tinggi dan dihormatinya kedudukan guru ini sehingga para siswa rela menyerahkan segala miliknya agar dapat pengajaran dari sang guru. Guru berarti orang yang sangat dihormati. Walaupun bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap guru saat ini tidak lagi dengan bentuk penyerahan segala yang dimilikinya, kebudayaan menghormati guru masih tetap terpelihara dalam masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Kedudukan sosial para guru

masih pada tempat yang tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Walaupun status sosial menempatkan guru pada tempat yang terhormat dalam masyarakat, pekerjaan menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Imbalan gaji yang tidak memadai, membuat orang cenderung memilih pekerjaan yang lebih menguntungkan seperti di sektor ekonomi dan perbankan. Akibat, jadilah pekerjaan guru ini seperti pekerjaan pelarian, pekerjaan apa adanya, atau daripada tidak bekerja. Tentunya dapat dibayangkan mutu dari guru yang diperoleh dari keadaan ini. Asupan pada perguruan tinggi kependidikan bukanlah dari lulusan SMA yang terbaik, tetapi dari lulusan SMA yang gagal dalam pilihan pertama di perguruan tinggi terbaik. Jadilah fakultas-fakultas pendidikan sebagai pilihan alternatif, setelah gagal di pilihan pertama, bahkan setelah gagal di pilihan kedua. (<http://www.kompas.co.id>)

Kualitas guru atau tenaga pendidik yang ada saat ini memang memprihatinkan dan menjadi bahan pembicaraan dari masa ke masa. Bahkan kualitas guru dituding sebagai penyebab banyaknya siswa peserta UN yang tidak lulus. Orang tua murid melakukan demonstrasi terhadap guru yang dianggap sebagai biang keladi ketidakkulusan anaknya. (Achmad Fedyani Saifudin, 2006). UN dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur hasil pembelajaran secara nasional.

Kualitas guru sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Guru adalah pemeran utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran guru tidak hanya sebagai seorang pengajar mata pelajaran di depan kelas tetapi juga sebagai seorang pendidik. Tanggung jawab yang dituntut dari seorang guru menyangkut besar, tidak sebanding dengan perlakuan yang diberikan pemerintah atau masyarakat terhadap kehidupannya. Guru diharapkan dapat menguasai ilmu pengetahuan, khususnya yang telah disusun dalam kurikulum. Guru dengan keahliannya dapat menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut kepada peserta didik dengan baik.

E. Guru dan Penelitian Tindakan Kelas

Untuk memperoleh pemahaman tentang hakikat penelitian tindakan, sebelumnya akan disajikan beberapa

pengertian dari penelitian tindakan. Kemmis dalam Djaali (2005: 99), mengartikan penelitian tindakan sebagai upaya mengujicobakan ide-ide ke dalam praktek untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. Semetara Elliot mengartikan penelitian tindakan sebagai kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang ada di dalamnya.(Djaali,2005:99)

Bedasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan adalah penelitian yang menekankan pada tindakan ujicoba ide-ide ke dalam praktek dalam rangka mencapai kualitas suatu kegiatan.

Penelitian tindakan mulai berkembang pada tahun 1940-an sebagai gerakan penelitian ilmiah. Sejak itu perbaikan-perbaikan telah dilakukan sehingga alasan dan tujuan melakukan penelitian tindakan makin jelas. Perkembangan penelitian tindakan diawali oleh karya Kurt Lewin. Setelah serangkaian kegiatan pengalaman praktiknya pada awal tahun 1940, ia menyimpulkan bahwa penelitian tindakan merupakan suatu proses yang memberikan kepercayaan pada pengembangan kekuatan berpikir reflektif, diskusi, penentuan keputusan dan tindakan oleh orang-orang biasa, berpartisipasi dalam penelitian kolektif dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam kegiatannya. Pendek kata, penelitian tindakan sekarang lebih diterima orang-orang yang bergerak di bidang ilmu terapan bidang sosial dan humaniora, karena jenis penelitian ini menekankan aspek praktis bersama perbaikannya secara berkelanjutan.

Pengembangan lebih lanjut dilakukan di Amerika Serikat dalam penerapan konsep pendidikan yang dikembangkan oleh John Dewey. Di Inggris dikembangkan dalam rangka reformasi kurikulum dan peningkatan profesionalisme dalam pengajaran, dan di Australia dikembangkan dalam gerakan perluasan perencanaan kurikulum yang bersifat kolaboratif.

Swarsi Madya (2007:11), menjelaskan bahwa, secara umum penelitian tindakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Situasional, kontekstual, berskala kecil, praktis, terlokalisasi dan secara langsung gayut (relevan) dengan situasi nyata dalam dunia kerja. Ia berkenaan dengan diagnosis suatu masalah dalam konteks tertentu dan usaha untuk memecahkan masalah dalam kontek tersebut. Subyeknya bisa siswa di kelas, petatar di kelas penataran, staf dan lainnya.
2. Memberikan kerangka kerja yang teratur kepada pemecahan masalah praktis. Penelitian tindakan juga bersifat empiris dalam hal bahwa ia mengandalkan observasi nyata dan data perilaku, dan tidak lagi termasuk kajian panitia yang subyektif atau pendapat orang berdasarkan pengalaman masa lalu.
3. Fleksibel dan adaptif, dan oleh karenanya memungkinkan adanya perubahan selama masa percobaan dan pengabaian pengontrolan karena lebih menekankan sifat tanggap dan pengujicobaan dan pembaharuan di tempat kejadian/pelaksanaan
4. Partisipatori karena peneliti dan atau anggota tim peneliti sendiri ambil bagian secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan penelitiannya.
5. *Self-evaluative*, yaitu modifikasi secara kontinyu yang dievaluasi dalam situasi yang ada, yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan praktik dengan cara tertentu.
6. Perubahan dalam praktik didasari pengumpulan informasi atau data yang memberikan dorongan untuk terjadinya perubahan.
7. Secara ilmiah kurang ketat karena kesahihan internal dan eksternalnya lemah meskipun diupayakan untuk dilakukan secara sistematis.

Nana Syaodih Sukmadinata (2007:145), secara garis besar memiliki kesamaan dengan langkah-langkah penelitian

lainnya, tetapi ada beberapa variasi langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan dari beberapa ahli.

1. Kurt Lewin (1952) menggambarkan penelitian tindakan sebagai suatu proses siklikal spiral, yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan.
2. Stephen Kemmis (1990) mengembangkan bagan spiral penelitian tindakan dan juga memasukkan modelnya Lewin. Model Kemmis meliputi : pengamatan, perencanaan, tindakan pertama, monitoring, refleksi, berpikir ulang dan evaluasi.
3. Richard Sagor (1992) menggambarkan dalam lima langkah berurutan, yaitu perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil dan perencanaan tindakan.
4. Emily Calhoun (1994) menggambarkan lingkaran penelitian tindakan dalam langkah : pemilihan daerah atau masalah yang menarik tim, pengumpulan data, penyusunan data, analisis dan interpretasi data dan pelaksanaan tindakan.
5. Gordon Wells (1994) menyebutkan langkah-langkah penelitian tindakan tersebut sebagai model ideal dari penelitian tindakan yang mencakup langkah : pengamatan, interpretasi, perubahan, rencana, tindakan dan teori personal praktisi yang menjelaskan dan dijelaskan dari lingkaran penelitian tindakan.
6. Ernest Stinger (1996) menggambarkan sebagai spiral interaktif penelitian tindakan, yang meliputi : mengamati, berpikir, dan bertindak sebagai lingkaran kegiatan yang berkelanjutan.
7. Deborah South (2000) menyebutkan langkah-langkah penelitiannya sebagai penelitian tindakan dialektika (*dialectic action research*) yang terdiri atas empat langkah : identifikasi suatu daerah fokus masalah, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, perencanaan tindakan.

Kegiatan penelitian tindakan diawali dengan pemilihan fokus masalah atau kegiatan yang akan dikerjakan. Bidang

fokus sudah tentu harus sesuai bidang profesi pelaksana penelitian, umpamanya bidang manajemen sekolah, kurikulum, pendidikan, bimbingan konseling dan sebagainya. Bidang-bidang tersebut masih cukup luas, bidang manajemen sekolah mencakup sub bidang atau aspek manajemen : kurikulum, pendidikan, guru, staf administrasi, biaya, sarana-prasarana, kerjasama, layanan masyarakat.

Bidang kurikulum, bisa mencakup penyusunan : silabus, rencana pelaksanaan pendidikan, rancangan evaluasi, media, pelaksanaan pendidikan, pengelolaan kelas, kegiatan ekstra kurikuler, evaluasi dan lainnya. Bidang pengajaran bisa berkenaan dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan pendidikan berbagai mata pelajaran menggunakan berbagai pendekatan, model dan metode pendidikan.

Salah satu contoh penelitian tindakan yang sering dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai 'aksi' atau tindakan yang dilakukan oleh guru/pelaku, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar-mengajar untuk memperbaiki kondisi pendidikan yang dilakukan. (Dirjen Didasmen Diknas (2004:9)

Penelitian tindakan kelas semakin menjadi trend untuk dilakukan oleh para profesional sebagai upaya pemecahan masalah dan peningkatan mutu di bidangnya. Penelitian tindakan kelas dilakukan dengan diawali oleh suatu kajian terhadap problema tersebut secara sistematis. Hasil kajian ini kemudian dijadikan dasar untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam proses pelaksanaan dari rencana yang telah disusun, dilakukan suatu observasi dan evaluasi yang hasilnya dipakai sebagai masukan untuk melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada suatu tahapan pelaksanaan. Hasil dari proses refleksi ini kemudian dilandasi upaya perbaikan dan penyempurnaan rencana tindakan berikutnya.

BAB VII

GURU : PENGHARGAAN YANG BELUM MEMADAI

A. Pendahuluan

Guruku sayang guruku malang. Itulah ungkapan yang patut diberikan kepada nasib guru di Indonesia. Guru dipuja-puji dengan sanjungan tetapi diberi penghargaan yang tidak setimpal dengan apa yang harus dilakukannya. Pendidikan gagal guru dituding penyebabnya. Prestasi pendidikan di tingkat dunia jelek guru dijadikan kambing hitam. Siswa nakal guru dituding tidak bisa jadi model. Selalu guru dan guru. Guru menjadi tumpuan harapan dan sekaligus menjadi tumpuan kemarahan atas nama pendidikan di negara ini.

Bagi suatu bangsa pendidikan sangatlah penting. Baris ke-sebelas lagu Indonesia Raya berbunyi "Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya". Hal itu, menunjukkan bahwa pembangunan jiwa lebih penting daripada sekedar pembangunan raga. Dalam rangka mencapai pendidikan yang berkualitas tersebut peran guru sangatlah penting. Kualitas guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan sangatlah berkaitan dengan kualitas pendidikan. Dengan peran yang sangat strategis tersebut perlu kajian seberapa besarkah kita menghargai guru sehingga setimpal dengan peran-peran yang dibebankan kepada mereka. Sudah pantaskah penghargaan bangsa Indonesia kepada sosok yang bernama guru tersebut sehingga merasa berhak menuding guru sebagai kambing hitam dari permasalahan pendidikan di negara ini. Dalam pembahasan ini akan dibahas (1) apa saja peran yang dibebankan kepada guru, (2) bagaimana penghargaan (sosial,

kultural, materi, dan keamanan) yang sudah diberikan kepada guru sehingga menjamin kesejahteraan jiwa dan raganya, (3) apa dampak jangka panjang jika kita tidak mampu menghargai guru dengan layak?, (4) belajar dari negara tetangga dalam menghargai gurunya, dan (5) jurus-jurus yang harus dilakukan untuk meningkatkan penghargaan terhadap guru.

B. Guru sebagai Model Sepanjang Masa

Kalau dideret berapa puluh jumlah tuntutan kita kepada seorang guru. Nyaris di bawah sedikit tuntutan seorang malaikat. Tuntutan-tuntutan itu antara lain dipaparkan berikut.

Guru harus bisa *digugu lan ditiru* bukan *wagu tur saru* (guru harus bisa dipercaya dan dapat ditiru jangan berbuat yang tidak pantas atau tidak senonoh). Ungkapan pertama adalah idealisasi guru. Melalui citraan ini masyarakat ingin bahwa guru hadir sebagai sosok panutan (model). Seorang guru harus selalu memikirkan perilakunya karena akan menjadi model siswa-siswanya dan masyarakatnya. Kita punya citraan model dan antimodel. Keduanya merupakan ukuran kultural untuk mengarahkan guru kita, untuk menyaring guru-guru kita. Kalau tidak sanggup menjadi contoh jangan menjadi guru. Pada zaman dulu, orang yang tidak punya unggah ungguh tidak diterima masyarakat sebagai guru. Demikian juga jika bahasa Jawanya tidak memenuhi standar Jawa tidak diterima secara sosial. Peran guru harus bisa menjadi model dungkapkan dengan sebuah DOKTRIN PEDAGOGIK yang terkenal yaitu:

1. Kita tidak dapat mengajarkan yang kita ketahui
2. Kita tidak dapat mengajarkan apa yang kita kehendaki
3. Kita hanya dapat mengajarkan apa yang memang ada dalam diri kita

Jadi menurut doktrin ini, guru yang malas belajar tidak dapat menghasilkan siswa yang cinta belajar, guru yang hanya membeo sulit menghasilkan siswa yang kreatif dan berani berpikir sendiri.

Hasil survey, anak yang diinginkan orangtua adalah bertingkah laku baik yaitu (1) bertanggung jawab (setia, patuh, taat), (2) memiliki pribadi jujur, rajin, teliti, ulet, dan hemat, dan (3) tindakan untuk memenuhi tanggung jawab dilaksanakan dengan rasa percaya diri dan empati dengan sesama manusia. Secara akademik orangtua ingin hasil UN yang tinggi, kemampuan berbahasa Inggris yang baik, masuk SPMB, dan seterusnya. Guru yang dapat menghargai prakarsa murid, guru yang bisa mendampingi proses belajar, membesarkan hatinya bila siswa nampak hampir putus asa bukan menghardik dan mengejeknya. Merundukkan hati siswa jika nampak siswa akan sombong dengan kehebatannya.

Peran guru secara profesional terjabar dalam peran-peran guru di dalam kelas yang meliputi sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih, administrator di kelas, peran guru sebagai pengelola kelas, peran guru secara psikologis, dan peran guru secara pribadi. Sejumlah peran yang harus dilakukan guru di dalam kelas dirinci sebagai berikut.

Peran guru sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih menuntut guru untuk berperan (a) perancang dan pelaksana proses pembelajaran untuk mencapai Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, (b) mendampingi dan melatih siswa mencapai hasil maksimal baik kompetensi yang berupa kognitif, afektif, dan keterampilan, (c) perancang dan pelaksana proses pembelajaran untuk mendidik siswa sehingga mencapai karakter yang diharapkan, dan (d) mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan.

Peran guru sebagai administrator mencakup (a) pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan, (b) wakil masyarakat yang berarti guru harus mencerminkan suasana dan wakil masyarakat, (c) orang yang ahli dalam pelajaran, yakni bertanggung jawab mewariskan kebudayaan keadaan generasi muda yang berupa pengetahuan, (d) penegak disiplin, (e) pelaksana administrasi pendidikan, (f) pemimpin generasi muda, dan (e) penerjemah

kepada masyarakat, artinya guru berperan menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat

Peran guru secara pribadi mencakup (a) petugas sosial yaitu orang yang harus membantu kepentingan masyarakat (tugas-tugas kemasyarakatan), (b) pelajar dan ilmuwan yang harus senantiasa belajar dan mengikuti perkembangan ilmu, (c) orangtua yang mewakili orangtua murid di sekolah dalam pendidikan anaknya, (d) menjadi teladan bagi siswa dan lingkungan sekitarnya, dan (e) pemberi rasa aman bagi siswa-siswanya.

Peran guru secara psikologis mencakup (a) ahli psikologi pendidikan yang melaksanakan tugasnya atas dasar psikologi, (b) seniman yang mampu membuat hubungan antarmanusia untuk tujuan tertentu dengan cara tertentu, (c) orang yang memberikan/ katalisator perubahan (inovator), dan (d) petugas kesehatan mental yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental siswa.

Peran guru sebagai pengelola kelas mencakup (a) mampu menciptakan lingkungan kondusif agar siswa bisa belajar, (b) menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk berbagai kegiatan belajar, (c) memimpin, mengarahkan, mendampingi, dan memfasilitasi agar terjadi proses belajar dan kemandirian siswa

Dalam perspektif sosial, guru dituntut melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Pendidikan yang dilakukan guru harus menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat, yang mengarah pada pembentukan formasi sosial baru. Formasi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial (*social cohesion*). Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat: keluarga,

komunitas, perkumpulan masyarakat, dan organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi sosial.

Perspektif budaya, *pendidikan juga merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasi nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat.* Untuk itu guru dituntut mampu menanamkan *mengajarkan norma, mensosialisasi nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat.* Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan peran pendidikan menjadi lebih penting lagi ketika arus globalisasi demikian kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif (*collective conscience*) sebagai warga bangsa dan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional. Guru dituntut mampu tujuan pendidikan dalam perspektif budaya tersebut.

Perspektif ekonomi, pendidik dituntut bisa menghasilkan manusia-manusia yang andal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, guru harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis yang memadai. Pendidikan yang dilakukan guru juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun

kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antarbangsa di era global. Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan *knowledge-based economy* (KBE), yang mensyaratkan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Di dalam konteks ini, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan (*research and development*), yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Ketersediaan SDM bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global.

Perspektif politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah merujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha besar untuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama *civil society*, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis.

Tuntutan utama yang harus dimiliki guru adalah profesional. Profesional mengandung arti bahwa seseorang mempunyai kemampuan untuk (1) melakukan kegiatan dalam suatu bidang pekerjaan menurut cara-cara kerja yang telah

dibakukan, (2) menilai kesepadanan cara-cara kerja yang telah dibakukan berdasarkan ilmu tertentu dan menyempurnakannya bila mungkin, dan (3) mengembangkan cara-cara bekerja yang baru. Profesi adalah pekerjaan yang bersifat profesional yang memerlukan beberapa ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian harus diaplikasikan dalam bidang tertentu lahan garapan suatu profesi. Dengan kata lain pekerjaan yang profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu. Seorang yang profesional menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya.

Masih terkait dengan profesional seseorang dituntut memiliki produktivitas yang tinggi serta karya/ hasil yang semakin bermutu tinggi. Ciri manusia produktif adalah (1) percaya kepada dirinya sendiri (ikhlas menerima dirinya dan selalu bertanya apa yang dapat diperbuat dengan kemampuannya), (2) mencintai lingkungannya (menerima lingkungannya, sadar kelemahan dan kelebihan lingkungannya serta berbuat untuk lingkungannya), (3) memahami persoalan dan kebutuhan zamannya (tergantung kedekatan batin dengan lingkungannya), dan (4) mengenal dan menguasai metode kerja dan ilmu dalam bidang garapannya

Selain peran-peran tersebut, guru sebagai profesi dituntut memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi yang dituntut undang -undang

- Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
- Guru dituntut memiliki sejumlah kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi pedagogik mencakup (1) pemahaman karakteristik peserta didik, (2) pemahaman teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, (3) pengembangan kurikulum, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) pengembangan dan aktualisasi potensi peserta didik, (8) perancangan dan pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar, (9) pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran, dan (10) kemampuan dan kesediaan melakukan tindakan reflektif untuk perbaikan.

Kompetensi kepribadian mencakup (1) beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, (2) arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, dan sportif, (3) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (4) mampu dan bersedia mengevaluasi kinerja sendiri, (5) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan, (6) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, dan rasa percaya diri

Kompetensi sosial mencakup (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat secara santun, (2) bersikap inklusif dan bertindak obyektif, (3) menggunakan TIK secara fungsional, (4) bergaul secara efektif dgn peserta didik dan komunitas pendidikan, (5) bergaul secara santun dengan masyarakat, dan (6) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan kebersamaan.

Kompetensi profesi mencakup (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan sesuai bidang yang diampu, (2) menguasai metode dan teknologi pembelajaran bidang ilmu yang diampu, (3) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan (4) memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

C. Seberapa Besar Guru Dihargai

Setelah kita menemukan daftar panjang tuntutan peran yang harus dilakukan guru, sekarang kita lihat seberapa penghargaan kita kepada guru. Berbicara mengenai kesejahteraan guru, sebenarnya tidak semata-mata persoalan gaji, tapi juga menyangkut kelancaran dalam kenaikan pangkat, rasa aman dalam menjalankan tugas, kondisi kerja, kepastian karier dan hubungan antar pribadi. Selama ini, aspek-aspek dari kesejahteraan guru tersebut umumnya masih sangat jauh dari keadaan ideal. Di bawah ini dipaparkan bagaimana penghargaan pemerintah terhadap guru.

Ada lima faktor yang mempengaruhi perilaku guru yaitu (1) jenis kewenangan (*authority*) yang benar-benar diserahkan kepada guru, (2) kualitas atasan yang memonitor dan mengontrol perilaku guru, (3) kebebasan yang diberikan kepada guru baik di luar kelas maupun di dalam kelas, (4) hubungan guru dengan murid-muridnya, dan (5) pengetahuan guru tentang dirinya. Guru harus memakai buku tertentu atas saran kepala sekolah. Guru harus membocorkan lembar jawaban kepada siswa tertentu atas tekanan Sang Kepala Sekolah. Belum lagi guru harus membeli seragam ini dan membeli majalah tertentu. Bahkan guru dipaksa membuat soal objektif untuk kompetensi dasar yang seharusnya tidak bisa diukur dengan alat penilaian tes objektif hanya karena untuk memuaskan pejabat karena harus diadakan ulangan bersama. Belum lagi tekanan harus mengedril siswa-siswanya agar lulus UN padahal dia tahu sebenarnya secara pedagogik cara belajar tersebut tidak dibenarkan. Guru yang ingin merancang tugas belajar di luar kelas harus membatalkannya karena campur tangan kepala sekolah yang menurutnya kegiatan-kegiatan itu tidak perlu karena menghabiskan dana dan waktu. Bahkan ada guru yang terpaksa mengubah cara belajar mengajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan karena dianggap kepala sekolah atau pengawas menimbulkan keributan dan murid menjadi tidak disiplin. Di pihak orang tua

kadang mengintervensi pembelajaran guru yang demokratis dan kontekstual karena masyarakat menganggap belajar seperti itu hanya main-main. Keluhan beberapa guru yang merasa tertekan karena dianggap gila menerapkan metode-metode inovatif di sekolah.

Penghargaan secara sosial terhadap guru berkembang dari waktu ke waktu. Pada waktu lalu secara sosial penghargaan masyarakat sangat tinggi. Tetap lambat laun penghargaan merosot seiring dengan merosotnya citra profesi guru.

Pada masa lalu penghargaan yang tinggi kepada guru dimunculkan pada ungkapan Jawa " Guru, Ratu, wong tuwo akaro". Maksudnya, Taatilah pertama-tama guru, lalu rajamu, dan yang ketiga orang tuamu.

Dulu secara formal status guru di masyarakat dan budaya Indonesia menempati tempat terhormat. Dulu dalam masyarakat Indonesia khususnya Jawa, tingginya status guru dapat digali dari warisan Kebudayaan Hindu. Di dalam bahasa Sansekerta guru berarti yang dihormati (*fenerable*). Seorang guru adalah pada hakikatnya seorang pembimbing spiritual bagi seseorang atau kelompok yang dirinya sendiri sudah mencapai penguasaan spiritual yang tinggi

Seorang guru adalah berasal dari Kasta Brahmin yang mempunyai hak-hak khusus di dalam masyarakat dan mereka diberi gelar kaum Mahardika atau begawan. Para begawan itu memiliki hak-hak istimewa yang disetarakan dengan hak-hak para raja. Hak begawan bebas pajak, mendapat bagian daerah kekuasaan, dan nasihat-nasihatnya menjadi acuan raja memerintah sebuah negara. Mereka tergolong orang yang kaya pada waktu itu. Dalam menyampaikan pengetahuannya, siswa-siswa tinggal di rumah begawan dan mengabdikan dengan penuh kesetiaan dan pengabdian.

Di dalam perkembangan selanjutnya dengan lahirnya gerakan bakti, status guru menjadi sangat penting oleh karena mereka dianggap penjelmaan para dewa sehingga perlu

dipuja. Status sosial ini dibenarkan karena Begawan tidak usah menyembah kepada raja. Guru dianggap sebagai penjelmaan hidup spiritual kebenaran. Dengan demikian, para siswa menyerahkan bulat-bulat akal budi, tubuh, dan hak milik kepada gurunya. Dengan mantera-mantera yang diajarkan oleh Begawan sebagai formula-formula suci, maka para siswa dapat mencapai pencerahan jiwa dan menemukan serta mengembangkan potensi yang tersimpan di dalam dirinya.

Citra guru pada masa kebudayaan Hindu terus hidup dan berkembang juga pada masa perkembangan Islam. Kedudukan Begawan diganti oleh para Kyai sebagai pemilik pesantren. Kedudukan Kyai juga sangat tinggi. Pada zaman modern kedudukan guru dituntut sebagai pekerjaan profesional. Profesi guru dituntut bersaing dengan profesi-profesi lainnya. Semua itu mempengaruhi penghargaan masyarakat terhadap profesi guru.

Status sosial yang tinggi pada masa lalu telah berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Citra suatu profesi di mata masyarakat sedikit banyak ditentukan oleh status sosial ekonomi profesi tersebut dalam masyarakat. Rendahnya status sosial ekonomi profesi guru ikut menjadi faktor penyebab merosotnya citra profesi guru di Indonesia. Berbeda dengan zaman dahulu, sekarang ini dibandingkan dengan profesi dan bidang kerja lain, gaji guru relatif kecil. Karena status sosial ekonominya yang rendah, para guru sendiri cenderung menjadi warga masyarakat yang minder, dan akibatnya kewibawaannya sebagai pendidik di mata siswa dan masyarakat juga merosot. Hal ini berbeda dengan profesi lain seperti dokter dan notaris misalnya.

Sekarang jika punya anak gadis yang nakal diancam akan dikawinkan dengan guru biar kapok karena akan hidup miskin. Media massa juga mencitrakan guru sebagai sosok yang culun, miskin, dan berlaku tidak bijak. Di mata siswa SMA pilihan jadi guru adalah pilihan terpaksa setelah tidak diterima di lembaga mana pun. Survey mahasiswa non reguler

pendidikan matematika 98% mahasiswa terjebak memilih jurusan tersebut karena sudah tidak diterima di lembaga mana pun. Demikian buruknya citra guru, sehingga sekolah guru tidak diminati putra terbaik negeri ini. Cita-cita menjadi guru adalah cita-cita yang langka. Bahkan seorang siswa SMA begitu malunya dengan status sebagai mahasiswa sebuah LPTK sehingga menghindar dari teman-teman SMA-nya. Begitu LPTK sebuah simbol mahasiswa yang kurang berbobot. Walaupun kenyataannya mungkin benar. Dari hasil analisis SPMB mahasiswa yang diterima sebagai calon guru sangat kurang memadai sebagai guru. Di lembaga swasta pun ditengarai demikian. Demikian diungkapkan beberapa rektor LPTK di Indonesia.

Dalam lingkungan masyarakat yang matre, sosok guru sering menjadi bahan tertawaan. Penghargaan sosial terhadap guru makin merosot. Media massa juga memberi citra yang negatif terhadap guru. Padahal menurut psikolog apa yang ditayangkan televisi secara terus-menerus akan membuat orang mengikutinya. Pengaruh televisi yang sifatnya audio visual memang lebih besar ketimbang audio pendengaran atau bacaan. Menurut Dadang (2006) jika sesuatu disampaikan berulang-ulang secara konsisten, dengan pesan yang kurang lebih sama, bisa diprediksi akan terjadi perubahan budaya sesuai yang disampaikan. Dia juga menekankan bahwa perilaku yang ditiru remaja dan anak-anak tidak sekadar bersifat fisik dan verbal. Tapi lebih dari itu, mereka memang sudah dimasuki nilai-nilai yang dianut atau diperankan oleh tokoh-tokoh dalam film/sinetron yang ditontonnya itu.

Rasa aman guru dalam menjalankan tugas masih belum terjamin sepenuhnya karena berbagai perlakuan yang tidak fair terhadap guru yang kemudian mengganggu konsentrasinya dalam menjalankan tugas. Bahkan, berbagai perlakuan tidak adil sering dialami para guru, utamanya guru SD/MI yang populasinya merupakan yang paling besar. Perlindungan guru dari kekerasan fisik maupun psikis juga belum jelas. Banyak

kasus guru diteror orangtua karena memberi nilai apa adanya atau tidak menaikkan siswanya. Bahkan ada beberapa guru yang memberikan hasil kelulusan siswanya dari rumah-ke rumah dalam amplop dan dilem kuat-kuat serta distaples banyak agar tidak mudah cepat dibuka. Semua ini dilakukan agar guru tidak menjadi sasaran kemarahan siswa yang tidak lulus maupun orangtuanya.

Kondisi kerja di lingkungan sekolah kadang buruk, sempit, dan sumpek, yang mengakibatkan guru merasa tidak nyaman dan tidak betah berada di sekolah. Sudah teramat banyak berita, baik dari media massa yang menginformasikan kondisi sekolah yang atapnya bocor, perabot dan gedungnya rusak berat, dan sebagainya. Keselamatan jiwa guru kadang terancam kondisi fisik gedung sekolah.

Rasa nyaman guru kadang juga terganggu karena kepastian karier tidak jelas. Guru banyak terhambat oleh hal-hal yang di luar kemampuan profesionalnya. Kelancaran dalam kenaikan pangkat kurang lancar. Orang-orang birokrasi yang tidak memahami makna pendidikan, menjadi birokrat yang bahkan mempersulit guru dalam mengembangkan kreativitas dan kariernya. Pengembangan karier dan kreativitas kadang terhambat hal-hal diluar kemampuannya. Seperti perbedaan agama, golongan, suku dan ras, bahkan perbedaan partai politik, atau hal-hal lain yang sebenarnya tidak prinsip tetapi dibuat besar dan akhirnya membuat guru bermasalah.

Hubungan antarpribadi di tempat kerja guru (sekolah) lebih menyerupai hubungan hierarkis seperti lazimnya dalam lingkungan birokrasi, bukan hubungan kolegial yang didasarkan atas profesionalisme. Karena birokratis, guru segan mendiskusikan masalah atau kesulitan yang dihadapinya.

Dari sekian banyak aspek kesejahteraan guru tersebut, gaji yang rendah merupakan persoalan yang mendominasi pembicaraan tentang guru. Kesejahteraan guru merupakan agenda mendesak ditangani untuk meningkatkan motivasi kerja guru dan meningkatkan status sosial guru di mata

masyarakat. Keluhan tentang rendahnya gaji guru sudah dikemukakan berulang kali pada setiap pembicaraan tentang pendidikan, tetapi belum mendapatkan tanggapan serius untuk perbaikan. Dari hasil kajian di beberapa negara, rendahnya gaji guru merupakan penyebab utama tingginya angka bolos kerja karena mencari penghasilan tambahan atau tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan minimal. Bercermin dari pengalaman negara-negara maju, pemicu utama mutu pendidikan adalah kesejahteraan guru.

Gaji guru sangat rendah, bahkan lebih rendah dari pekerjaan lain dengan tingkat pendidikan yang sama atau bahkan dengan pendidikan yang lebih rendah. Selama ini guru hanya dipuji, tetapi tidak diperhatikan nasib dan kesejahteraannya. Banyak sekali guru yang harus memikirkan kesejahteraannya dengan nyambi sebagai tukang ojek atau profesi lainnya. Hal ini karena kurangnya penghargaan dan pemberian tunjangan dari pemerintah kepada profesi guru.

Di berbagai negara maju, kondisi gaji guru antara 111%-235% lebih tinggi dari gaji pegawai administrasi dan sektor industri. Misalnya, dibandingkan dengan gaji pegawai administrasi, gaji guru di Belanda 111% lebih tinggi, Australia 116%, Amerika Serikat 128%, Prancis 157%, Selandia Baru 185%,. Dibandingkan dengan sektor industri, di Australia gaji guru 115% lebih tinggi, Skotlandia 129%, AS 125%, Selandia Baru 125%, Belanda 126%, Jerman 213%, Finlandia 234%, dan Swedia 235%, dan sebagainya.

Di antara tujuh negara berkembang yang termasuk kelompok berpendapatan rendah, hanya di dua negara, gaji guru lebih rendah dibandingkan dengan gaji pegawai di sektor industri manufaktur. Urutannya, Burundi 103%, Ghana 109%, India 135%, Kenya 86%, Malawi 128%, Tanzania 136%, dan Zambia 0,93%. Pada negara berpendapatan menengah, Chili 74%, Kosta Rika 187%, Guatemala 268%, Honduras 81%, Mauritius 143%, Peru 181%, Thailand 125%, Zimbabwe 104%. Singapura memberikan prioritas tinggi utama di alam upaya

peningkatan sumber daya manusia memberikan imbalan gaji yang tinggi dan penghargaan yang menarik kepada guru. Dengan jalan seperti itu profesi guru mendapat minat yang besar dari putra-putri terbaiknya.

Pada kelompok negara-negara maju (namun belum setara Eropa Barat atau Amerika Utara), Portugal berada di peringkat pertama yaitu gaji guru 195% lebih tinggi dari pekerja di sektor industri manufaktur, disusul oleh Yunani 153%. Pada kelompok negara ini pula justru terdapat dua negara yang gaji gurunya hanya memperoleh separuh atau dua pertiga dari upah pekerja sektor industri manufaktur, yaitu Meksiko 77% dan Venezuela 0,53%. (Supriadi, 1998).

Berdasarkan data statistik PNS, jumlah PNS di Indonesia terdapat sekira 4 juta orang, dari 4 juta tersebut lebih kurang 2 juta atau separuhnya adalah guru (termasuk dosen), dengan komposisi sebagian besar guru SD (60%), guru SLTP dan SLTA (37%), dan lebih kurang 3% dosen. Dalam hal ini guru merupakan komposisi terbesar dari PNS. Dilihat dari golongan maka guru 80% berada pada golongan III dan IV, sebagian kecil lainnya berada pada golongan II, yang kebanyakan adalah guru SD yang memiliki masa kerja 5-10 tahun.

Guru SLTP dan SLTA hampir dipastikan tidak ada yang berada pada golongan II karena pengangkatan mereka sebagai PNS umumnya harus berijazah S-1 (sarjana) yang dalam struktur kepangkatan PNS masuk pada golongan III. Jadi, untuk PNS guru, baik guru SD, SLTP, SLTA dan dosen merupakan komposisi terbesar PNS yang berada pada golongan III dan IV. Bila dilihat PNS yang termasuk kelompok jabatan fungsional (*jafung*) lainnya, berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional, terdapat 25 jabatan yang termasuk rumpun *jafung*, dari sebanyak rumpun kelompok *jafung* tersebut guru dan tenaga medis secara kuantitas paling banyak.

Berapa gaji guru? Untuk guru, bila ditambah tunjangan fungsional, guru PNS sebagai pegawai yang masuk rumpun jabatan fungsional akan tampak memiliki angka THP yang lebih tinggi dibandingkan rekannya dalam golongan yang sama, mereka hanya menerima gaji pokok sebagai PNS. Berdasarkan Keppres No. 3 Tahun 2003, tentang tunjangan tenaga kependidikan (tunjangan fungsional), guru PNS golongan II memperoleh tunjangan fungsional 168.750, golongan III 206.250, dan golongan IV 262.500. Contoh, guru golongan maksimal IV-e masa kerja 32 tahun atau lebih dengan gaji pokok 1.800.000 akan memperoleh kenaikan 270.000 (15%) ditambah tunjangan fungsional sebesar 262.500, jadi ia memperoleh gaji 2.096.500 (gaji tertinggi guru di Indonesia).

Sudah memadakah gaji guru? Jawaban terhadap pertanyaan itu bersifat relatif, tetapi kalau kita mencoba membandingkan dengan mereka yang bekerja di BUMN maka setidaknya gaji ideal (untuk suami, istri dan 1-3 orang anak) mencapai tiga kali lipat dari keadaan sekarang, bahkan gaji guru di Malaysia mencapai sepuluh kali lipat dari gaji guru di Indonesia. Di Norwegia, seorang guru menabung setahun saja bisa berlibur ke luar negeri. Contoh, guru golongan maksimal IV-e masa kerja 32 tahun atau lebih dengan gaji pokok 1.800.000 akan memperoleh kenaikan 270.000 (15%) ditambah tunjangan fungsional sebesar 262.500, jadi ia memperoleh gaji 2.096.500 (gaji tertinggi guru di Indonesia). Dibandingkan dengan gaji golongan III D Departemen Keuangan dengan jabatan kepala seksi mendapat gaji THP sebesar 9,2 juta. Golongan Id di Depkeu akan menerima THP sebesar 2,3 juta.

Apa lagi gaji guru honorer sangat tidak layak. Hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan membuat banyak guru tidak dapat mengembangkan diri sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berjalan maksimal. Upah buruh bangunan atau pembantu rumah tangga lebih baik daripada guru honorer. Guru honorer hanya digaji 50.000 - 100.000 per bulan setara dengan 6- 12 bungkus rokok. Nasib hidup di

bawah upah regional atau pun upah minimum propinsi juga dialami guru honorer di semua daerah. Guru honorer juga tidak tersentuh sertifikasi karena namanya tidak tercantum atau terdaftar di dinas pendidikan. Sebagian mereka bahkan tidak mempunyai kontrak kerja dengan sekolah yang menggunakan jasa mereka. Padahal untuk sertifikasi ditentukan oleh dinas pendidikan sesuai kriteria yang ada dan kuota. Dengan demikian, guru honorer tidak tersentuh sertifikasi meskipun sudah mengajar dalam jangka waktu yang lama. Saat ini guru masih beragam mulai dari guru PNS, guru bantu, guru pegawai tidak tetap /PTT, dan guru honorer murni. Honor guru PTT dibiayai oleh pemerintah daerah dari APBD. Guru bantu adalah guru sekolah swasta yang dibiayai APBN, sedangkan guru honorer murni dibiayai oleh komite sekolah atau yayasan. Belakangan ada tunjangan fungsional untuk semua guru tanpa memandang status, tetapi tidak semua guru honorer mendapatkannya. Kenyataannya guru honorer masih dibutuhkan. Padahal sekolah swasta yang notabene tempat berkumpulnya guru honorer di tingkat SMP jumlahnya mencapai 56 % . Mau dibawa kemana pendidikan ini? Jika guru sebagian besar masih menerima gaji jauh di bawah UMR. Berdasarkan pengalaman penulis survey ke beberapa lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen Agama guru honorer dibayar rata-rata 150 ribu bahkan ada yang hanya 75 ribu. Di pesisir pantai Banyuwangi ada sebuah MTS yang masuk belajarnya pukul 10.00 karena gurunya pagi bekerja dulu dalam beragam pekerjaan. Ada yang jadi pedagang, penjual ikan, atau penjual nasi. Menurut mereka itulah pekerjaannya. Kalau menjadi guru itu ibadahnya. Mereka sama sekali tidak digaji dari pekerjaan gurunya. Gaji tersebut jauh di bawah upah UMR baik kabupaten maupun propinsi. Bahkan jauh di bawah pembantu rumah tangga yang berkisar antara 300 ribu – 1 juta.

Kesejahteraan guru bukan hanya berkaitan dengan gaji saja, tapi juga menyangkut, rasa aman dalam menjalankan

tugas, kondisi kerja, kepastian karier dan hubungan antar pribadi. Selama ini, aspek-aspek dari kesejahteraan guru tersebut umumnya masih sangat jauh dari keadaan ideal. Kasus-kasus berikut cermin kurang memadainya penghargaan kita terhadap guru. Semua menunjukkan rendahnya pemberian rasa aman dan perlindungan terhadap guru.

Pada waktu pelaksanaan UN akan disediakan 50 milyar untuk mengawasi agar guru tidak curang dan membantu muridnya dalam mengerjakan soal. Sungguh mengengaskan. Pendekatan kepada guru seperti pendekatan polisi dengan maling. Guru tidak diberi kepercayaan sehingga jangan disalahkan jika timbul rasa lepas tangan berkaitan dengan mutu pendidikan karena guru merasa tanggung jawab mutu hanya ada di tangan pemerintah melalui UN. Guru bisa saja menjadi menghalalkan segala cara karena nasibnya terancam jika hasil muridnya jelek. Guru yang didekati dengan penuh kecurigaan berbalik melakukan kegiatan yang kontraproduktif. Guru tidak dapat lagi menjadi model dan terpaksa melakukan contoh yang tidak baik di depan murid-muridnya. Kebijakan UN yang mecerminkan ketidakpercayaan terhadap hasil evaluasi guru.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah banyak yang membuat rasa aman guru terusik. Kebijakan UN menyebabkan guru tertekan karena akan mengancam reputasinya sebagai guru jika siswa-siswanya banyak tidak lulus. Kepala Dinas, pengawas, dan kepala sekolah akan menjadikan guru sebagai sasaran utama jika siswa-siswanya banyak yang tidak lulus.

Undang-undang dibuat seakan-akan di Indonesia 62 tahun guru tidak dipercaya mengajar dan tidak ada satu pun guru yang profesional. Bayangkan, guru berumur yang puluhan tahun mengajar harus didiklat lagi. Memangnya waktu diangkat dulu disyaratkan berpendidikan sarjana seperti apa? Lalu, kenapa pengalaman mengajar tidak diperhitungkan, tidak dihargai? Dedikasi tugas yang melahirkan pebijak dan pengambil kebijakan pendidikan,

tidakkah ada harganya dalam konteks 'prestasi' yang pantas dihargai? Seakan-akan di Indonesia tidak ada guru yang profesional sama sekali selama ini. Kebijakan ini banyak menimbulkan rasa frustrasi bagi para guru.

Pejabat birokratis meninjau guru. Guru didatangi, dihardik, disalahi ini-itu. Pejabat-pejabat datang bermobil keren sembari berkacak pinggang menyalahkan guru, mutu pendidikan rendah. Hebatnya guru selalu terima saja, dan selalu mengiyakan tidak berani protes. Kemana larinya intelektualitas dan kemampuan memahami hak-haknya? Guru terlalu 'takut' kepada birokrat pendidikan yang sebenarnya bertugas memfasilitasi guru. Mau-maunya guru 'digurui' oleh mereka yang tidak mengerti pendidikan. Belum lagi para birokrat kecil di dinas pendidikan. Golongan II saja sudah dapat mempermainkan nasib guru dan menindas guru dengan memanfaatkan kekuasaannya.

UU Guru dan Dosen dengan seribu janji indah di dalamnya belum tentu dapat direalisasikan secara menyeluruh. Undang-undang yang telah ditetapkan DPR sampai saat ini diberlakukan setengah hati. Jangan sampai nasib UU Guru dan Dosen ini sama dengan UU Sisdiknas tentang anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBD dan APBN. Kalau ini terjadi kiamatlah dunia guru Indonesia. Guru akan semakin frustrasi. Penantian panjang seribu janji dalam undang-undang menambah loyonya semangat guru. Penghargaan perlindungan dari perlakuan-perlakuan tidak adil kepada guru.

Kemana guru akan mengadu ketika diperlakukan tidak adil oleh birokrat? Perlakuan-perlakuan yang tidak adil kebanyakan ditelan saja oleh para guru. Kemana menjalankan tugasnya juga belum dilindungi secara hukum. Undang-undang perlindungan guru hendaknya dapat menjamin rasa aman dan perlindungan guru dalam menjalankan tugasnya. Orang tua atau masyarakat tidak begitu saja dapat menghalangi/ menghambat tugasnya sebagai guru.

Kasus di Jember guru yang menjaga UN dan bertindak disiplin diserang peserta ujian. Siswa diminta menghapus tidak mau dengan alasan dia membayar. Guru tidak berani melarang muridnya yang melanggar karena muridnya anak seorang pejabat. Kondisi ini berbeda sekali dengan pengamatan penulis terhadap seorang guru besar yang dulu pernah menjadi guru di sebuah SMA pada tahun 60-an. Guru besar tersebut selalu tiap tahun dapat kunjungan dari mantan murid-muridnya dan mendapat tanda mata dari mereka. Penghargaan murid kepada gurunya sangat tinggi, meskipun mantan murid-muridnya sudah menjadi pengusaha kaya raya dan pejabat terkenal.

Guru diperlakukan tidak adil bahkan untuk gaji mereka yang sedikit itu. Contohnya baru-baru ini terjadi gelombang demo menuntut keterlambatan gaji. Gejolak protes guru di beberapa daerah yang tidak terbayar gajinya sampai pemotongan dana guru sebesar 2,5% di NTB (Nusa Tenggara Barat) terkait dengan terusiknya kesejahteraan guru. Bagaimana mungkin, gaji guru yang sudah kecil kemudian dipotong seenaknya oleh Bupati untuk kebutuhan APBD setempat melalui Perda (Peraturan Daerah) (Demo Ribuan Guru selama 3 Hari, *Metro TV, Top 9 News*)

Kesabaran guru di sejumlah daerah lain, rupanya sudah melebihi ambang batasnya. Setidaknya itu terjadi di Madiun (Jawa Timur), Purbalingga (Jawa Tengah), Muna dan Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Lampung. Pekan-pekan lalu, sejumlah guru di daerah-daerah tersebut berunjukrasa, menuntut pembayaran rapelan kenaikan gaji mereka yang terhitung sejak Januari 2001 belum dibayarkan oleh pemerintah. Akibatnya, mereka mogok mengajar sebagai tanda protes. Namun, Surya menilai aksi di Madiun dan Purbalingga itu bukan sebagai aksi mogok mengajar. Sebab, katanya, guru tetap datang ke sekolah. Begitupun dengan para murid, juga datang. Hanya saja, frekuensi mengajar guru dikurangi. "Guru tetap memberi tugas kepada anak didiknya."

Begitupula dengan masalah guru bantu yang berjumlah 197.000 jiwa (Lihat Komisi X DPR : Nasib guru Bantu Berpotensi Menjadi Bom Waktu, *Republika*, 2005). Memang pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah berjanji akan mengangkat guru Bantu atau honorer menjadi PNS dan ini akan dilakukan secara bertahap. Guru bantu memang sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus. Karena mereka telah mengabdikan ilmunya tanpa kenal lelah. Sudah sepatutnya mereka di prioritaskan untuk diangkat menjadi PNS melalui rekrutmen atau pengangkatan lewat prosedur kualitas dan kompetensi yang memenuhi standar profesionalisme seorang guru. Tidak terselesaikannya masalah ini, hanya akan menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari, terutama bagi pemerintah pusat. Mengingat masalah guru bantu membutuhkan dana yang begitu besar.

Selain penghasilan yang belum memadai, persoalan lain adalah masalah perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesinya yang belum optimal, seperti: dipaksa pensiun dini dan perlakuan yang tidak adil terhadap guru. Sementara itu, penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi juga masih minim. Hal ini mempengaruhi produktivitas pendidik dan tenaga kependidikan. Di samping itu, permasalahan yang juga penting dalam kaitannya dengan diberlakukannya otonomi daerah adalah belum efektif dan efisiennya manajemen guru, terutama pada pemerintah daerah. Dengan manajemen yang amburadul guru sering jadi korban. Gaji sudah kecil tidak cair-cair lagi. Tega-teganya kaum birokrat mempermainkan gaji mereka. Seperti baru-baru ini guru bantu demo karena gajinya yang belum cair. Guru demo karena rapelan belum diberikan. Belum lagi kenaikan pangkat yang dihambat-hambat oleh kaum birokrat yang tidak punya hati.

D. Belajar dari Negara Tetangga Bagaimana Menghargai Guru

1. Belajar sama Malaysia

Dulu mereka belajar di Indonesia, tapi apa salahnya sekarang kita belajar dari Malaysia bagaimana menghargai guru. Boleh jadi akan muncul pertanyaan menggelitik: Mengapa Malaysia yang pada era 1970-an masih "berguru" kepada Indonesia dalam hal pendidikan justru kini lebih maju Malaysia yang sudah melampaui Indonesia?

Dua puluh tahun lalu Malaysia menjadi "murid" kita. Banyak pemuda Malaysia dikirim ke Indonesia untuk menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi kita. Di sisi, lain pemerintah Malaysia juga mendatangkan banyak guru, dosen, dan peneliti kita untuk mengembangkan pendidikan nasionalnya. Bagaimana dengan Indonesia? Kesungguhan pemerintah untuk mengelola pendidikan tidak optimal. Anggaran pendidikan yang sangat kecil dari tahun ke tahun adalah bukti nyata kurang seriusnya pemerintah dalam menangani masalah pendidikan.

Tidak seperti di Indonesia, di Malaysia jarang sekali terdengar aksi protes guru-guru yang berstatus pegawai kerajaan menyangkut aspek kesejahteraan. Ini bisa dipahami. Dengan gaji 2.000 RM (kurs 1 RM = Rp 2.650 = Rp 5.300.000 perbulan) bagi guru yang baru diangkat, yang biasanya masih lajang, tentu mereka tak terlalu dipusingkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Guru senior Di luar jabatan strukturalnya sebagai wakil kepala sekolah, guru-guru berpengalaman seperti digaji kerajaan sekitar 9.000 RM alias sekitar Rp 23 juta.

Di luar pendapatan rutin bulanan itu, pihak kerajaan Malaysia masih memberi tujangan dan berbagai kemudahan bagi guru untuk menaikkan status sosial mereka. Pinjaman pembelian rumah dan kendaraan bisa diperoleh guru setelah mengabdikan diri dalam rentang waktu tertentu kepada kerajaan. Penghargaan masyarakat kepada guru juga cukup

tinggi sehingga status sosial guru dalam kehidupan sehari-hari mendapat tempat terhormat. Sebetulnya Indonesia jaman dahulu penghargaan sosial terhadap guru juga tidak jauh berbeda. Saat itu menjadi guru adalah sebuah prestise yang tidak sembarang orang bisa memilikinya.

Pada era 1960-an hingga 1970-an, Pemerintah Malaysia banyak mengirim pelajar-pelajarnya ke lembaga pendidikan bergengsi di luar negeri, seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Umumnya, sepulang dari belajar di luar negeri, mereka inilah yang kemudian menjadi pimpinan di banyak lembaga pemerintahan di negeri ini.

Kini, setelah hampir 30 tahun berlalu, Malaysia berhasil menuai hasil dari usaha yang mereka tanam. Tantangan pendidikan yang mereka hadapi tidak lagi menyangkut hal-hal mendasar, seperti ambruknya gedung-gedung sekolah dan tingkat kesejahteraan guru, tetapi lebih pada input-input *upgrade* wawasan, kreativitas dan produktivitas guru.

Berkat konsistensi antara keinginan dan sikap Pemerintah Kerajaan Malaysia akan pentingnya dunia pendidikan bagi kemajuan bangsa, seperti telah mereka buktikan antara lain lewat penyediaan anggaran yang cukup signifikan (hingga 23 persen dari total anggaran negara) untuk bidang ini, institusi pendidikan di negeri ini telah menjadi pusat tolehan bagi berbagai kepentingan. Banyak orang percaya, keberhasilan Malaysia bangkit begitu cepat dari keterpurukan akibat pengaruh ekonomi global beberapa tahun lalu, salah satunya berkat andil besar dunia pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia berkualitas dan mandiri.

2. Belajar Sama Brunei Darussalam

Brunei Darussalam, boleh jadi, satu dari sekian banyak negara yang benar-benar menaruh perhatian pada kesejahteraan guru. Di negeri ini, kata pemerhati pendidikan Prof Dr Winarno Surakhmad, seorang guru SD yang baru lulus sudah diberi gaji sekitar 1.000 ringgit per bulan atau kurang

lebih Rp 5 juta. Pemerintah negeri ini pun memberikan kepastian kenaikan penghasilan secara otomatis, rutin tiap tahun. Besar kenaikannya, sekitar 100 ringgit setiap tahun. Tak hanya penghasilan dan kepastian kenaikan gaji yang diperoleh guru di Brunei Darussalam. Selain penghasilan yang lumayan, para guru pun memperoleh berbagai fasilitas. Dengan demikian, guru bisa lebih berkonsentrasi melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Bahkan, kata Winarno, tiap tahun pemerintah setempat memberi penghargaan kepada guru. Tak sekadar penghargaan dalam bentuk materi, tapi juga harkat dan martabat guru. Guru memperoleh tempat yang lebih terhormat.

3. Belajar Sama India

India mungkin agak berbeda dengan negara-negara lain. Di India gaji guru tidak terlalu tinggi tapi masih lebih tinggi daripada gaji guru Indonesia. Tetapi, guru-guru India mendapat fasilitas yang luar biasa banyak untuk mengakses pengembangan diri. Di India guru mendapat fasilitas banyak untuk membeli buku, mengakses internet, beasiswa berbagai bentuk dan masih banyak lagi fasilitas untuk pengembangan diri sebagai profesional.

Biaya kuliah juga murah. Kalau yang tidak dapat beasiswa, untuk program S-2 dua tahun, orang asing cuma bayar US\$ 600, sekitar Rp 6 juta. Tinggal *nukir* biaya hidup. Dan biaya hidup di Delhi sama dengan di Jakarta. Uang hasil pembayaran orang asing dipakai untuk subsidi warga India asli. Kalau orang India yang kuliah, setahun bayarnya cuma 700 rupee, sekitar Rp 40.000. Kalau guru dapat beasiswa.

Kalau mau jujur, infrastrukturnya di Indonesia lebih bagus. Di kampus sudah ada lift, *whiteboard*, pakai OHP. Kalau di India tidak ada. Naik dari lantai I ke lantai IV masih manual, masih pakai kapur tulis, terus *nggak* ada AC. Tapi, kalau kualitas *content*-nya, dan semangat guru-gurunya kita sangat kalah dibanding mereka. Guru-guru seperti orang keranjang belajar. Di India, buku murah luar biasa, bahkan buku-buku

impor sangatlah murah. Karena pemerintah India memberi subsidi kertas. Selain itu pemerintah juga menjalin kerja sama dengan penerbit-penerbit besar seperti Penguin Books agar buku-buku mereka bisa dicetak di India. Jadi bisa dijual lebih murah. Buku-buku di PT atau buku –guru ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu guru kalau dikonversi ke rupiah, paling mahal cuma Rp 10.000. Kalau di Indonesia. Dan karena subsidi kertas itu, harga langganan koran juga murah. Saya itu langganan satu koran, satu majalah berita semacam *Gatra*, dan satu majalah wanita. Untuk langganan tiga media itu, sebulannya saya cuma bayar 110 rupee, atau sekitar Rp 22.000. Selain itu di India, pelajar dan guru dapat fasilitas kartu abonemen yang harganya cuma 50 rupee, atau sekitar Rp 10.000, yang berlaku selama empat bulan. Dengan kartu pas itu, selama empat bulan kita bisa gratis naik bis pemerintah jurusan apa aja.

Masalah mutu dan relevansi seyogyanya kita bisa belajar dari India yang mengutamakan kualitas pendidikan daripada bangunan fisiknya. Pendidikan di India sangatlah murah. Memang bangunan universitas-universitas di India tidaklah semewah dan seagung universitas di Indonesia. Tetapi ulusannya bisa mengancam ahli-ahli IT di Silicon Valley, USA. Kemampuan dinilai dari prestasi bukan gelar pendidikan yang terus ditambah. Ilmu pengetahuan menjadi kebutuhan hidup bukan alat pamer. Kini India menjadi kekuatan sumber daya manusia intelektual terbesar di dunia setelah Eropa dan Amerika. Kenapa bisa begitu? Pemerintah India sangat menghargai dan membantu perkembangan profesional guru.

Penghargaan sosial terhadap guru juga sangat tinggi karena banyak dipengaruhi budaya Hindu. Adanya hari Bhakti dalam ajaran Hindu untuk menghormati Sang Guru adalah bukti begitu tingginya masyarakat mereka menghagai guru dan sangat menjaga dan mengembangkan guru mencapai proesinalitas yang maksimal.

Skenario mana yang akan dipilih. Kalau menurut penulis skenario pemerintah India perlu diadopsi. Penghargaan guru tidak terlalu tinggi tetapi dari segi penghargaan yang pengembangan profesi guru sangat menonjol. Guru menjadi sangat dihormati karena pengembangan dirinya juga bagus tanpa mengeluarkan materi. Bahkan fasilitas transportasi diberikan dalam bentuk kartu pas yang bebas menggunakan kendaraan bus.

E. Penghargaan pada Guru Tidak Memadai

Penghargaan yang belum memadai terhadap guru menimbulkan berbagai dampak berikut.

1. Guru Tidak Profesional

Telah lama pula disadari bahwa *reward* terutama gaji merupakan salah satu faktor penentu kinerja pegawai termasuk guru, meskipun tidak selalu secara otomatis bahwa peningkatan gaji berkorelasi dengan peningkatan kinerja tanpa ada intervensi lain terhadap pengembangan kemampuan, pembenahan lingkungan kerja, dan peluang untuk pengembangan karier. Namun, karena jumlahnya yang besar setiap usaha untuk meningkatkan gaji PNS selalu timbul persoalan bahkan dilema. Paling tidak ada beberapa isu tentang hubungan antara gaji pegawai negeri (termasuk guru) dan kinerjanya.

Bagi para PNS seringkali fenomena kenaikan gaji ini menimbulkan dampak psikologis yang tidak enteng. Jadi pengumuman kenaikan gaji PNS berapa pun akan menimbulkan sentimen pasar yang luar biasa. Mungkin dampak ini bisa lebih dikurangi dengan cara menaikkan secara bertahap dan tanpa publikasi yang luas gaji PNS atau dengan meningkatkan tunjangan fungsionalnya. Jika gaji PNS tidak ditingkatkan, maka PNS akan mencari penghasilan tambahan di luar gaji resminya yang malah mengakibatkan tugas utamanya terabaikan. Misalnya, bagi seorang guru terpaksa

harus jadi "pengamen" ke sana-ke mari dengan menjual "kebolehnya" mengajar di banyak tempat sehingga tidak punya waktu untuk membaca dan mengembangkan pengetahuannya. Di bawah ini disajikan fakta seorang guru yang mengerjakan pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan profesinya. Kita tidak dapat berharap banyak agar dia dapat mengembangkan profesinya.

Samsu yang juga pernah menjadi guru sebelum terjun ke dunia politik mengatakan, gaji guru itu habis pada setiap tanggal 15. Jadi untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya di atas tanggal 15, guru harus cari pekerjaan lain. "Kalau bukan, banyak gaji guru yang dipotong karena harus kredit uang di bank. Coba periksa, rata-rata SK yang ada di bank yang menjadi jaminan adalah SK guru. Mereka harus rela menggadaikan SK-nya untuk membeli sesuatu," kata Samsu. Selain faktor rendahnya gaji, Samsu juga menjelaskan, jika malasnya guru mengajar juga disebabkan pengembangan akademik dan pelatihan tidak dilaksanakan maksimal oleh pemerintah. "Guru-guru sangat jenuh dengan sistem pendidikan kita. Mereka bingung, setiap ganti menteri ganti juga kebijakan. Seharusnya saat ini pemerintah bertanya apa yang dibutuhkan oleh guru.

Guru Sekaligus Tukang Tower dan Penjaga Server

Bukan apa-apa, berkenaan gaji guru yang mengerikan ini saya telah mengalaminya sendiri. Akibat gaji guru yang saya terima tidak mencukupi kebutuhan keluarga 'terpaksa' saya merangkap 2 pekerjaan lagi. Hal ini menyebabkan saya tidak layak disebut guru yang 'profesional'. Pagi bekerja sebagai guru, sore bekerja sebagai 'tukang' yang naik tower wireless untuk membetulkan akses internet client yang ngadat. Malam jadi 'penjaga' server e-pulsa salah satu teman. Pokoknya tidak ada lagi waktu untuk duduk manis, baca koran, nonton TV karena kalau malam sudah kelelahan langsung tidur.

Syarat guru profesional menurut Bapak Dosen saya di FKIP adalah guru hanya melakukan kegiatan yang masih dalam ruang lingkup profesinya (mengajar). Jadi bagaimana saya yang jadi guru merangkap 'tukang' plus 'penjaga'...Jauh sekaleee..Aduh.. malu... tapi mau bagaimana lagi, kalau mengandalkan gaji guru saja maka setelah bayar cicilan sepeda motor, kredit rumah, uang susu anak, dan lain-lain hanya menerima cukup untuk makan seminggu. Nah, pak, yang 3 minggu lagi anak-isteri saya makan apa? apa cukup di kasih makan hadiah 'embel-embel' Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

Seorang Guru di Pantai Banyuwangi

Saya nggak digaji sama sekali dari mengajar saya di MTS ini. Masuk sekolahnya pukul 10 pagi. Setelah subuh saya bekerja dulu di pelelangan ikan. Ini pekerjaan saya yang sesungguhnya. Siangnya saya mengajar dan itu ibadah saya. Saya rela gak digaji. Tapi saya sering kesulitan membeli buku. Karena hasil dagang saya untuk makan anak istri. Saya mengajar sebisanya karena saya melakukan hanya untuk pengabdian.

Seorang Guru di Papua

Masalah guru sambil bekerja lain yang tidak sesuai dengan profesinya memang bukan rahasia lagi. Kita sering mendengar dan menyaksikan di media, guru di Papua berprofesi ganda yaitu petani dan berburuh di hutan. Mereka akan berburu atau bertani bila sekolah libur. Sekolah dengan beberapa guru dan merangkap dari kelas 1 sampai 6 SD adalah sebuah fenomena timpangnya pendidikan di desa dan kota besar. Guru di daerah terutama di pegunungan Papua belajar tidak menentu. Terkadang seminggu hanya 2 kali pertemuan, dan jarang sekolah berjalan lancar. Terlebih guru tidak memperoleh perhatian yang signifikan dari pemerintah. Pembelajaran yang tidak kontinyu hasil yang diperoleh sangat rendah. Jauh dari yang diharapkan.

2. Mutu Pendidikan Tidak Berkualitas

Sebuah survei yang dilakukan di delapan negara membuktikan 19 persen guru di Indonesia absen mengajar. Angka ini membuat Indonesia berada di posisi ketiga daftar negara dengan tingkat kehadiran guru terendah.

Minimnya ketidakhadiran guru Indonesia itu disinyalir karena rendahnya gaji yang diperoleh. Sehingga banyak guru yang mencari tambahan penghasilan dari kerja sampingan. Kalau sudah begitu, waktu mengajar pun mau tak mau tersita.

"Merubah prosedur untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan aturan insentif yang mempromosikan karir guru menjadi komponen yang penting," ujar *World Bank Country Director*, Joachim von Amsberg dalam situs resmi Bank Dunia, Minggu (8/7). Survei tersebut memperlihatkan bahwa gaji guru di Thailand dan Filipina lebih besar dua kali lipat ketimbang guru Indonesia.

Guru di negara lain digaji tinggi tidak boleh nyambi lagi. Dituntut di sekolah/ kampus sampai sore sehingga punya waktu banyak untuk menulis dan membaca. Dampaknya, dia semakin pintar dan semakin profesional. Kalau semakin profesional penghargaan sosial semakin tinggi. Kondisi psikis guru sendiri juga semakin nyaman dan etos kerjanya semakin tinggi. Kesadaran internal bisa tumbuh dengan sendirinya karena mereka bisa merasa dirinya berharga dalam profesinya. Jadi peningkatan diri bukan dengan dorongan eksternal pelatihan yang bertubi-tubi tetapi dengan mengetuk nurani guru dan memfasilitasinya menjadi dirinya sendiri. Guru menjadi percaya diri dan batinnya tidak berkonflik. Guru di Indonesia minder dan kurang percaya diri karena merasa tidak profesional dan memang fasilitas untuk mengembangkan keprofesioanalannya tidak mendukung. Mereka tidak bisa membeli buku, tidak memiliki waktu untuk belajar, dan gizinya

pun tidak baik untuk kesehatan mereka karena minimnya gaji yang diterima.

Bagi guru sendiri kurangnya penghargaan dari segi sosial, kesejahteraan, dan perlindungan menyebabkan berbagai kondisi psikis yang meliputi (a) guru tidak profesional karena kurang waktu untuk belajar (bekerja di jalur pekerjaan yang jauh berbeda), (b) guru minder karena kurang percaya diri dengan kemampuannya dan statusnya, (c) guru kurang bangga dengan profesinya sendiri, (d) guru apatis terhadap apa pun rencana Pemerintah tentang dirinya, (e) malas mengajar dan masa bodoh, (f) tidak dapat menumbangkan diri, (g) apatis karena tertekan secara birokratis, dan (h) pekerjaan guru akan diisi orang yang asal jadi guru karena panggilan jiwa maupun karena terpaksa jadi guru karena tidak mendapatkan pekerjaan lain.

Guru malas karena gajinya telah habis dipotong bank. Banyak gaji guru yang habis dipotong karena harus kredit uang di bank. Coba periksa, rata-rata SK yang ada di bank yang menjadi jaminan adalah SK guru. Mereka harus rela menggadaikan SK-nya untuk membeli sesuatu.

Selain itu, janji-janji pemerintah yang tak kunjung direalisasikan membuat was-was perasaan guru. Rasa tidak aman dan harap-harap cemas menanti kepastian. UU Guru dan Dosen dengan seribu janji indah di dalamnya belum tentu dapat direalisasikan. Undang-undang yang telah ditetapkan DPRD sampai saat ini belum diberlakukan. Jangan sampai nasib UU Guru dan Dosen ini sama dengan UU Sisdiknas tentang anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBD dan APBN. Kalau ini terjadi kiamatlah dunia guru Indonesia. Guru akan semakin frustrasi. Penantian panjang seribu janji dalam undang-undang menambah loyonya semangat guru. Belum lagi BARISAN GURU YANG FRUSTASI karena tidak dapat ikut sertifikasi bisa melemahkan mutu proses dan hasil pendidikan. Guru yang tidak dapat mengikuti sertifikasi bukan otomatis guru yang tidak berkualitas. Hal ini bukan semata-

mata kesalahan guru karena mungkin di daerahnya memang tidak banyak seminar yang dapat diikuti, tidak pernah dikirim diklat karena tidak dekat dengan penguasa, tidak dapat sekolah karena tidak punya dana karena gajinya tidak cukup untuk itu. Guru yang memenuhi merasa memenuhi syarat tetapi tidak terpilih dalam penjurangan kuota di Diknas Kota/kabupaten/ Propinsi atau guru yang berpengalaman kerja sangat lama dengan hanya lulusan B.A tetapi dengan kualitas kompetensi dan sikap yang bagus akan memperkuat barisan sakit hati. Guru yang di barisan sakit hati ini justru akan KONTRA PRODUKTIF karena semangatnya menjadi menurun. Ingin meningkatkan kualifikasi umur sudah tua.

Dengan demikian, selain membuat tidak profesional, penghargaan yang kurang dari sisi materi, sosial, dan perlindungan membuat kondisi psikis guru semakin runyam. Tudingan dari berbagai pihak akan membuat guru apatis, frustrasi, dan bekerja apa adanya. Ujungnya bisa ditebak mutu pendidikan kita tidak menggembirakan. Guru ujung tombak pelaksana pendidikan kurang bergairah dan tidak profesional menjalankan tugasnya.

Di samping permasalahan di atas, persoalan lain adalah masalah perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesinya yang belum optimal, seperti: dipaksa pensiun dini dan perlakuan yang tidak adil terhadap guru. Sementara itu, penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi juga masih minim. Hal ini mempengaruhi produktivitas pendidik dan tenaga kependidikan. Di samping itu, permasalahan yang juga penting dalam kaitannya dengan diberlakukannya otonomi daerah adalah belum efektif dan efisiennya manajemen guru, terutama pada pemerintah daerah.

Kondisi guru yang demikian akan menyebabkan mutu pendidikan akan rendah sebab (1) proses belajar mengajar tidak berkualitas, (2) pendidikan nilai kurang optimal atau bahkan tidak tercapai karena siswa tidak mendapat model dari

gurunya, (3) guru yang kurang bersemangat akan ditiru muridnya, (4) guru yang tertekan secara birokratis akan sulit berbuat kreatif sehingga sulit juga menciptakan generasi kreatif bangsa ini, (5) guru ketinggalan perkembangan ilmu karena tidak kuat beli buku atau tidak punya waktu membeli buku, majalah, bahkan koran. Adakan sensus hanya berapa persen guru yang langganan koran?

Bagi negara, semua masalah guru tersebut akan berujung pada gagalnya mencapai tujuan nasional pendidikan, pembangunan sumber daya manusia tidak tercapai maksimal, dan masa depan pendidikan suram karena tidak ada putra-putri terbaik yang ingin menjadi guru. Bagi masyarakat masalah tersebut berakibat orangtua tidak mendapatkan pendidikan bermutu dan relevan, pendidikan nilai anak tidak secara maksimal dapat tercapai, siswa mendapat model yang tidak baik dari suasana batin guru karena siswa yang dibimbing guru dalam suasana batin tidak menentu akan menjadi anak yang pesimistis.

3. Citra LPTK dan Kualitas Pendidikan di Masa Depan

Dampak dari rendahnya penghargaan pada guru adalah timbulnya citra lembaga pendidikan guru sebagai lembaga pendidikan kelas kambing. Lembaga pendidikan guru di Indonesia adalah lembaga pendidikan kelas dua. Siswa SMA yang relatif pandai akan sangat malu jika hanya diterima di sebuah pendidikan guru. Bahkan berdasarkan pengalaman penulis ada siswa SMA sampai tidak mau datang ke tempat reuni karena malunya diterima di sekolah guru. Padahal seharusnya lembaga pendidikan guru adalah lembaga pendidikan utama dalam peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu masalah pendidikan bangsa kita adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan guru ini mendapatkan prioritas utama di dalam pengembangannya dalam rangka upaya reformasi pendidikan nasional.

Ketika penghargaan guru mulai diperhatikan, minat dan gengsi menjadi guru pun mulai berubah. Di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, pemerintah daerah memberikan insentif tambahan yang cukup signifikan kepada para guru pegawai negeri sipil (PNS). Dengan tunjangan dari pemerintah daerah sekitar Rp 2 juta per bulan, penghasilan seorang guru PNS minimal Rp 3 juta. Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen juga memberikan sinyal bahwa kesejahteraan guru akan ditingkatkan. Guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan mengantongi sertifikat sebagai pendidik dijanjikan mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok. Belum lagi tambahan tunjangan fungsional sebesar Rp 500.000 per bulan. Peningkatan kesejahteraan guru itu membuat Mustofa (23) yang tak pernah punya keinginan jadi guru harus berpikir ulang. Mahasiswa kimia UNJ itu mulai melirik profesi guru. Apalagi penghasilan guru PNS di Jakarta tidak gampang terkejar oleh karier bekerja di perusahaan swasta dengan penghasilan awal Rp 1,2 juta per bulan. "Dulu enggak banget kalau jadi guru, sekarang fifty-fifty," kata Mustofa, lulusan SMA Negeri 30 di Jakarta Timur itu.

Menjadi guru juga merupakan cita-cita Asep Gunawan (19), mahasiswa Program Studi Kependidikan Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Ibunya guru SD yang telah mengabdikan selama lebih dari 20 tahun. Penghasilannya kecil. Cerita itu justru mendorong Opik, panggilan akrab Asep Gunawan, menjadi guru. Lulus SMA ia mendaftar ke Jurusan Bahasa Inggris, Jerman, dan Kimia, UPI. Ketiganya program kependidikan. "Begitu mendengar saya masuk UPI, langsung pandangan teman-teman saya dulu gimana gitu, tetapi saya tidak minder. Saya justru ingin mengubah citra seorang guru," tutur Opik. Silla dan Opik boleh dibilang pengecualian dari kawan-kawan segenerasinya. Gaji guru yang rendah, tertindas oleh birokrasi dan sulit berkembang, serta merosotnya status sosial guru di tengah masyarakat membuat profesi guru menjadi pilihan terakhir.

Ketika harga guru begitu rendahnya, lembaga-lembaga pendidikan guru kesulitan mencari masukan calon mahasiswa yang pintar. Sebagaimana profesi guru, mahasiswa program studi kependidikan juga dianggap warga kelas dua.

Berbeda halnya dengan transkrip percakapan anak TK berikut mencerminkan kekapokan anak seorang guru yang merasakan tidak enaknya menjadi guru. " Kalau besar kamu mau jadi ada Devi? "Jadi guru" 'Jangan, kata mamaku jadi guru itu akan menjadi miskin", celetuk murid TK yang mamanya putra seorang guru SD.

Dari analisis dampak dapat diketahui pentingnya kesejahteraan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan faktor utama dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah faktor guru. Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah upaya-upaya berikut agar guru dapat penghargaan secara memadai dan akhirnya berdampak pada naiknya kualitas pendidikan kita.

Berbagai riset telah membuktikan bahwa pembangunan pendidikan berdampak besar terhadap kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengoreksi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Selama ini guru hanya dipuji, tetapi tidak diperhatikan nasib dan kesejahteraannya. Naikkan gaji guru secara memadai, berikan fasilitas yang mendukung misalnya kebebasan dan ketersediaan sarana pengembangan dan peningkatan diri. Fasilitas yang sudah terinci dalam UU Guru dan Dosen hendaknya harus segera direalisasikan. Rasa aman dan nyaman guru diberikan dengan berbagai produk hukum dan sarana yang mendukung. Alasan klasik Pemerintah karena terbatasnya anggaran perlu dikaji kembali. Kalau ada niat baik, Pemerintah mampu melakukannya. Buktinya, untuk politik pemerintah bisa royal. Kenapa untuk gaji guru tidak bisa? Dengan kesadaran pentingnya pendidikan di masa depan, hendaknya ada niat baik pemerintah untuk meningkatkan penghargaan terhadap guru.

Dan kebijakan yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah membuat sistem pemantauan yang lebih bagus agar guru yang sudah dinaikkan gaji dan kesejahteraannya benar-benar dapat melakukan kewajibannya dengan baik di sekolah. Hal ini penting sebab kaena sudah terbiasa mencari pekerjaan di luar, guru akan sulit berdiam di sekolah walaupun gajinya sudah tinggi. Tidak mudah mengubah kebiasaan yang telah mendarah daging. Seperti di Malaysia guru dan dosen wajib datang pukul 7.00 sampai pukul 17.00. Guru bisa melakukan banyak hal di sekolah. Selain mengajar dan membimbing siswanya baik dalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, mereka juga bisa mengembangkan dirinya. Guru profesioanl perlu waktu untuk membaca, merenung, menulis, mempersiapkan media pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, dan sebagainya.

Berbicara mengenai kesejahteraan guru, sebenarnya tidak semata-mata persoalan gaji, tapi juga menyangkut kelancaran dalam kenaikan pangkat, rasa aman dalam menjalankan tugas, kondisi kerja, kepastian karier dan hubungan antar pribadi. Selama ini, aspek-aspek dari kesejahteraan guru tersebut umumnya masih sangat jauh dari keadaan ideal.

Rasa aman guru dalam menjalankan tugas perlu terjamin oleh undang-undang yang pasti. Perlakuan yang tidak adil terhadap guru ditindak secara tegas sehingga tidak berlarut-larut. Perlindungan guru dari kekerasan fisik maupun psikis perlu diatur secara jelas. Rasa nyaman guru kadang juga tidak terganggu karena kepastian karier. tidak jelas. Guru banyak terhambat oleh hal-hal yang di luar kemampuan profesionalnya. Birokrat pendidikan mendukung penuh kreativitas dan karier guru. Hubungan antarpribadi di tempat kerja guru (sekolah) lebih nyaman dalam hubungan kolegal yang didasarkan atas profesionalisme. Dengan demikian, guru tak segan mendiskusikan masalah atau kesulitan yang

dihadapinya dan guru dapat menjalankan perannya secara optimal.

Masyarakat diharapkan tidak hanya menuntut guru dengan berbagai keberhasilan tetapi juga tidak pelit mendukung kesejahteraan guru. Masyarakat DUDI (Dunia usaha dan industri) atau Komite Sekolah bisa merancang berbagai insentif atau beasiswa untuk guru. Khalil Gibran sang penyair ternama pernah menganalogikan keterkaitan antara sistem pendidikan dan masyarakat dengan sebuah busur kokoh dan panah nan tajam. Busur terkuat akan menghempaskan anak panah pada titik terjauhnya. Analogi ini berarti sistem pendidikan yang terfokus akan dapat menghasilkan masyarakat terdidik dan pada akhirnya membawa pada bangsa yang berkembang dan berhasil. Ada beberapa contoh baik yang dilakukan komite sekolah dengan selalu mengikuti pelatihan/ seminar guru-gurunya apabila ada hal-hal yang baru. Komite Sekolah atau Dunia Usaha memberikan beasiswa guru untuk melanjutkan studi. Beberapa Pemerintah Daerah juga banyak yang memberikan beasiswa untuk guru-guru berprestasi.

4. Peran Pengawas dan Kepala

Salah satu penunjang keberhasilan kinerja guru adalah pembimbingan dan supervisi secara partisipatif dari pengawas dan kepala sekolah. Rasa aman guru bisa terbentuk karena merasa ada yang ditanya dan diajak berdiskusi ketika menghadapi masalah di lapangan. Bukan dimarahi atau disalahkan saja tetapi dicarikan jalan keluar sehingga guru merasa aman dan nyaman. Perubahan kebijakan yang kadang terlalu cepat dan guru dituntut banyak hal menyebabkan guru cenderung frustrasi jika hanya dipersalahkan dan dituntut macam-macam. Apalagi dengan adanya kebijakan KTSP yang menuntut guru lebih kreatif dan secara mandiri mengembangkan perangkat mengajar maupun proses belajar yang kontekstual menuntut bimbingan yang profesional dari

para pengawas dan kepala sekolah. Untuk itu, pengawas dan kepala sekolah juga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat menjadi pembimbing yang profesional dan humanis.

Hubungan antarpribadi dan model pembimbingan juga perlu ditinjau kembali sehingga membuat guru nyaman melakukan perubahan. Hal ini mengingat perubahan itu datangnya dari internal guru. Perubahan karena faktor eksternal yang terlalu dipaksakan malah membuat kontradiktif.

5. Guru Harus Gigih Menunjukkan Kinerjanya

Guru juga harus meningkatkan kesadaran bahwa profesi guru merupakan amanah dari Tuhan sebagai ladang amalnya. Berbagai peran harus dilakukan semaksimal mungkin untuk masa depan generasi bangsa ini. Guru harus mampu memotivasi dirinya sendiri untuk bekerja sebaik mungkin. Buktikan bahwa guru memang dapat berbuat secara profesional. Hunjamkan pada sanubari guru bahwa guru mampu dan penuh percaya diri untuk melakukan tugasnya. Imbalan yang datang merupakan konsekuensi logis dari pekerjaan baik yang telah dilakukan.

6. Guru yang Benar- Benar Memiliki Kompetensi

Langkah berani yang harus ditempuh pemerintah adalah benar-benar mengangkat guru yang kompeten dengan ujian dan mekanisme penerimaan yang valid. Negara kita masih banyak memiliki calon-calon guru yang benar-benar kompeten untuk menjadi guru. Tutup segera lembaga penghasil guru yang tidak terstandar. Seiring dengan standar gaji yang dinaikkan banyak peluang untuk memilih guru yang benar-benar sesuai. Sambil membenahi guru yang ada langkah berani dalam rekrutmen guru memang harus ditempuh dengan cara-cara yang berani dan terstandar. Jangan ada lagi pengangkatan guru karena pemerintah dalam kondisi tertekan

sehingga harus mengangkat guru yang tidak sesuai dan tidak kompeten. Mekanisme pengangkatan juga harus terstandar dan transparan. Jauhkan KKN untuk pengangkatan guru agar citra guru meningkat.

7. LPTK: Berjuang Keras Meningkatkan Kualitas Guru

LPTK mempunyai kewajiban moral untuk bersedih jika lulusannya sampai saat ini masih belum mendapatkan penghargaan yang setimpal. Sumbangan LPTK banyak bermuara untuk membuat lulusannya menjadi berkualitas. Dengan lulusan yang berkualitas diharapkan guru lebih mendapat penghargaan yang memadai. Hal-hal berikut merupakan upaya yang bisa dilakukan LPTK untuk meningkatkan kualitas sekolah guru.

Kenyataannya tidak semua orang memiliki jiwa guru. Jiwa guru dimiliki oleh orang-orang yang memiliki bakat menjadi guru. Hal ini perlu dilakukan mengingat profesi guru menjadi sangat penting untuk mendidik, melatih, mengajar, dan memberi model pada siswa-siswanya.

Sebagai lembaga yang harus menghasilkan tenaga profesional, LPTK perlu menganalisis dan menyiapkan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan calon guru dalam menjalankan tugasnya di masa depan. Misalnya, peran serta masyarakat terbukti dapat mempengaruhi kualitas pendidikan suatu negara. Masyarakat diajak berlomba dan menampilkan citra bahwa keberhasilan pendidikan adalah keberhasilan masyarakat tersebut. Dengan bantuan masyarakat setiap sekolah harus berlomba untuk menjadi lambang keberhasilan masyarakat. Guru harus mampu mengajak masyarakat untuk memupuk dan membesarkan sekolah tempat mereka bekerja. Setiap sekolah harus berusaha menjadi milik dan kebanggaan masyarakat setempat. Pertanyaan yang harus dijawab LPTK adalah keterampilan dan sikap apa yang perlu diberikan kepada calon guru agar mampu berfungsi seperti itu?

Sudah bukan rahasia lagi bahwa sekolah pendidikan guru diminati oleh warga negara kelas dua di negeri ini. Untuk itu diperlukan strategi dari LPTK untuk dapat menjaring masukan yang memadai untuk menjadi guru. Kalau bisa juga perlu dicarikan strategi pendidikan guru diminati putra-putri terbaik negri ini. Pemberian insentif khusus bagi siswa terbaik yang masuk LPTK mungkin perlu dilakukan. Sementara citra seorang guru terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan kesejahteraannya, LPTK menyiapkan strategi untuk menjaring siswa-siswa terbaik.

Sistem ini dapat memaksimalkan pembentukan kepribadian guru. Pembentukan kompetensi kepribadian dan sosial dapat lebih maksimal dengan *boarding*. Penilaian calon guru mencakup aspek kognitif, afektif, dan keterampilan secara berimbang. Aspek kreativitas, kepemimpinan, pengabdian, kejujuran, dan aspek kepribadian yang lain harus menjadi fokus penilaian bagi calon guru. Dengan demikian Indeks Prestasi yang selama ini terlalu berfokus pada masalah intelektual bergeser lebih komprehensif untuk menilai calon guru pada aspek afektif dan keterampilannya secara berimbang dan proporsional. LPTK berupaya mengembangkan kompetensi guru melalui (a) praktik / magang lebih lama dan lebih awal di sekolah, (b) melibatkan praktik lapangan untuk setiap mata kuliah PBM, (c) membuka peluang ekstrakurikuler sebanyak-banyaknya dan mewajibkan calon guru untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, (d) pendidikan berasrama untuk membentuk kemandirian, praktik ibadah keagamaan, paktik hidup bersama, memecahkan masalah, (e) penerjunan langsung calon guru pada kegiatan- kegiatan sosial /pengabdian, (f) pembiasaan untuk nilai-nilai yang ditargetkan pada kegiatan sebelum, selama, setelah perkuliahan, (g) dilibatkan pada budaya meneliti (terutama penelitian tindakan kelas) untuk membiasakan mahasiswa memecahkan masalah pendidikan sesuai dengan

spesialisasinya, dan (h) merangsang kreativitas dengan berbagai adu ajang kreativitas.

8. Kebijakan dan Tugas Guru di Lapangan

Kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah secara cepat sangat membingungkan guru. Agar tidak menghasilkan kebijakan coba-coba perlu kajian/ riset mendalam tentang kebijakan yang akan diambil. Kondisi guru sangat labil jika dihantam kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu cepat. Perubahan KBK sampai KTSP kemarin sampai membuat banyak guru frustrasi. Kebijakan yang satu belum diterapkan sudah muncul kebijakan lain yang berbeda.

9. Riset tentang Guru Dipertajam

Lembaga penelitian yang ada di PT maupun di departemen mengadakan kajian serius berkaitan dengan guru sehingga terapi yang dilakukan untuk guru tidak hanya bersifat coba-coba. Pelaksanaan diklat-diklat perlu dikaji secara ilmiah apakah benar-benar dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Masalah kualitas pendidikan sangat bergantung kepada guru. Bagaimana agar guru berkualitas? Perlu berbagai riset untuk meneliti faktor guru. Media massa memberi semangat guru dengan memberi citra yang baik kepada guru.

10. Kreativitas dan Karier Guru

Untuk kepentingan kualitas pendidikan, diharapkan para birokrat bersinergi dalam mengurus guru. Birokrasi tidak melemahkan kreativitas guru. Birokrasi menjamin karier yang tidak rumit. Kondisi psikis guru susah teramat berat. Jika kondisi psikis guru dibebani macam-macam oleh birokrasi akan menambah buruk.

11. Kerjasama Organisasi Guru dan Diknas

Organisasi guru dan Diknas tidak hanya menuntut tetapi menuntut sesuatu dengan konsep yang jelas. Misalnya, dalam hal kenaikan gaji PGRI perlu mengkonsep dan tak kenal lelah mengusahakan kenaikan gaji guru. Seperti yang tak kenal lelah dilakukan oleh Persatuan Hakim Indonesia dan Tim Reformasi Birokrasi Depkeu. Dengan membawa sejumlah konsep bagaimana SOP kenaikan gaji akhirnya mereka berhasil menaikkan gaji hakim dan pegawai departemen keuangan secara fantastis. Seharusnya PGRI tidak hanya menuntut tetapi perlu mempunyai konsep yang jelas.

1 2 . Menghapus Mitos-Mitos yang Melemahkan

Di masyarakat berkembang mitos-mitos yang bisa melemahkan keprofesionalan guru. Dengan adanya mitos-mitos tersebut guru mengganggu cara masyarakat maupun pemerintah dalam menghargai guru. Misalnya adanya mitos bahwa pekerjaan guru adalah suatu pengabdian. Dengan mitos seperti ini masyarakat memiliki tuntutan yang tinggi kepada guru tetapi pelit menghargai jasa-jasanya dalam bentuk materi atau kesejahteraannya. Padahal guru juga manusia yang memerlukan makan, sandang, dan papan. Ada lagi adanya mitos –mitos yang berimplikasi tidak baik bagi pengembangan kesejahteraan guru.

Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Citra guru pada zaman Hindu memang penuh puja dan puji. Bedanya pada zaman dulu para Begawan dipuja –puji dan juga dicukupi kebutuhannya. Guru sekarang hanya diberi label dan dipuja pahlawan tanpa tanda jasa tetapi kebutuhan diabaikan. Di Indonsia guru diberi label pahlawan tanpa tanda jasa. Di Jepang ada penghargaan citra guru dengan ungkapan *She no on wa yania yori mo takai, uni yori mo fukai*. Artinya jasa guru adalah lebih tinggi dari gunung tertinggi, lebih alam dari laut yang terdalam. Bedanya, di Jepang ungkapan pujian

diikuti penghargaan yang setimpal sedangkan di Indonesia puja-puji tanpa diiringi penghargaan yang memadai.

Pekerjaan Guru Adalah Pengabdian

Citra guru sebagai orang yang tidak butuh materi memang bisa hidup dalam masyarakat Indonesia. Masih banyak guru-guru yang rela tidak dibayar karena seseorang ingin mengabdikan dirinya sebagai guru. Dalam masyarakat modern, jika pemerintah masih menganggap guru sebagai orang suci sudah sepantasnyalah memberi imbalan yang sesuai dengan pengabdianannya.

Pekerjaan Guru Sebagai Pekerjaan Pelarian

Ada ungkapan jika tidak dapat mengerjakan pekerjaan lain jadilah guru. Siapa saja bisa dan boleh menjadi guru. Orang yang merasa tidak mendapat pekerjaan di mana-mana lebih memilih menjadi guru. Mitos bahwa ilmu pendidikan mudah dikuasai mendukung terjadinya fenomena bahwa siapa pun mampu menjadi guru.

Mitos Bahwa Guru Bukan Pekerja

Profesi guru bukan profesi pekerja yang punya hak dan kewajiban. Karena bukan pekerja guru tidak menuntut perlindungan. Saat ini PGRI sebagai organisasi profesi dan juga sebagai organisasi pekerja. Oleh sebab itu, guru mempunyai hak-hak dan kewajiban yang dilindungi Konvensi ILO tentang hak-hak asasi mendasar. Guru perlu hidup layak bagi kemanusiaan. Guru bukan pekerjaan yang menuntut hak istimewa tetapi menuntut hak-haknya sebagai pekerja. Kalaupun profesi guru tidak menjanjikan kekayaan yang berlimpah bukan berarti menjadi guru harus menderita karena kemiskinannya.

Fakta-fakta menunjukkan bahwa penghargaan terhadap guru masih kurang memadai. Penghargaan yang kurang memadai tersebut mengakibatkan guru kurang profesional. Karena guru kurang profesional dan sekolah guru dianggap kurang bergengsi menyebabkan tidak diminati oleh

putra-putri terbaik negeri ini . Penghargaan yang kurang memadai terhadap guru menyebabkan dampak kurang berkualitasnya pendidikan di masa kini dan di masa depan. Untuk itu disarankan guru lebih ditingkatkan penghargaan baik dari segi finansial, harga diri, dan segi keamanan serta kenyamanan.

BAB VIII

GURU: PENDIDIK INTELEKTUAL

A. Pendahuluan

Kecerdasan intelektual sangat berhubungan dengan kemampuan belajar. Kecerdasan Intelektual ini sangat penting dalam meraih kesuksesan, karena sumber utama kebudayaan adalah penciptaan. Inilah keunggulan kecerdasan intelektual, kecerdasan untuk mencipta, yang dikaruniai oleh Allah kepada manusia. Jadi intelektual adalah penciptaan makna dalam pikiran; sarana yang digunakan manusia untuk “berpikir”, menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan syaraf baru, dan belajar.

Peran guru dalam pengajaran yang berdasarkan inteligensi ganda beranggapan bahwa siswa perlu dibantu dalam proses belajar mengajar dengan metode yang sesuai dengan inteligensi apa yang lebih menonjol dalam diri siswa. Supaya guru dapat membantu siswa dalam belajar sains dengan teori intelegensi ganda, pertama-tama guru harus mengetahui intelegensi macam apa yang paling banyak dimiliki oleh siswanya.

Kausalitas merupakan suatu konsep filosofis yang banyak dibahas dalam epistemologi, metafisika, dan filsafat sains. John Stuart Mill, David Hume memulai kerjanya dengan melakukan pengamatan. Dari pengamatannya terkadang ditemukan adanya dua kumpulan data yang berkorelasi. Iapun mengatakan bahwa hubungan kausalitas didasarkan pada korelasi, semakin tinggi korelasi, semakin kentara bahwa dua hal kejadian mempunyai relasi sebab akibat. Lebih lanjut John Stuart Mill merumuskan metode kausalitas dengan prinsip

pada kejadian dimana pada situasi yang sama timbul akibat yang sama pula, maka penyebab akan ditemukan pada salah satu atau lebih faktor yang ada pada hal yang sama yang mendahului (*antecedent*) kasus tersebut.

Keterampilan bertanya, bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Mengapa demikian? Sebab melalui keterampilan ini guru dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Dapat Anda rasakan, pembelajaran akan menjadi sangat membosankan, manakala selama berjam-jam guru menjelaskan materi pelajaran tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik hanya sekedar pertanyaan pancingan, atau pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Oleh karena itu dalam setiap proses pembelajaran, model pembelajaran apa pun yang digunakan bertanya merupakan kegiatan yang selalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Para ahli percaya, pertanyaan yang baik, memiliki dampak yang positif terhadap siswa, di antaranya:

- a. Dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran.
- b. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri pada hakikatnya bertanya.
- c. Dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa, serta menuntun siswa untuk menemukan jawaban.
- d. Memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas.

Dalam penerapan model-model pembelajaran baik CTL apalagi MP PKB, keberhasilannya sangat ditentukan oleh keterampilan bertanya. Mengapa demikian? Oleh sebab model-model pembelajaran yang demikian tidak menempatkan siswa sebagai objek belajar yang hanya bertugas mendengarkan, mencatat, dan menghafal materi pelajaran. Akan tetapi mendorong siswa untuk berperan secara aktif dalam mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Bagaimana proses mendorong siswa untuk menemukan itu akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membimbing siswa

melalui proses bertanya.

James A. Beane dan Michael W. Apple, mendefinisikan, sekolah demokratis atau demokrasi dalam pendidikan adalah mengimplementasikan pola-pola demokrasi dalam pengelolaan sekolah, yang secara umum mencakup dua aspek yakni struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut. Dengan kata lain, sekolah demokratis atau demokrasi dalam pendidikan adalah sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktek-praktek demokratis itu terlaksana, seperti pelibatan masyarakat (*stakeholder* dan *user* sekolah) dalam membahas program-program sekolah, dan prosedur pengambilan keputusan dengan memperhatikan berbagai aspirasi publik.

Perubahan radikal tentang pengelolaan pendidikan memperoleh penguatan dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Poin penting dalam ayat ini adalah penegasan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, artinya, bahwa keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya lebih besar daripada pemerintah pusat.

Otak manusia terdiri dari dua belahan, kanan dan kiri. Kedua-duanya berpikir dan mengendalikan tubuh manusia. Belahan otak sebelah kiri mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan, dan belahan otak sebelah kanan mengendalikan tubuh sebelah kiri. Setiap belahan otak tampaknya terspesialisasi dalam fungsi tertentu. Spesialisasi otak sebelah kiri adalah bahasa lisan dan tulisan, logika, keterampilan matematis, dan konsep-konsep ilmiah. Pekerjaan yang melibatkan otak sebelah kiri misalnya akuntansi, pekerjaan laboratorium dan sebagainya. Sedangkan spesialisasi otak sebelah kanan adalah

mengenal pola dan bentuk dan bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain, membangun kemampuan berimajinasi, mengapresiasi seni dan memahami rumor.

B. Penerapan Teori Intelegensi Ganda Dalam Pembelajaran Sains

Kata orang bijak, bila ingin hidup sukses kita harus pintar, bila ingin hidup bahagia kita harus cerdas. Hal ini sesuai dengan sabda (Hadist) Rasullullah Muhammad SAW, jika ingin mendapatkan dunia maka harus dengan ilmu (kemampuan intelektual), jika ingin mendapatkan akhirat maka harus dengan ilmu (kemampuan intelektual), dan jika ingin mendapatkan keduanya maka harus dengan ilmu (kemampuan intelektual).

Kecerdasan Intelektual adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan belajar dan penciptaan. Seseorang yang cerdas intelektual mampu belajar dengan cepat dan mampu menciptakan sesuatu. Produk penciptaan ini dapat beragam karena, berdasarkan dengan kecerdasan yang dimilikinya, kini telah diakui ada banyak bentuk kecerdasan intelektual.(Umamah et al, 2005:148). Sedangkan Menurut Gardner kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya atau lebih.

Gardner lebih lanjut menjelaskan tentang kecerdasan dalam buku terkenalnya berjudul **Frames of Mind**, secara meyakinkan menawarkan cara pandang alternatif terhadap kompetensi intelektual manusia. Dan, ia kemudian mengemukakan secara garis besar delapan jenis kecerdasan yang ada pada diri manusia berikut ini:

1. **Kecerdasan Linguistik (Bahasa).** Kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan kata-kata tahu bahasa, penulis, jurnalis, penyair, orator dan pelawak.
2. **Kecerdasan Logika Matematika.** Kemampuan berpikir (menalar), menghitung, berpikir logis, dan sistematis.

3. **Kecerdasan Visual spasial.** Kemampuan berpikir menggunakan gambar, memvisualisasikan hasil masa depan.
4. **Kecerdasan Musikal.** Kemampuan mengubah atau mencipta musik, dapat menyanyi dengan baik, para musisi, kompuser.
5. **Kecerdasan Kinestetik-Tubuh.** Kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk memecahkan masalah, menciptakan produk atau mengemukakan gagasan dan emosi.
6. **Kecerdasan Interpersonal (Sosial).** Kemampuan bekerja secara efektif dengan orang lain, mampu berhubungan dengan orang lain dengan memperlihatkan empati dan pengertian.
7. **Kecerdasan Intrapersonal.** Kemampuan mengenali diri, menganalisis diri, merenungkan diri, mampu merenung dalam kesunyian.
8. **Kecerdasan Naturalis.** Kemampuan mengenal flora dan fauna.

Kecerdasan intelektual sangat berhubungan dengan kemampuan belajar. Kecerdasan Intelektual ini sangat penting dalam meraih kesuksesan, karena sumber utama kebudayaan adalah penciptaan. Inilah keunggulan kecerdasan Intelektual, kecerdasan untuk mencipta, yang dikaruniai oleh Allah kepada manusia.

Dave Meier, (2002:99), menjelaskan bahwa kata “intelektual” bukanlah pendekatan belajar, tetapi menunjukkan apa yang dilakukan pembelajar dalam pikiran mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Intelektual adalah bagian diri yang merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna. **Dave Meier, (2002:270)**, lebih lanjut menjelaskan bahwa kata intelektual berarti melibatkan pikiran untuk menciptakan

pembelajarannya sendiri. Belajar bukanlah menyimpan informasi, melainkan menciptakan makna, pengetahuan, dan nilai yang dapat dipraktikkan oleh pikiran pembelajar (peserta didik). Menciptakan pengetahuan, dan bukan menyimpan informasi, seharusnya merupakan salah satu tujuan utama semua program belajar.

Jadi intelektual adalah penciptaan makna dalam pikiran; sarana yang digunakan manusia untuk “berpikir”, menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan syaraf baru, dan belajar. Ia menghubungkan pengalaman mental, fisik, emosional, dan intuitif tubuh membuat makna baru bagi dirinya sendiri. Belajar adalah sarana yang digunakan pikiran untuk mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. (Meier, 2002:156)

Pengajaran yang berdasarkan inteligensi ganda beranggapan bahwa siswa perlu dibantu dalam proses belajar mengajar dengan metode yang sesuai dengan inteligensi apa yang lebih menonjol dalam diri siswa. Dengan demikian diharapkan setiap siswa dapat lebih mudah menangkap bahan dan juga lebih menyenangkan bahan yang disajikan sesuai dengan inteligesinya yang menonjol. Misalnya, bila siswa menonjol dalam inteligensi musik maka sains dijelaskan dengan menggunakan banyak musik, ritme, atau nyanyian. Bila siswa menonjol dalam inteligensi kinestik-badani maka sains dapat disajikan lebih banyak menggunakan gerakan, dramatisasi, *role playing*. Bila siswa menonjol dalam inteligensi interpersonal, fisika dapat disajikan dengan metode belajar kelompok dengan teman-teman lain. Sangat jelas bahwa dalam pendekatan ini, keadaan siswa lebih ditekankan daripada keadaan guru.

Inteligensi ganda dapat digunakan dalam pembelajaran sains (misalnya Fisika) karena ilmu ini menyelidiki tentang alam fisis yang mempunyai beberapa bahan unsur seperti ruang, gerak, tubuh (fisik) yang dapat diamati, suara/musik yang dapat didengarkan. Bidang fisika yang dipelajari terdiri

dari mekanika yang mempunyai , unsur ruang dan gerak, optika, gelombang dan bunyi yang punya unsur suara dan musik, listrik dan magnet yang juga dapat mengandung unsur suara, musik, ruang dan gerak. Maka dari sudut bahan, jelas fisika dapat dijelaskan dengan inteligensi yang sesuai yaitu inteligensi ruang, kinestik-badani, dan musikal disamping dengan inteligensi linguistik dan matematis-logis yang telah berkembang.

Penggunaan inteligensi matematis-logis memang sangat penting dalam pengembangan ilmu fisika karena fisika memang dikembangkan terutama dengan pemikiran logis dan juga dengan perhitungan-perhitungan matematis. Teori ilmiah yang menggunakan metode deduksi dan induksi semuanya menggunakan logika untuk merumuskan dan menarik kesimpulan. Proses ilmiah yang menjadi cara utama penemuan dan pengembangan ilmu fisika yang memuat proses penyusunan hipotetis, pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan, jelas menggunakan logika sebagai alat utama, sedangkan bahasa memang sangat penting dalam perumusan dan menyajikan hasil-hasil fisika sendiri.

Kecuali itu, subyek yang belajar adalah siswa yang mempunyai relasi dengan siswa lain dan perlu bekerja sama dengan teman lain dalam kelompok kecil maupun besar . Di sini inteligensi interpersonal perlu dikembangkan. Di samping itu, sebagai pribadi setiap siswa juga memerlukan kemampuan untuk berefleksi diri dan mengenal dirinya sehingga dapat mengembangkan kepribadiannya secara mandiri. Setiap siswa perlu menarik manfaat dari apa yang telah ia pelajari bagi hidupnya. Untuk ini diperlukan inteligensi interpersonal.

Dari uraian di atas cukup jelas bahwa baik dari segi bahan yang dipelajari, maupun dari segi cara ilmu itu ditemukan dan dikembangkan, serta dari manusia yang mempelajarinya, fisika cocok untuk dipelajari dengan teori inteligensi ganda. Atau dengan kata lain, teori inteligensi ganda

dapat digunakan untuk mengajarkan fisika kepada siswa yang mempunyai tujuh inteligensi ganda tersebut.

Supaya guru dapat membantu siswa dalam belajar sains dengan teori intelegensi ganda, pertama-tama guru harus mengetahui intelegensi macam apa yang paling banyak dimiliki oleh siswanya. Maka sebelum memulai merencanakan pengajaran dengan intelegensi ganda seorang guru perlu melihat terlebih dahulu siswanya memiliki intelegensi ganda apa. Armstrong (1994) secara singkat dalam buku *Multiple Intelligences in the Classroom* menjelaskan beberapa cara untuk meneliti intelegensi siswa, antara lain melalui tes, mencoba mengajar dengan intelegensi ganda, observasi siswa di kelas, observasi siswa di luar kelas dan mengumpulkan dokumen siswa.

C. Metode Hubungan Kausalitas Menurut John Stuart Mill

Kausalitas merupakan suatu konsep filosofis yang banyak dibahas dalam epistemologi, metafisika, dan filsafat sains. Sulit untuk memberikan definisi netral terhadap konsep ini. Konsep "kausalitas" dalam sejarah filsafat dan sains terkait dengan konsep-konsep seperti "*necessity*", "*universalitas*" "*determinisme*," "*manipulasi*", dan "*probabilitas*." Konsep "*necessity*" atau "*necessary connection*" antara sebab dan akibat, misalnya, menjadi persoalan yang tidak pernah sepi dari perdebatan mulai dari Aristoteles, filosof Muslim sampai filsafat kontemporer.

Kebenaran konsepsi kausalitas diperdebatkan dengan hangat dan sulit menentukannya. Perdebatan ini tidak lepas dari pandangan dunia (*Weltanschauung*) yang mengelilinginya dan seluruh bentuk kebudayaan yang ada. Dalam sejarah filsafat Islam, misalnya, terjadi perdebatan yang sengit antara Al-Ghazali dan Ibn Rusyd mengenai konsep kausalitas yang tidak lepas dari posisi teologis dan kultural dari keduanya.

Dalam sains, kausalitas berfungsi dalam penjelasan saintifik (*scientific explanation*). Eksplanasi saintifik adalah

eksplanasi tentang sebab dan akibat (*causal explanation*). Para saintis meneliti sebab. Mereka melakukan hal itu karena sains berusaha mencari eksplanasi yang juga memungkinkan bagi sains untuk mengontrol dan memprediksi fenomena. Hanya dengan pengetahuan tentang sebab, sains bisa melakukan kontrol dan prediksi fenomena. (Rosenberg, 25).

Pada kehidupan sehari-hari kita sering bertanya mengapa 'sesuatu' terjadi dan apa yang menyebabkannya. Kadang kita juga berfikir apakah hubungan antar dua hal sebagai hubungan sebab akibat atau keduanya atau keduanya terjadi secara kebetulan berurutan/koinidensi, contoh :

1. Subhan mengalami sakit kepala sampai tiga kali dalam sebulan terakhir ini.

Ketika pertama kali sakit ia minum bodrex dengan air dan ia sembuh.

Pada sakit yang kedua ia minum paramex dengan air dan ia juga sembuh

Pada sakit yang ketiga ia minum panadol dengan air dan sembuh juga

Lalu, apakah kita dapat mengatakan bahwa air adalah penyebab kesembuhan Subhan?

2. Ali dan Umar menghadiri pesta pernikahan temannya. Sepulang dari pesta keduanya sakit perut.

Apakah makanan sejenis yang dimakan oleh Ali dan Umar yang menyebabkan mereka sakit perut?

Dari contoh di atas terlihat apakah dua hal atau kejadian sekedar mempunyai relasi yang bersifat kebetulan atau memang mempunyai relasi yang bersifat kausal? Mengingat hal ini bukanlah sesuatu yang sederhana, maka John Stuart Mill mengemukakan metode kausalitasnya.

Kupasan secara sistematis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penentuan adakah relasi kausalitas antara dua hal kejadian atau tidak, dimulai oleh David Hume. Sebagai pendahulu dari John Stuart Mill, David Hume memulai kerjanya dengan melakukan pengamatan. Dari

pengamatannya terkadang ditemukan adanya dua kumpulan data yang berkorelasi. Iapun mengatakan bahwa hubungan kausalitas didasarkan pada korelasi, semakin tinggi korelasi, semakin kentara bahwa dua hal kejadian mempunyai relasi sebab akibat.

Penyebab dan akibat harus mempunyai hubungan satu sama lain sebagai berikut:

- Penyebab selalu ada/terjadi sebelum akibat muncul.
- Penyebab dan akibat selalu ada/terjadi secara berdekatan (*contiguous*) baik dalam dimensi ruang maupun waktu.
- Penyebab dan akibat hanya bisa terjadi berpasangan, atau tidak terjadi sama sekali, artinya bila penyebab ada pasti akibat terjadi dan apabila penyebab tidak ada pasti akibat tidak terjadi.

Analisa David Hume ini ternyata dianggap masih lemah. Oleh karena itu muncullah filsuf Inggris, John Stuart Mill dengan prinsip barunya tentang penentuan hubungan sebab akibat yang lebih konseptual yang mendasarkan diri pada eksperimentasi. Ia berpendapat bahwa kausalitas tidak dapat ditunjukkan tanpa eksperimentasi. Berikut ini empat metode penentuan kausalitas yang dikemukakan John Stuart Mill:

1. Metode Kesamaan (*Method of Agreement*)

Misalnya, 3 dari 5 orang yang datang ke suatu pesta keesokan harinya mual-mual dan muntah. Mengenai hal ini, mungkin kita tidak menolak kalau ada yang berpendapat mereka sakit karena keracunan salah satu makanan yang semalam disantap. Untuk itu kita perlu mendata/menginventarisir makanan apa saja yang mereka makan, misalnya;

- Budi makan ; kambing guling, cumi bakar, sop buntut, rendang dan es kelapa.
- Ilyas makan ; cumi bakar, ayam panggang, gurame bakar, sop buntut dan teh.

- Made makan ; cumi bakar, ayam panggang, rendang, nasi dan es campur.

Dari data di atas, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa penyebab sakit ketiga orang teman tadi adalah cumi bakar, karena ketiganya menyantap itu. Cara kerja inilah yang disebut John Stuart Mill metode kesamaan, yaitu metode penemuan kausalitas dengan mencari kesamaan dari sejumlah data. Lebih jauh John Stuart Mill merumuskan metode ini sbb: Pada kejadian dimana pada situasi yang sama timbul akibat yang sama pula, maka penyebab akan ditemukan pada salah satu atau lebih faktor yang ada pada hal yang sama yang mendahului (*antecedent*) kasus tersebut.

2. Metode Perbedaan (*Method of Difference*)

Misalnya seorang kakak mengantar adiknya yang sakit perut berobat ke dokter. Oleh dokter ditanya, apa yang dimakan oleh kakak dan adik pada saat sarapan. Sang kakak menjawab:

- Saya sarapan susu, nasi dan telur mata sapi
- Adik sarapan susu, nasi dan mie goreng sisa semalam

Dari data di atas dokter berkesimpulan penyebab sakit perutnya adik adalah mie goreng sisa semalam yang dimakannya. Cara kerja ini oleh John Stuart Mill dikatakan sebagai metode penentuan kausalitas dengan mencari perbedaan diantara sejumlah data yang terkumpul. John Stuart Mill merumuskan metode ini sebagai berikut:

Pada kejadian dimana semua ubahan dapat dibuat tetap kecuali satu ubahan. Bila pada saat semua ubahan (termasuk yang dapat dirubah) dipertahankan tetap dan ternyata akibat tidak timbul, sedangkan pada saat satu ubahan diubah (sedang yang lain dipertahankan tetap) ternyata akibat terjadi, maka ubahan yang diubah tersebut adalah penyebab.

3. Metode Variasi Komposisi (*Method of concomitant variation*)

Sebagai ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut: suatu saat setelah acara "lutisan" (lutes adalah makanan kesukaan

orang muda yang terdiri dari buah-buahan segar: jambu kedondong, mentimun, dan sebagainya yang dimakan bersama dengan sambal yang dibuat dari gula jawa dan cabai, cocktail-party ala jawa, yang diselenggarakan oleh siswa pada saat perpisahan, ada 5 siswa mendatangi poliklinik sekolah.

- Siswa I hanya makan buahnya saja tanpa sambal, ybs TIDAK SAKIT;
- Siswa II makan buah dan sambal sedikit, perut ybs. terasa melilit;
- Siswa III makan buah dan sambal cukup banyak, ybs. Buang air besar 1 kali;
- Siswa IV makan buah dan sambal agak banyak, ybs. Buang air besar lebih dari 1 kali;
- Siswa V makan buah dan sambal banyak sekali, ybs. Sakit perut hebat sampai akhirnya dilarikan ke rumah sakit.

Berdasarkan data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab gangguan pencernaan yang dialami para siswa adalah sambal: semakin banyak makan sambal, gangguan yang dialami semakin hebat.

Cara kerja ini dirumuskan oleh John Stuart Mill sebagai metode penentuan kausalitas dengan mencari komposisi di antara sejumlah data yang terkumpul. John Stuart Mill merumuskan metode ini sebagai berikut:

Pada kejadian-kejadian dimana terlibat dua ubahan (variabel), bila takaran (dosis) satu ubahan diubah menyebabkan ubahan yang lain mengalami perubahan pula, maka kedua ubahan tersebut berhubungan satu sama lain dalam hubungan sebab akibat.

4. Metode Sisa (*Methods of Residues*)

Sebagai ilustrasi dapat disajikan kasus sebagai berikut:

Seseorang datang kepada seseorang dokter dengan keluhan merasa pusing berputar-putar setelah makan nasi goreng keping. Setelah mendengar kejadian seputar keluhan yang bersangkutan, sang dokter sampai pada kesimpulan

bahwa sakit ini disebabkan oleh 'salah makan'. Sang pasien mengaku makan nasi goreng kepiting yang cukup pedas dan es campur. Dari pengalaman sang dokter, kepiting yang dicampurkan ke nasi goreng tentu tidak akan banyak sekali, sampai membuat seseorang pusing-pusing, paling-paling gatal-gatal alergi: selain itu rasanya pedas akan membuat orang sakit perut dan bukan pusing-pusing. Oleh sebab itu, sang dokter masih mencari penyebab lain dari makanan yang disantap sang pasien. Dari pembicaraan akhirnya terungkap bahwa sang pasien sebelum minum es campur (dimana dalam campurannya dimasukkan pula tape ketan), sang pasien juga meminum soda gembira (susu dicampur air soda). Dari data baru ini sang dokter sampai pada kesimpulan bahwa rasa pusing sang pasien disebabkan karena mabuk setelah minum susu (dalam soda gembira) bercampur tape ketan. (dalam es campur).

Cara kerja ini dirumuskan oleh John Stuart Mill sebagai metode penentuan kausalitas dengan mencari faktor lain yang kiranya belum terkaji diantara sejumlah data yang terkumpul. John Stuart Mill merumuskan metode ini sebagai berikut:

Pada kejadian dimana masih ada satu gejala yang belum dapat dijelaskan penyebabnya dari suatu kejadian yang secara keseluruhan kejelasannya sudah diketahui dari penelitian sebelumnya, maka gejala yang belum ditemukan penyebabnya tadi diakibatkan oleh anteseden yang ada yang belum diketahui.

D. Kebiasaan Bertanya Dalam Pembelajaran Sains

Untuk melihat dan memahami bagaimana pentingnya peran bertanya bagi guru sains kutipan di bawah ini dapat memberikan gambaran yang nyata yaitu: *To know how to question is to know how to teach, to question well is to teach well, good questions are vital to good teaching and it is impossible to conceive of teaching without asking questions.* (Dillon,1982:128)

Fungsi Bertanya

1. dapat menghasilkan proses kognitif tertentu, misalnya ingatan, pemberian alasan baik induktif maupun deduktif
2. dapat mengarahkan untuk menyelesaikan suatu masalah
3. dapat memberikan motivasi untuk berpikir

Tingkat pertanyaan

1. Ingatan, pertanyaan yang menyangkut dan menyatakan kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya pertanyaan yang menyangkut konsep yang dipelajari dan kemudian anak harus menyebutkan definisinya. Misalnya Apa yang dimaksud dengan fungsi? Apa artinya.....
2. Pemahaman, pertanyaan yang menyangkut kemampuan menangkap arti dari suatu bahan yang telah dipelajari yang terlibat antara lain dalam kemampuan seseorang menafsirkan informasi meramalkan akibat dari suatu peristiwa dan kemampuan lain yang sejenis. Misalnya Apa yang kau simpulkan dari kurva ini?
3. Aplikasi, pertanyaan yang menyangkut kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam memecahkan masalah. Misalnya Berapa panjang batang yang terpanjang dapat ditempatkan dalam suatu kotak dari dimensi $6 \times 4 \times 3$ cm?
4. Menurut Bloom ditambah analisa, pertanyaan yang menyangkut kemampuan menganalisa atau memperinci bahan pelajaran yang telah dipelajari lebih terurai sebagai cara untuk memecahkan masalah.
5. Sintesa, menyangkut kemampuan memadukan bahan pelajaran yang telah dipelajari atau mendapat suatu kesimpulan yang relatif baru yang sebelumnya belum pernah dipelajari.
6. Evaluasi, menyangkut kemampuan menilai suatu situasi yang dihadapi.

Macam-macam Pertanyaan

1. Luas atau sempitnya pertanyaan, disebut sempit bila pertanyaannya sesuai dengan tujuan khusus yang hendak

dicapai dalam situasi belajar mengajar tertentu. Sedangkan luas bila ruang lingkupnya lebih luas untuk mencapai hasil berpikir terbuka. Pertanyaan sempit terdiri dari pertanyaan informasi langsung dan pertanyaan memusat. Pertanyaan luas terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan menilai.

2. Pertanyaan aneka macam, tidak langsung berkaitan dengan bahan

Teknik Menggunakan Pertanyaan

1. Teknik menanti jawaban
2. Teknik penguatan, penguatan verbal dan non verbal
3. Teknik pelacakan

Ketrampilan bertanya dasar, mencakup pertanyaan yang jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan perhatian, pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan (keseluruh kelas, ke peserta didik tertentu dan ke peserta didik lain untuk menanggapi jawaban), pemberian waktu berpikir, pemberian tuntunan (dapat dilakukan dengan mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain, menanyakan dengan pertanyaan yang lebih sederhana dan mengulangi penjelasan sebelumnya)

- a. Pertanyaan yang jelas dan singkat. Pertanyaan perlu disusun secara jelas dan singkat serta harus memperhitungkan kemampuan berpikir dan perbendaharaan kata yang dikuasai peserta didik. Usahakan jangan sampai peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan hanya karena tidak mengerti maksud pertanyaan yang diajukan karena pertanyaan yang panjang dan berbelit-belit.
- b. Memberi acuan, sebelum memberi pertanyaan, guru perlu memberi acuan pertanyaan atau penjelasan singkat berisi informasi yang sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Melalui acuan ini dimungkinkan peserta didik mengolah informasi untuk menemukan jawaban yang tepat. Misalnya; binatang ada yang hidup di darat, air dan udara. Coba berikan contohnya?

- c. Memusatkan perhatian, binatang apa yang hidup di udara tapi kalau siang bergelantungan di pohon?
- d. Memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan, Pemberian giliran dalam menjawab pertanyaan selain untuk melibatkan siswa secara maksimal dalam pembelajaran juga untuk menumbuhkan keberanian siswa serta menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Pemberian giliran dalam menjawab pertanyaan ini tidak harus selesai dalam satu kali pertemuan tapi bisa beberapa kali. Pelaksanaannya dipadukan dengan teknik penyebaran pertanyaan. Pemberian giliran adalah satu soal dijawab bergiliran sedangkan penyebaran beberapa pertanyaan berbeda disebar secara bergilir dan dijawab secara bergilir pula.
- e. Pemberian kesempatan berpikir,

E. Demokrasi Dalam Pendidikan

Isu tentang demokrasi dalam pendidikan di Indonesia memang relatif baru dan belum terbiasa dalam wacana akademik bidang kependidikan. Memang ini gagasan reformasi radikal, namun Indonesia harus memulainya, dan kini gagasan reformasi tersebut memperoleh tempat yang ideal di Indonesia, terutama setelah lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan, pendidikan memasuki era baru dengan semangat demokratis. Persoalan besar dalam UU No. 22 tahun 1999 adalah perubahan radikal dalam otoritas pengembangan pendidikan yang semula berada dalam kekuasaan pemerintah pusat melalui Depdiknasnya, kini terdelegasikan pada pemerintah daerah.

Perubahan radikal tentang pengelolaan pendidikan memperoleh penguatan dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,

nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Poin penting dalam ayat ini adalah penegasan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis artinya bahwa keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya lebih besar daripada pemerintah pusat.

Bersamaan dengan itu pula dalam pasal 9 dinyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka dalam komite sekolah atau dewan pendidikan daerah. Demikian pula dengan evaluasi keberhasilan sekolah, menurut pasal 9 di atas, masyarakat berhak untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah, tidak saja dalam kerangka program pendidikan secara makro, tetapi juga pada wilayah mikro, kebijakan pengembangan sekolah dalam semua aspeknya.

Kemudian pemerintah daerah juga diberi kewenangan oleh undang-undang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 10 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah memberi arah dan wadah pengembangan demokrasi dalam pendidikan atau sekolah yang lebih demokratis, bahkan dalam rumusan tujuan pendidikan dinyatakan secara tegas pada pasal 3 bahwa pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, tapi mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan. Namun secara substantif, demokrasi dalam pendidikan atau sekolah demokrasi adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini James A. Beane dan Michael W. Apple menjelaskan bahwa dalam upaya membangun sekolah demokratis atau demokrasi dalam pendidikan adalah:

1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang biasa menerima informasi seoptimal mungkin.
2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.
3. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.
4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik.
5. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas.
6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang ideal, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia.

7. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempersoalkan dan mengembangkan cara hidup demokrasi.

Inti dari teori James A. Beane dan Michael W. Apple di atas adalah bahwa sekolah demokrasi atau demokrasi dalam pendidikan itu akan terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau semua *stakeholder* sekolah, sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan sekolah, berbagai masalah yang dihadapinya, serta langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh. Dengan demikian, mereka akan bisa menganalisis relevansi kebijakan-kebijakan tersebut, memahami, mengkritisi, dan memberi masukan, serta menentukan kontribusi serta partisipasi yang akan diberikannya untuk kesuksesan pelaksanaan program-program sekolah tersebut. Kemudian tidak cukup hanya sampai disitu, demokrasi dalam pendidikan juga harus dikembangkan dengan sikap *trust* (kepercayaan), juga harus diimbangi dengan perhatian yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia.

James A. Beane dan Michael W. Apple, lebih lanjut mendefinisikan, sekolah demokratis atau demokrasi dalam pendidikan adalah mengimplementasikan pola-pola demokrasi dalam pengelolaan sekolah, yang secara umum mencakup dua aspek yakni struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut. Dengan kata lain, sekolah demokratis atau demokrasi dalam pendidikan adalah sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktek-praktek demokratis itu terlaksana, seperti pelibatan masyarakat (*stakeholder* dan *user* sekolah) dalam membahas program-program sekolah, dan prosedur pengambilan keputusan dengan memperhatikan berbagai aspirasi publik.

Pengembangan sekolah menuju sekolah demokratis, Lyn Haas (1994:21) dalam Rosyada (2004:18), menjelaskan, bahwa sekolah harus dapat memenuhi beberapa kualifikasi ideal, yaitu:

1. Pendidikan untuk semua; yakni semua siswa harus memperoleh perlakuan, pelajaran, kompetensi keilmuan, serta memiliki *basic skill* dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka serta sesuai pula dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
2. Memberikan *skill* dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini, karena pasar menuntut setiap tenaga kerjanya memiliki keterampilan penggunaan teknologi, komunikasi global, matematika, serta kemampuan mengakses pengetahuan.
3. Penekanan pada kerja sama, yakni menekankan pada pengalaman para siswa dalam melakukan kerja sama dengan yang lain, melalui kerja-kerja kelompok dalam proses pembelajaran.
4. Pengembangan kecerdasan ganda; yakni bahwa para siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan *multiple intelligence* mereka, dengan memberi peluang untuk mengembangkan *skill* dan keterampilan yang beragam.
5. Integrasi program pendidikan dengan kegiatan pada pengabdian pada masyarakat, agar mereka memiliki kepekaan sosial.

Kelima poin di atas memperlihatkan adanya tuntutan kurikulum yang dinamis, progresif, dan peka terhadap berbagai kemajuan dan perkembangan teknologi di luar sekolah, sebaliknya jika kurikulum dan perencanaan sekolah itu sangat ditentukan oleh struktur birokrasi yang kaku, sekolah biasa tertinggal oleh kemajuan, dan sekolah akan kehilangan relevansinya dengan berbagai perubahan, yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh *stakeholder*-nya sendiri. Oleh sebab itu, argumen-argumen di atas memperkuat bahwa model sekolah demokratis atau demokrasi dalam pendidikan itu amat relevan untuk dikembangkan.

John I. Goodlad dalam Rosyada (2004:19) menjelaskan bahwa terpenuhinya misi pendidikan sangat tergantung pada kemampuan guru untuk menanamkan *setting* demokrasi pada

siswa, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk belajar. Jadi sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk semaksimal mungkin mereka belajar. Sekolah bukan tempat pertunjukan bagi guru, tetapi tempat siswa untuk menambah dan memperkaya pengalaman belajarnya. Oleh sebab itu, guru harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang memberi peluang lebih besar bagi siswa untuk belajar. Jadi demokrasi dalam pendidikan, yakni sekolah itu untuk siswa bukan untuk guru dan kepala sekolah. Sekolah harus menjadi *second home* bagi para siswa, mereka betah menghabiskan waktunya di sekolah dengan belajar, berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas kelompok, membaca, dan aktifitas pembelajaran lainnya.

Pandangan yang senada dikemukakan oleh Jerry Aldridge dan Renitta Goldman (2002:103) yang menurutnya, belajar itu harus memberi peluang besar bagi anak untuk berpikir, bekerja dan biarkan mereka bergerak, terutama bagi anak-anak yang membangun keilmuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Pengetahuan apa saja, matematika, sosial atau lainnya, akan lebih efektif dengan pendekatan aktivitas. Model pembelajaran humanis ini hanya terwadahi dalam model sekolah demokratis atau demokrasi dalam pendidikan, yakni pendidikan dengan konsep bahwa sekolah itu untuk siswa atau pembelajar, bukan untuk guru mempertontonkan kepintarannya dihadapan siswa dan membiarkan siswa jadi penonton.

Dwight W. Allen (1992:86) menjelaskan bahwa sekolah untuk abad ke-21 dalam kerangka penguatan model sekolah demokratis atau membangun demokrasi dalam pendidikan antara lain :

1. Akuntabilitas; yakni bahwa kebijakan-kebijakan sekolah dalam semua aspeknya dapat dipertanggung jawabkan pada publik. Dan dalam konteks akuntabilitas juga, sekolah demokrasi selalu menjunjung tinggi *collective judgement*, yakni keputusan diambil bersama-sama.

2. Pelaksanaan tugas guru senantiasa berorientasi pada siswa, guru akan memberikan pelayanan pada siswa secara individual.
3. Keterlibatan masyarakat dalam sekolah; yakni dalam sekolah demokratis, sistem pendidikan merupakan refleksi dari keinginan masyarakat.

Dalam kerangka sekolah demokratis, setiap guru dan pimpinan sekolah harus siap untuk dievaluasi, diberi masukan, dan dikritik secara positif, baik oleh siswa maupun orang tua siswa, sehingga mereka benar-benar menjadi profesional.

John Dewey dalam bukunya *Democracy and Education* menyampaikan pesan revolusioner: masyarakat yang demokratis harus menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warganya serta kualitas pendidikan yang sama. Dikatakan, hasil pendidikan yang demokratis meningkatkan kesadaran dan keterlibatan rakyat dalam pemilu sehingga tinggi-rendahnya partisipasi warga dalam pemilu mencerminkan kualitas sistem pendidikan nasional. Hakikat pendidikan yang demokratis adalah pemerdekaan. Tujuan pendidikan dalam suatu negara yang demokratis adalah: membebaskan anak bangsa dari kebodohan, kemiskinan, dan berbagai "perbudakan" lainnya. Pendidikan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting.

F. Diskusi Sebagai Bentuk Latihan Intelektual

Tuntutan dalam dunia pendidikan sudah banyak berubah. Kita tidak bisa lagi mempertahankan paradigma lama tersebut. Teori, penelitian, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran membuktikan bahwa para guru dan dosen sudah harus mengubah paradigma pengajaran. Pendidik perlu menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan beberapa pokok pemikiran dengan pendekatan

pengkajian dan diskusi sebagai bentuk latihan intelektual sebagai berikut.

1. Pengetahuan ditemukan, dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa. Guru menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu proses belajar.
2. Siswa membangun pengetahuan secara aktif. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan siswa, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. Siswa tidak menerima pengetahuan dari guru atau kurikulum secara pasif. Teori skemata menjelaskan bahwa siswa mengaktifkan struktur kognitif mereka dan membangun struktur-struktur baru untuk mengakomodasi masukan-masukan pengetahuan yang baru. Jadi penyusunan pengetahuan yang terus-menerus menempatkan siswa sebagai peserta aktif.
3. Guru perlu berusaha mengembangkan kompetensi dan kemampuan siswa. Kegiatan pembelajaran harus lebih menekankan pada proses dari pada hasil. Setiap orang pasti mempunyai potensi. Paradigma baru mengembangkan kompetensi dan potensi siswa berdasarkan asumsi bahwa usaha dan pendidikan bisa meningkatkan kompetensi siswa sampai setinggi yang dia bisa.
4. Pendidikan adalah interaksi pribadi di antara para siswa dan interaksi antara guru dan siswa. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses sosial yang tidak dapat terjadi tanpa interaksi antarpribadi. Belajar adalah suatu proses pribadi, tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika masing-masing orang berhubungan dengan yang lain dan membangun pengertian dan pengetahuan bersama.

Walaupun sudah disadari bahwa siswa mendapatkan banyak keuntungan dari diskusi yang mengaktifkan siswa, tidak banyak guru yang melakukannya. Strategi yang paling sering digunakan untuk mengaktifkan siswa adalah melibatkan siswa dalam diskusi dengan seluruh kelas. Tetapi, strategi ini tidak terlalu efektif walaupun guru sudah berusaha

mendorong siswa untuk berpartisipasi. Kebanyakan siswa terpaksa menjadi penonton sementara arena kelas dikuasai oleh hanya segelintir orang. Diskusi yang banyak dikembangkan oleh guru seperti yang disebutkan di atas adalah bukan diskusi yang dapat mengantar siswa secara bersama untuk mengembangkan intelektual mereka.

Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa yang dimaksud adalah diskusi dengan model *Cooperative Learning*, sehingga siswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksi ini, siswa akan membentuk komunitas yang memungkinkan mereka untuk mencintai proses belajar dan mencintai satu sama lain. Dalam paradigma lama suasana belajar penuh dengan persaingan dan pengisolasian siswa, sikap dan hubungan yang negatif akan terbentuk dan mematikan semangat siswa. Suasana seperti ini akan menghambat pembentukan pengetahuan secara aktif. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar sedemikian rupa sehingga siswa dapat membangun pengetahuan secara bersama lewat diskusi dan pengkajian secara aktif.

Sangat banyak penelitian yang dilakukan terpisah oleh orang-orang yang berbeda dalam konteks yang berlainan mengenai penggunaan metode pembelajaran diskusi dengan pendekatan *cooperative learning*. Pada umumnya hasil-hasil penelitian tersebut mendukung penggunaan metode diskusi dengan pendekatan model *cooperative learning*. Data tersebut menunjukkan bahwa suasana belajar dengan pendekatan model *cooperative learning* menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, hubungan yang lebih positif, dan penyesuaian psikologi yang lebih baik dari pada suasana belajar yang penuh dengan persaingan dan memisahkan-memisahkan siswa.

Pada abad 21 ini, perlu adanya perubahan paradigma dalam menelaah proses belajar siswa dan interaksi antara siswa dan guru. Sudah seyogianyalah kegiatan pembelajaran juga lebih mempertimbangkan siswa. Siswa bukanlah sebuah botol

kosong yang bisa diisi dengan muatan-muatan informasi apa saja yang dianggap perlu oleh guru. Selain itu, alur proses belajar tidak harus berasal dari guru menuju siswa. Siswa bisa juga saling mengajar dengan sesama siswa yang lainnya. Bahkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (*peer teaching*) ternyata lebih efektif dari pada pengajaran oleh guru.

Dalam cerita 1001 malam, digambarkan keunikan cara pengajaran Nasaruddin, sang guru. Pada suatu hari, Nasaruddin memasuki ruang kelas dan menanyakan kepada para siswanya, "Tahukah anda apa yang akan saya ajar hari ini"?

Tentu saja, seperti biasa diduga, para siswa menjawab, "tidak tahu" Nasaruddin lalu berkata, "jika tidak tahu, percuma saya mengajar kalian" dan ia segera meninggalkan ruang kelas. Keesokan harinya, Nasaruddin menanyakan hal yang sama. Kali ini para siswa menjawab, "ya, tahu, Pak" Nasaruddin menanggapi, "Karena kalian sudah tahu, tidak ada gunanya saya mengajar kalian hari ini."

Pada hari ketiga, Nasaruddin kembali menanyakan hal yang sama. Berdasarkan pengalaman siswa pada dua hari sebelumnya, para siswa yang kebingungan itu memberi jawaban yang berbeda. Separuh kelas menjawab, "Ya" dan separuh lainnya menjawab, "Tidak." Dengan tenangnya Nasaruddin berkata, "Baiklah jika demikian, saya minta kalian yang tahu harap memberi tahu yang lainnya yang belum tahu."

Cerita ini bisa saja diinterpretasikan sebagai gambaran mengenai kemalasan seorang guru yang enggan mengajar. Terlepas dari motivasi Nasaruddin yang sebenarnya, ada perspektif lain yang bisa digunakan untuk memahami cerita ini. Siswa bukanlah sebuah botol kosong yang bisa diisi dengan muatan-muatan informasi apa saja yang dianggap perlu oleh guru. Selain itu, alur proses belajar tidak harus berasal dari guru menuju siswa. Siswa bisa juga saling mengajar, saling memberi dalam bahasa lain Diskusi sesama siswa yang lainnya.

Contoh Metode Diskusi Sebagai Bentuk Latihan Intelektual

1. Mencari pasangan

Apa itu Mencari Pasangan?

Teknik belajar mencari pasangan (*Make a Match*) dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia peserta didik.

Bagaimana Caranya?

- a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik.
- b. Setiap siswa mendapat satu buah kartu
- c. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Misalnya SBY berpasangan Presiden, Taufiq Hidayat berpasangan Bulutangkis
- d. Siswa bisa juga bergabung dengan dua atau tiga siswa lain yang memegang kartu yang cocok, misalnya pemegang kartu 3+9 akan membentuk kelompok dengan pemegang kartu 3x4 dan 24:2.

2. Dua Tinggal Dua Tamu

Apa itu Dua Tinggal Dua Tamu?

Teknik belajar Dua Tinggal Dua Tamu (*Two Stay Two Stray*) dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992) Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Struktur Dua Tinggal Dua Tamu memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain.

Bagaimana Caranya?

- a. Siswa bekerjasama dalam kelompok berempat seperti biasa.
- b. Setelah selesai, dua orang masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua kelompok yang lain.

- c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas menerima tamu dan membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka.
- d. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka.

3. Jigsaw

Apa itu Jigsaw?

Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et al. Teknik ini bisa digunakan seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama. Teknik cocok untuk semua kelas atau tingkatan.

Bagaimana caranya?

- a. Guru membagi bahan pengajaran menjadi empat bagian.
- b. Sebelum bahan pelajaran diberikan, guru memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran harus itu. Diawali dengan kegiatan *brainstorming* ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap menghadapi pelajaran yang baru.
- c. Siswa dibagi dalam kelompok berempat
- d. Bagian pertama bahan pelajaran diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua, demikian seterusnya.
- e. Kemudian, siswa diminta membaca/mengerjakan bagian mereka masing-masing.
- f. Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dibaca/dikerjakan masing-masing. Dalam kegiatan ini, siswa bisa saling melengkapi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
- g. Kegiatan ini bias diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan dengan pasangan atau dengan seluruh kelas.

Contoh Pengkajian sebagai Bentuk Latihan Intelektual

Seorang guru yang mengajar berhitung untuk kelas 3 SD, masuk kelas memberi tugas pada muridnya. Anak-anak, sekarang kita belajar berhitung kata guru, tujuan pengajaran yang diinginkan oleh guru adalah mereka menyelesaikan pekerjaan menghitung dengan mengkaji cara yang termuda untuk menyelesaikan hitungan tersebut, tentunya dengan memfungsikan kedua belahan otaknya. Perintah sang guru Jumlahkan bilangan berikut ini. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots$ dan seterusnya sampai terakhir tambah 2000! Guru berpikir bahwa anak-anak tidak akan mampu menyelesaikan tugas tersebut bila hanya ia menggunakan belahan otak kirinya atau rasionya saja untuk menjumlahkan bilangan 1 sampai 2000 dalam waktu 2 jam bahkan jika memakai kalkulator sekali pun. Tetapi jika siswa mengkaji dengan menggunakan kedua belahan otaknya, maka ia dapat menyelesaikan dengan cepat hanya dalam waktu sekitar satu menit.

Ternyata dugaan guru benar murid dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat sekali. Ia mengatakan bahwa jawaban dari soal itu adalah 2.001.000. Bagaimana caranya?

Caranya kata murid adalah: Jumlahkan angka yang pertama dengan angka yang terakhir. Akan diperoleh :

$$1 + 2000 = 2001$$

$$2 + 1999 = 2001$$

$$3 + 1998 = 2001 \text{ dan seterusnya}$$

Sehingga kita peroleh jawaban $2001 \times 1000 = 2001.000$.

Pada situasi yang membosankan dan jenuh, terkadang otak bekerja secara negatif. Misalkan pada siang hari yang panas, siswa diminta menyelesaikan soal-soal berhitung sebagai berikut:

$$25^2 = \dots\dots\dots$$

$$45^2 = \dots\dots\dots$$

$$95^2 = \dots\dots\dots$$

$$47 \times 43 = \dots\dots\dots$$

$$84 \times 86 = \dots\dots\dots$$

Apa kira-kira yang siswa rasakan? Mungkin malas, bosan, atau jenuh. Dari hari ke hari siswa dihadapkan pada persoalan yang seperti itu, monoton. Sebaliknya, bila otak dibuat tergugah, termotivasi, terpancing, dan bersemangat, maka siswa akan mampu menyelesaikan beragam persoalan dengan lebih baik. Misalkan contoh soal di atas, siswa diberikan alternatif penyelesaian yang lebih menarik, kreatif dan cepat. Maka siswa akan lebih bersemangat.

Coba cara berikut ini :

$$25^2 = 625 \text{ diperoleh dari } 2 \times (2+1) = 6 \text{ dan } 5^2 = 25 \text{ menjadi } 625$$

$$45^2 = 2025 \text{ diperoleh dari } 4 \times (4+1) = 20 \text{ dan } 5^2 = 25 \text{ menjadi } 2025$$

$$95^2 = 9025 \text{ diperoleh dari } 9 \times (9+1) = 90 \text{ dan } 5^2 = 25 \text{ menjadi } 9025$$

$$47 \times 43 = 2021 \text{ diperoleh dari } 4 \times (4+1) = 20 \text{ dan } 7 \times 3 = 21 \text{ menjadi } 2021$$

$$84 \times 86 = 7224 \text{ diperoleh dari } 8 \times (8+1) = 72 \text{ dan } 4 \times 6 = 24 \text{ menjadi } 7224$$

Jika contoh-contoh perhitungan seperti di atas disajikan dengan cara yang lebih kreatif lagi? Mungkin siswa akan lebih berminat dan menyukai berhitung. Bila otak sudah mendukung, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menggairahkan.

Guru dapat membangkitkan emosi positif siswa dalam belajar dengan menggunakan bantuan visualisasi. Bahkan belajar berhitung dapat divisualisasikan sehingga menjadi menarik. Misalnya guru dapat menggunakan gambar-gambar bintang yang terdiri dari gambar panah untuk menyelesaikan soal perkalian dengan cepat dan mudah. Bahkan lebih cepat dan lebih mudah dibanding dengan menggunakan sempoa.

Visualisasikan urutan gambar-gambar bintang di atas. Untuk berhitung cepat, caranya sederhana. Misalnya siswa akan menghitung 2 angka \times 2 angka gunakan barisan bintang 2 yang terdiri dari bintang 1, 2, 1. Jika siswa akan menghitung 3 angka \times 3 angka gunakan barisan bintang 3 yang terdiri dari bintang 1, 2, 3, 2, 1.

Belajar kata umum dan kata khusus. Dibutuhkan pengkajian dengan menggunakan dua kemampuan yang ada pada diri manusia yaitu kemampuan otak kiri dan otak kanan secara bersama-sama dan ternyata mendapatkan hasil yang sangat efektif dan menyenangkan. Agar lebih bersemangat dan menarik, pernyataan-pernyataan dapat divariasikan seperti contoh berikut:

Pilihlah kata yang berbeda di antara yang tersedia berikut ini:

1. a) Kuda b) Sapi c) Hewan d.) Ayam
e) Semut
2. a) Mawar b) Bunga c) Anggerek d) Melati
e) Dahlia
3. a) Kota b) Bandung c) Makassar d) Jakarta
e) Dempasar

Dipersilahkan siswa memilih jawaban dan bebas merangkai alasannya. Siswa yang satu dengan siswa yang lain boleh berbeda, bahkan siswa dapat berdiskusi tentang pilihan jawaban dan menyampaikan alasan yang logis. Salah satu jawaban yang mungkin benar dan dapat disepakati siswa dengan argumentasi yang logis adalah:

Hewan, karena hewan kata umum yang mencakup kata khusus yang lain : Kuda, Sapi, Ayam, Semut.

Bunga, karena bunga kata umum yang mencakup kata khusus yang lain : Mawar, Anggerek, Melati, Dahlia.

Kota, karena kota kata umum yang mencakup kata khusus yang lain : Bandung, Makassar, Jakarta, Dempasar.

Dengan pengkajian sederhana seperti di atas siswa atau seorang siswa menjadi lebih mudah memahami kata umum dan kata khusus. Apalagi kata soal di atas dikemas dan disampaikan dengan gaya kuis seperti kuis di TV, pasti lebih menarik dan siswa akan lebih termotivasi untuk belajar lebih

intensif lagi. Agar lebih bersemangat dan menarik, pernyataan-pernyataannya dapat divariasikan seperti contoh berikut.

Pilih kata yang berbeda di antara kata yang tersedia!

1. a) IEM b) NALUB c) ILUJ d) INUJ
e) LIRPA
2. a) AEMRH b) IUKNNG c) IUPTH d) IUBR
e) AAWRN
3. a) AUUPL b) AAJW c) AIBL d) AUUMLK
e) AAUMDR

Siswa dipersilahkan menemukan jawabannya, menurut kemampuan siswa masing-masing, atau siswa diminta mengkaji dengan mendiskusikannya. Kemudian hasil diskusi disampaikan atau dipaparkan dengan argumentasi yang logis dari masing-masing siswa, seperti berikut ini:

NALUB (BULAN), karena NALUB kata umum yang mencakup kata khusus yang lain : IEM, ILUJ, INUJ, LIRPA

AAWRN (WARNA), karena AAWRN kata umum yang mencakup kata khusus yang lain : AEMRH, IUKNNG, IUPTH, IUBR

AUUPL (PULAU), karena AUUPL kata umum yang mencakup kata khusus yang lain : AAJW, AIBL, AUUMLK, AAUMDR

Contoh-contoh di atas dapat dikembangkan sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Berdasarkan pengalaman di lapangan, cara-cara belajar dengan mengaktifkan siswa berdiskusi dan mengkaji pelajaran masing-masing sebagai bentuk latihan intelektual seperti yang dicontohkan di atas benar-benar efektif.

G. Latihan dan Pembiasaan

Tentang hal ini kami mengambil satu contoh yaitu 'puasa' pengenalan/persiapan/latihan berpuasa "non fisik" bisa dilakukan secara serius sejak usia dini ketika anak memasuki tahapan pembentukan *self concept/self regulate*

(biasanya dikala anak belajar *potty training*, umumnya usia 3-4 tahun). Bentuk pengenalannya beragam dan setiap momen bisa dijadikan ajang pembelajaran bagi si anak. Misalnya anak dapat mulai diajarkan untuk bisa menahan nafsu dan mengendalikan dirinya sendiri (*self control*). Bentuknya dari hal-hal kecil seperti belajar menunggu dan menanti giliran; belajar menyelesaikan permasalahan sendiri; belajar mengendalikan emosinya sendiri, dll. Contoh-contoh praktis seperti membuat jadwal rutinitas sehari-hari yang diakomodasikan dengan suasana Ramadan, merupakan awal pembelajaran yang baik bagi anak. Setiap aktivitas dalam *schedule* si anak bisa dikaitkan dengan proses pembelajaran beribadah/berpuasa dibulan Ramadan.

Contoh sederhana lainnya, bila pergi ke mall dan anak merengek minta mainan yang diinginkannya. Momen ini bisa dijadikan ajang pembelajaran berpuasa, walau kiranya ortu mampu membelikan mainan tersebut pada saat itu juga ada baiknya pembelian mainan ditunda dan anak diajarkan kesabaran untuk menunggu. Ajak anak untuk menunda keinginannya (waktu bisa ditentukan bersama anak). Bila anak sudah cukup besar dan sudah mengenal konsep waktu secara lebih baik, maka penundaan ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan latihan latihan ibadah Ramadan. Dengan *reward* mainan yang diinginkannya sebagai hadiah lebaran bagi anak.

Berbagai hal sederhana lainnya dalam keseharian seperti misalnya: Menahan marah; berusaha untuk tidak gampang ngamuk/ngambek; tidak membuat orang lain marah/atau susah (terutama ortu) berusaha memenuhi kewajibannya sehari-hari sampai hal yang kecil dan simple saja seperti mengajarkan anak untuk bisa menunda membuka bungkus permen yang diinginkannya (misalnya ditunda selama 15 menit, 30 menit sampai satu jam saja (ini sudah luar biasa perjuangan batin untuk *wrap or unwrap the candy* buat si

anak) dapat dijadikan sebagai bagian dari pendidikan dan pengenalan ibadah Ramadan.

Bentuk latihan lainnya adalah beramal dan berbuat baik melalui *modelling* yang dilakukan orangtua. Kalau mau lebih efektif ini bisa dibuatkan perencanaan yang lebih kongkrit dimana target dan tujuan pembelajaran selama bulan Ramadan dirinci secara tertulis dan *welorganized*. Untuk mendeteksi *progress* dari pembelajaran dapat dibuatkan sistem *tracking* dan evaluasi yang sederhana. Misalnya dibuatkan *chart* bagi si anak untuk segala kemandiriannya dalam melakukan amal kebaikan. Bagi suatu amal kebaikan yang dilakukannya tanpa disuruh (*independently* atas inisiatif sendiri) diberikan *score* 5, dimana kemandiriannya untuk berbuat baik bernilai paling tinggi (5 *stars*), kalau perilaku tersebut memerlukan *prompt*/diingatkan 1 kali (4 *stars*), dan seterusnya. Apabila diingatkan sampail 4 kali (1 *star* saja). Sedangkan bila pengingatan dilakukan lebih dari 4 kali tidak ada *star* yang diberikan. Lantas akhir Ramadhan *stars*-nya dihitung dan bisa ditukar dengan *reward*. Inti dari aktivitas ini adalah mengajarkan bahwa ibadah dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T di dalam Islam adalah merupakan tanggung jawab masing-masing individu muslimin. Konsep dasar ini bisa diajarkan sejak dini pada anak dengan latihan-latihan dan pembiasaan untuk selalu bertanggung jawab terhadap perilaku dirinya sendiri.

Kreatifitas dalam pelaksanaan pendidikan ini bisa bervariasi. Yang jelas proses persiapan ini baiknya diupayakan tidak membebani anak dan ditekankan pada tanggung jawab dan konsekuensi "pribadi" yang konsisten. Jadi anak melakukannya dengan senang hati dan memiliki internal motivasi yang kuat untuk menjadikannya suatu kebiasaan yang baik.

Pengenalan/persiapan/latihan berpuasa "fisik" pengenalan ibadah berpuasa "fisik" (menahan nafsu, lapar dan haus) bisa dilakukan pada umur 4 tahun, dimana anak

umumnya usia segitu sudah disapih. Jadi kebutuhan gizi dan nutrisinya bisa dipenuhi dalam pola makanan keseharian secara maksimal. Tentunya setiap tahapan usia tumbuh kembang memiliki tahapan latihan dan persiapan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing anak. Tahapan proses belajar ibadah berpuasa secara fisik dimulai dengan 1) Pengenalan konsep dan pembiasaan ritual (Termasuk didalamnya pengenalan istilah istilah dan aturan keagamaan); 2) Persiapan dan latihan fisik. Cara mengajarkan dan memperkenalkan berpuasa pun bisa bermacam macam. Beberapa contoh sebagai berikut :
Pengenalan ritual ibadah berpuasa (Sahur, ifthar, menahan lapar/haus/nafsu)

Untuk anak berusia dini 4-6 tahun, sangat minimum kenalkan jadwal dan ritual ibadah berpuasa. Kapan waktu sahur, kapan waktu berbuka, kapan waktu shalat Eid, kapan waktu berzakat dan lain-lainnya. Ciptakan kebiasaan-kebiasaan dari hal yang paling sederhana, misalnya ajak anak untuk selalu ikut duduk bersama dan merasakan ritual berbuka puasa (walau dia sudah makan sebelumnya). Ubah beberapa jadwal makan-nya mengakomodasikan jadwal ritual berpuasa. Misalnya jam makan malam atau jam makan ringannya disesuaikan dengan jam berbuka puasa. Jadi walau si anak sendiri tidak diharuskan berpuasa tetapi kesertaannya dalam ritual berpuasa menjadikan ajang pembelajaran dasar bagi konsep berpuasa yang lebih tinggi levelnya. Ajak dan sertakan anak bila ada kesempatan berbuka puasa bersama ditempat umum(di mesjid/dengan sanak saudara, sertakan si anak dan lain-lain). Hal ini membantu penciptaan budaya Ramadan dan pengalaman Ramadan yang spesial bagi anak. Gunakan dan biasakan anak dengan istilah-istilah ritual ramadan sesuai dengan pemahaman anak, istilah -istilah seperti sahur, imsak, puasa, berbuka puasa (ifthar), sedekah, amal, zakat dan lain-lain sudah dapat dikenalkan dalam tahap yang sederhana yang sesuai dengan usia mereka.

Ciptakan kebiasaan berpuasa dengan menggunakan istilah berpuasa pada anak. Misalnya walau anak tidak/belum berpuasa layaknya orang dewasa, jeda antara jam makan/minum/waktu makanan ringan baginya bisa disebut sebagai puasa-nya ala si anak. Misalnya setelah sarapan anak "berpuasa" sampai dengan waktu makan siangnya. Dalam jeda ini peringatan tentang fungsi puasa dapat selalu diingatkan kepada anak. Lantas ketika waktu makan siang tiba "anak berbuka puasa", dan "berpuasa" kembali sampai tiba makan malam yang sudah disesuaikan jadwalnya dengan jadwal berbuka secara umum. Pengulangan dan pemahaman bahwa kelak bila ia besar (baliq) menjadi suatu kewajiban penting untuk kerap diingatkan pada anak. Ini dapat membantunya mempersiapkan dirinya sendiri (*self regulating*) untuk mulai menciptakan internal motivasi dalam menjalani kewajiban berpuasa ketika baliq nantinya. Hal ini mungkin kelihatannya sepele, tapi pengalaman-pengalaman "berpuasa" secara fisik ini menjadikan suatu hal yang "penting" bagi si anak tanpa dia harus merasa terbebani dan dipaksa-paksa. Secara psikologis pun penerapan ini dapat membantu pembentukan jati diri sebagai muslim yang kuat. Si anak dapat merasakan keterlibatan dan keterkaitannya termasuk dengan ritual keagamaan. Dan dapat memiliki rasa bangga terhadap agama dan budaya dalam keluarganya.

Kalau anak sudah agak besar bisa mulai diajak untuk ritual sahur bersama, mulai diajak dan dicoba dibangun ketika sahur (biasanya usia 6 tahun ke atas ini sudah bisa diterapkan pelan-pelan). Sese kali bangun (banyakan nggak bangunnya) ya nggak apa-apa, in some cases banyak anak yang suka dengan "pola khusus dan baru" jadi berpuasa merupakan hal yang cukup istimewa dimana dia bisa partisipasi melakukan hal yang sama dengan orang dewasa. Kalau pas sahur mau ikut makan ya boleh, nggak juga nggak apa-apa yang jelas tidak ada pemaksaan. Penerapan kebiasaan ini pun baik untuk mulai membiasakan dan mengenalkan ritual

bangun pagi untuk shallat subuh. Banyak orangtua yang membangunkan anaknya sudah hampir dekat imsak (jadi anak nggak tunggu terlalu lama untuk shallat subuh setelah sahur). Akomodasi-akomodasi dapat dilakukan supaya anak tidak merasa terbebani. Bila anak lantas tidur lagi setelah shallat subuh ya nggak apa-apa...Notes: Crankyness dipagi hari should be expected pada awal-awalnya..=).(ortu musti sabar & musti konsisten), lama-lama anak akan menjadi biasa juga (anak itu cepat beradaptasi loh biasanya).

Pengenalan konsep waktu dan disiplin dalam berpuasa

Bila anak sudah mulai besar 6 keatas, ada baiknya mengajak anak untuk mencoba berpartisipasi dalam berpuasa. Ajak anak menentukan berapa lama dia mau berpuasa. Bisa mulai dari hitungan jam sampai dengan hitungan hari (lamanya berpuasa) : $\frac{1}{4}$ hari, $\frac{1}{2}$ hari, $\frac{3}{4}$ hari dan full day. NOTES: Jeda/waktu si anak berpuasa usahakan konsisten, misalnya anak berjanji dan menentukan akan berpuasa selama 1 jam lamanya, lantas baru $\frac{1}{2}$ jam sudah laper lagi (hehhhehe..biasa toh namanya juga anak-anak) or pingin snack, ingatkan anak terhadap perjanjiannya dan usahakan "nylimur" secara baik-baik dengan berbagai aktivitas positif sampai 1 jam terpenuhi. Ini bagus untuk melatih kesabaran si anak dan juga melatih "delay rewarding" (kemampuan menunggu giliran). Orangtua pun harus konsisten kalau 1 jam sudah terpenuhi tapi anak masih asik main ya jangan lantas dibiarin aja dan diem-diem aja biar sampe beduk gitu..ya jangan nanti anak nggak percaya lagi sama kita. Baiknya anak diingatkan sudah 1 jam nih, mau diterusin puasanya apa gimana? Jadi si anak juga aware dengan konsep waktu dalam berpuasa (dan juga respect terhadap waktu dan terhadap konsistensi /komitmen).

Secara kesehatan dan tumbuh kembang, anak tidak akan mengalami masalah besar dalam belajar berpuasa, asalkan semua gizi dan nutrisi yang diperlukannya tetap terpenuhi (waktu sahur/berbuka dan jeda antara sahur dan berbuka kan bisa dipakai untuk pemenuhan kebutuhann ini).

Kalaupun ada gangguan/perubahan dari pola tidur dan pola makan ini pun tidak akan berpengaruh terlalu banyak dalam proses tumbuh kembang si anak. Malah ketrampilan beradaptasi pada anak dapat dilatih pada bulan Ramadan. Karena dalam kenyataan hidup kadang memang kan kita selalu harus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan hal-hal baru..latihan ini tidak menimbulkan dampak besar terhadap proses tumbuh kembang anak karena kan hanya dilakukan dalam periode satu bulan dan sekali dalam satu tahun saja. Jadi kekhawatiran anak menjadi kurang gizi atau mengganggu kesehatannya memang tidak tepat dan bisa diantisipasi melalui perencanaan yang baik dan matang.

Baiknya pada awal Ramadan bersama anak kita biasakan untuk menententukan "target" yang akan dicapai pada Ramadan tsb. Misalnya kalau tahun lalu belum mulai puasa fisik, mungkin tahun ini bisa dimulai target puasa fisik dengan waktu yang ditentukan secara bertahap. Target ibadah lainnya seperti shallat atau menghafal bacaan shallat (kalau belum bisa) atau menghafal doa/baca qur'an, shallat berjamaah dll bisa juga dibuatkan dan diusahakan untuk dicapai pada Ramadan setiap tahunnya.

Jadi memang secara umum pengenalan beribadah puasa dan beribadah di bulan Ramadhan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dalam bentuk segala rupa. Yang jelas pengenalan dan pendidikan ibadah berpuasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan sebaiknya dilakukan secara konsisten. Misalnya kalau sudah dimulai pada usia 4 ya terus konsisten lakukan tiap tahun setelah itu dan terus sampai si anak masuk usia baliq lantas berubah menjadi kewajiban. Tentunya setiap tahun pengajaran dan targetnya pun berbeda disesuaikan dengan perkembangan pertumbuhan anak).

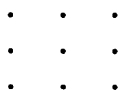
Diharapkan dengan membiasakan dan mengenalkan sejak dini, dikala anak memasuki usia "Wajib" (ketika mereka masuk baliq), ibadah berpuasa merupakan suatu hal yang

normal dan wajar bagi mereka dan relatively tidak canggung/sulit untuk dilakukan. Yang jelas jangan sampai ada pemaksaan ketika kita memperkenalkan dan mulai mengajarkan ibadah ini, karena persepsi awal merupakan hal penting.

Kalau anak sudah resistan pada awal (karena adanya pemaksaan) maka ibadah berpuasa menjadi suatu beban yang tidak menyenangkan bagi si anak. Dan internal motivasi akan sulit diciptakan. Bila pemaksaan berlangsung terus menerus dan resistansi menjadi sangat tinggi, maka anak melakukan "puasa" karena takut dan bukan karena memahami fungsi dan tujuan berpuasa. Biasanya dikala masuk masa baliq/pubertas, resistansi tsb berubah menjadi suatu beban atau bahkan hal yang "dibenci" anak. Sehingga seringkali bentuk pemberontakannya adalah puasa dirumah (dimata orangtua) saja asal aman, atau sampai dewasa anak berpuasa ya hanya karena dia "harus" berpuasa tanpa memahami apa maksud dan fungsi dari puasa tsb. Apabila ini terjadi sangatlah disayangkan, karena ketrampilan utama "mengendalikan diri" dan kesempatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhannya tidak dapat dipelajari dan dikuasainya dengan baik. (Audzubillah minzalik, semoga anak-anak kita terhindar dari situasi ini).

H. Tantangan Berfikir dan Pengembangan Intelektual

Apakah Berpikir itu? Berpikir adalah melibatkan semua proses yang disebut dengan sensasi, persepsi, dan memori. Perhatikan secara seksama visualisasi di bawa ini, ada sembilan titik yang disusun dalam bentuk segi empat. Hubungkan titik-titik itu dengan menarik empat garis lurus, yang tidak terputus-putus, tanpa mengangkat pensil atau pena anda. Jangan ada satu titik pun yang terlewatkan. Gambar ini sebagai contoh untuk mengantarkan anda memahami tentang proses berpikir atau bagaimana berpikir untuk pengembangan intelektual.



Mula-mula anda menangkap tulisan dan gambar titik-titik, inilah yang disebut dengan sensasi. Kemudian anda membaca dan mencoba memahami apa yang terkandung dalam gambar titik-titik tersebut, inilah yang disebut dengan persepsi. Pada saat yang bersamaan anda sebetulnya membongkar memori anda untuk memahami apa yang disebut dengan garis lurus, segi empat, dan kemungkinan soal yang sama pada waktu yang lalu, inilah yang disebut dengan memori.

Bila anda belum pernah mencobanya, cobalah! Anda mungkin gagal pada percobaan yang pertama. Sebelum percobaan yang kedua, anda akan memandang lagi titik-titik itu. Dalam benak anda, Anda membayangkan berbagai cara menarik garis lurus. Masih juga ada titik yang terlewatkan. Untuk mencoba setiap kemungkinan jawaban, Anda tidak perlu membuat lagi titik-titik itu. Anda tinggal membayangkan dalam benak Anda. Anda menggunakan gambaran dalam pikiran. Gambaran ini disebut *images* atau *citra* oleh Marx (1976) dan Coon (1977) menyebut *graphic*, *symbols* atau *lambang grafis*.

Jadi berpikir melibatkan penggunaan lambang, visual atau grafis. Tetapi untuk apa orang berpikir? Berpikir kita lakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan (*decision making*), memecahkan persoalan (*problem solving*), dan menghasilkan yang baru (*creativity*). Memahami realitas berarti, menarik kesimpulan, meneliti berbagai kemungkinan penjelasan dari realitas eksternal dan internal. Sehingga dengan singkat Anita Taylor et. Al (1977:55). dalam Rahmat (1999:68) mendefinisikan berpikir sebagai proses penarikan kesimpulan (*Thinking is a inferring process*).

Menetapkan keputusan (decision making) merupakan salah satu fungsi berpikir. Keputusan yang diambil beraneka ragam. Tetapi ada tanda-tanda umumnya yaitu: 1. Keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual; 2. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternative; 3. Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan.

Proses Memecahkan persoalan (problem solving), berlangsung melalui lima tahap: 1. Mengatasi dengan pemecahan yang rutin; 2. mencoba dengan cara efektif; 3. Penyelesaian mekanis dengan uji coba trial and error; 4. Menggunakan analogi; 5. Pemecahan masalah dengan pendekatan wawasan (insight solution).

Berpikir kreatif (creative Thinking), menurut Jamer C. Coleman dan Coustance L. Hammen (1974:452), adalah thinking which produces new methods, new concepts, new understandings, new inventions, new work of art. Berpikir kreatif harus memenuhi tiga syarat yaitu; 1. Kreativitas melibatkan respons atau gagasan yang baru; 2. Kreativitas dapat memecahkan persoalan secara realistis. 3. Kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang orisinal.

Colin Rose dan Malkolm J. Nicholl (2002:45), mengatakan Banyak ungkapan untuk menggambarkan otak manusia, "raksasa yang tidur, alat pemintal yang mempesona, seperangkat mesin terkompleks di jagat raya, wilaya terbesar di dunia yang belum tergali, supercomputer biologis, dan banyak lagi. Tanpa mepedulikan ungkapan yang berlebihan, analogi yang cerdas, serta metafora yang kreatif, otak manusia bersama capaian-capaian terbesar dalam sejarah manusia membenarkan semua ungkapan tersebut.

Otak manusia beratnya kira-kira satu setengah kilo, dan tampak seperti kacang mete yang keriput dan lembut, tidak begitu menarik pada pandangan yang pertama. Tetapi otak itu dapat menyimpan informasi lebih banyak dari semua

perpustakaan di dunia. Otak menjadi kekuatan yang melahirkan gagasan-gagasan terbaik yang pernah ada, dan mungkin akan ada di dunia ini. Otak mengatur fungsi tubuh, bertanggung jawab untuk semua perilaku, semua pikiran dan emosi, serta seluruh kepribadian manusia. Otak manusia adalah sebuah organ biologis, tetapi ia juga mesin yang menakjubkan, supercomputer. Mukjizat! Otak manusia benar-benar makhluk yang paling menakjubkan di seluruh alam semesta. Otak manusia adalah satu-satunya objek yang mampu memikirkan dirinya sendiri, tetapi otak tetap saja begitu misterius sehingga banyak orang menganggapnya sebagai daerah jelajah terakhir umat manusia. (Rahmat dalam pengantar:ix-x)

Craig Karges (1999) dalam Ummah (2005: x-xiii) menjelaskan Sebagai manusia kita cenderung meremehkan diri kita. Kita mengagumi computer, pada hal di dalam otak manusia terdiri dari bermilyar-milyar sel aktif. Disebutkan, minimal terdapat 100 milyar sel otak aktif atau koneksi listrik sejak lahir. Masing-masing sel dapat membuat jaringan sampai 20.000 sambungan tiap detik. Yang menarik (menakjubkan) adalah pada saat awal kehidupan kita, otak berkembang melalui proses belajar-alamiah dengan kecepatan 3 milyar sambungan per detik. Sambungan-sambungan ini adalah kunci kekuatan otak. Sehingga Gordon Dryden menyatakan, "You're the owner of the world's most powerful computer". Anda adalah pemilik computer paling hebat di dunia-otak Anda).

Pandangan yang senada dikemukakan oleh Robert Ornstein dalam Colin Rose (2002:46), menjelaskan bahwa otak manusia menunjukkan potensi mengagumkan yang belum sepenuhnya disadari. Tatkala manusia menemukan batas-batasruang angkasa, wilayah terluas yang belum terjajah justru berada di atas bumi ini di dalam batas-batas rongga kepala manusia. Kenyataannya, lebih banyak kemungkinan hubungan dalam otak manusia dari pada jumlah atom diseluruh jagat raya.

Otak manusia terdiri dari dua belahan, kanan dan kiri. Kedua-duanya berpikir dan mengendalikan tubuh manusia. Belahan otak sebelah kiri mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan, dan belahan otak sebelah kanan mengendalikan tubuh sebelah kiri. Setiap belahan otak tampaknya terspesialisasi dalam fungsi tertentu. Spesialisasi otak sebelah kiri adalah bahasa lisan dan tulisan, logika, keterampilan matematis, dan konsep-konsep ilmiah. Pekerjaan yang melibatkan otak sebelah kiri misalnya akuntansi, pekerjaan laboratorium dan sebagainya. Sedangkan spesialisasi otak sebelah kanan adalah mengenal pola dan bentuk dan bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain, membangun kemampuan berimajinasi, mengapresiasi seni dan memahami rumor.

Otak sebelah kanan dengan kekuatan imajinasi yang biasa juga disebut dengan menciptakan pencitraan; "Orang mati beku dalam mobil pendingin". Ini judul berita dalam salah satu surat kabar, tapi yang mengherankan, temperature di mobil pendingin itu sama sekali tidak dingin, karena sudah lama mesin pendinginnya dimatikan. Jadi mengapa ia mati? Jawabannya: Ia percaya betul bahwa ia masuk ke mobil pendingin, ia percaya bahwa ia akan mati kedinginan. Pikirannya atau lebih tepat dikatakan sebagai kekuatan imajinasinya mempengaruhi hidupnya sehingga terjadi hypothermia. Jadi kekuatan imajinasi adalah salah satu jembatan yang menghubungkan jiwa dengan tubuh. Dr. Simonton yang pertama kali menguji cobakan Pencitraan pada pasien penderita tumor ganas, pelari cepat yang mengalami cedera pada kaki kanannya.

Jika the power of imagination dapat menghilangkan kanker dari penderitanya, bisakah ia dengan cara yang sama memasukkan genius ke dalam otak manusia? Jawabannya menakutkan: Bisa! Karena orang yang pernah melakukan hal yang terakhir ini adalah Einstein, oleh Dr. Win Wenger dan Richard Poe menyebutnya The Einstein Factor.

Ketika kecil, Einstein dianggap bodoh dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Ia mengalami kesulitan untuk berbicara dan membaca .“Perkembangan masa kanak-kanaknya berlangsung sangat lambat” Ia dikeluarkan dari sekolah, ia juga gagal ujian masuk ke perguruan tinggi. Tetapi pada usia 26 tahun ia menerbitkan teori relativitasnya $E=mc^2$. Lalu bagaimana Einstein menemukan teorinya, Einstein berkata “ I did not arrive at my understanding of the fundamental law of the universe through my reational mind” Kalau bukan kecerdasan IQnya yang cemerlan, apa yang menjadikan Einstein genius terbesar abad dua puluh.

Psikolog Robert Dilts mengemukakan bahwa Berdsarkan catatan surat-menyurat Einstein dengan Sigmund Freud dan hasil wawancara dengan Wax Wertheimer menemukan bahwa “ Einstein berpikir dengan menggunakan citra visua dan perasaan atau kekuatan imajinasi. Kemudian kepada Wax Wertheimer, Einstein berkata These thoughts did not come in any verbal formulation. I very rarely think in words at all.

Seorang atlit pancalomba kelas dunia, Marilyn King terbaring di rumah sakit. Pesta Olimpiade kian dekat, namun cedera menceganya untuk ikut latihan. “Gangguan “smacam itu akan menghancurkan karirnya, tapi, Marilyn mempunyai senjata pamungkas dalam perbendaharaan jiwanya. Dia berani berimajinasi, dia mempraktekkannya dalam pikirannya seperti ia melakukannya di lapangan. Dalam keterkungkungannya dalam kamar rumah sakit dia menukar latihan fisik dengan latihan imajinasi (mentalnya), dan terus berimajinasi membayangkan dirinya berlatih sungguh-sunggu, bahkan kadang ia mebayangkan ketika ia memenangi lombalombanya dalam kompetisi dalam olimpiade.(Colin Rose, 2002:101)

Dengan memperhatikan kutipan di atas, para pendidika atau guru diharap membawa praktek the power of imagination ke ruang-ruang kelas. Sebab the power of imagination dapat

membantu meningkatkan kecerdasan IQ atau meningkatkan kemampuan pengembangak intelektual peserta didik atau siswa. Kekuatan imajinasi bukan saja mampu mengembangkan macam-macam kecerdasan, tetapi juga dapat menciptakan realitas seperti yang dibayangkan.

Setelah kita mengetahui bahwa otak kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana cara mengoptimalkannya? Jawabannya akan kita bahas pada bagian berikut ini.

Sebelum melanjutkan pembahasan ini, saya kutifkan satu cerita tentang pelelangan otak, yang sangat menegangkan-mungkin diantara kita suda ada yang perna mendengar ceritanya. Alkisah terjadilah proses pelelangan otak kelas dunia. Otak orang Jerman yang ahli teknologi, dilelang seharga seribu dollar. Otak orang Jepang, yang sangat kreatif dilelang seharga 10 ribu dollar. Sedangkan otak orang Indonesia dilelang dengan harga paling mahal: 100 juta dollar! Mengapa? Karena otak orang Indonesia masih utuh, asli, sama sekali bebum perna digunakan.

Aspek-aspek intelektual dalam belajar akan terlatih jika melibatkan pembelajar (peserta didik) terlibat dalam aktivitas seperti : Memecahkan masalah, menganalisis pengalaman, mengerjakan perencanaan strategi, melahirkan gagasan kreatif, mencari dan menyaring informasi, merumuskan pertanyaan, menciptakan model mental, menciptakan makna pribadi, meramalkan implikasi suatu gagasan.

Di bawah ini ada beberapa gagasan tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat seluruh kecerdasan pembelajar (peserta didik) terlibat dalam pembelajaran atau pengembangan intelektual adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Informasi. Dalam banyak kasus, yang terbaik adalah mengajari pembelajar (peserta didik) cara mengakses informasi dan bukan bagaimana cara menyimpan informasi. Jaringan adalah sumber informasi yang luar biasa untuk semua subjek. Mengajari Pembelajar

- cara mengakses informasi pada jaringan dan menerjemahkannya ke dalam pengetahuan yang dapat dipraktikkan merupakan pengajaran yang sempurna bagi pengembangan kecerdasan intelektual pembelajar.
2. Pemecahan Masalah. Suatu program lebih baik diisi dengan pengajuan masalah dari pada pemberian jawaban. Pemecahan masalah mengajari pembelajar cara berpikir sendiri dan cara menciptakan makna.
 3. Pemetaan Konseptual. Mintalah pembelajar menyusun peta atau grafis konseptual yang saling berkaitan dari apa yang sedang mereka pelajari, dengan menggabungkan berbagai komponen suatu subjek dalam suatu kesatuan yang menyeluruh.
 4. Pembuatan Model. Mintalah pembelajar menciptakan model 3-demensi dari materi subjek yang menunjukkan bagaimana segala sesuatunya cocok dan menyatu sehingga dapat dipahami.
 5. Penyusunan Tes. Ketika pembelajar mendengarkan kaset, mengamati potongan-potongan gambar dalam video, mengikuti tutorial lewat computer, membaca materi tertulis, mintalah pembelajar menyusun tes 10 atau 20 pertanyaan yang dapat mereka ajukan kepada mitra atau kolega yang sedang mengambil materi pelajaran yang sama.
 6. Citraan Mental. Mintalah pembelajar berpaling dari computer, menutup mata, dan membayangkan diri mereka mempraktikkan suatu keterampilan yang berkaitan dengan materi belajar. Lalu, mintalah mereka menulis, menggambar, melukiskan kepada orang lain apa yang mereka alami.
 7. Renungan. Berilah pembelajar waktu untuk menjauh dari semua media dan mintalah mereka merenungkan apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka menerapkannya. Setelah cukup waktu mintalah mereka mengetik atau

menulis renungan mereka dalam bentuk kata-kata atau gambar.

8. Penyusunan Pertanyaan. Berilah pembelajar jawaban dan mintalah pembelajar membuat pertanyaan.

Wina Sanjaya, (2005:115) mengemukakan model pembelajaran yang mampu mengembangkan intelektual pembelajar dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran.
2. Siswa belajar melalui kegiatan kelompok, seperti kerja kelompok, berdiskusi, saling menerima, dan memberi.
3. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara riil.
4. Kemampuan siswa didasarkan atas pengalaman
5. Tujuan akhir dari proses pembelajaran adalah kepuasan diri.
6. Dindakan dan perilaku siswa dibangun atas kesadaran diri sendiri.
7. Pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya, oleh sebab itu setiap siswa bias jadi berbeda dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya.
8. Siswa bertanggung jawab dalam memonitor dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing.
9. Pembelajaran bias terjadi di mana saja dalam konteks dan setting yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.
10. Keberhasilan pembelajara siswa diukur dengan berbagai cara misalnya dengan evaluasi proses, hasil karya siswa, penanpilan, rekaman, observasi, wawancara, dsb.

Belajar bukanlah peristiwa mekanis seperti keterkaitan Stimulus dan Respons. Belajar tidak sederhana itu, belajar melibatkan proses mental yang tidak tampak seperti emosi, minat, motivasi, dan kemampuan atau pengalaman. Apa yang tampak, pada dasarnya adalah wujud dari adanya dorongan

yang berkembang dalam diri seseorang. Sebagai peristiwa mental perilaku manusia tidak semata-mata merupakan gerakan fisik saja, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya factor pendorong yang ada dibelakang gerakan fisik itu. Mengapa demikian? Sebab manusia selamanya memiliki kebutuhan yang melekat dalam dirinya. Kebutuhan itulah yang mendorong manusia untuk berperilaku.

Asumsi dan latar belakang yang mendasarinya, maka terdapat beberapa hal yang harus dipahami tentang belajar dalam konteks CTL (Contextual Teaching and Learning) sbagai berikut:

1. Belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses mengonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Oleh sebab itu, semakin banyak pengalaman maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang merekaperoleh.
2. Belajar bukan sekedar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas. Pengetahuan itu pada dasarnya merupakan organisasi dari semua yang dialami, akan berpengaruh terhadap pola perilaku manusia, seperti ; pola berpikir, pola bertindak, kemampuan memecahkan persoalan. Semakin pengetahuan seseorang luas dan mendalam, maka akan semakin efektif dalam berpikir.
3. Belajar adalah proses pemecahan masalah, sebab dengan memecahkan masalah anak akan berkembang secara utuh yang bukan hanya perkembangan intelektua akan tetapi juga mental dan emosi. Jadi belajar kontekstual adalah belajar bagaimana anak menghadapi setiap persoalan.
4. Belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang secara bertahap menuju yang kompleks. Oleh karena itu belajar tidak dapat sekaligus, akan tetapi sesuai dengan irama kemampuan siswa.
5. Belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan. Oleh karena itu, pengetahuan yang

diperoleh adalah pengetahuan yang memilikimakna untuk kehidupan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwikarta, Sudordjana. *Sosiologi Pendidikan Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*. Jakarta: Depdikbud, 1988.
- AECT. *The Defenition of Educational Techneology*, Washington DC. 1977.
- Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Reneka Cipta, 1991.
- Ali, H. Muhammad. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- A. M. Soediman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Anita Lie. *Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang - Ruang Kelas*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Anonim, *Panduan Manajemen Sekolah*, Depdiknas, Dikmenum, 2000.
- Anonim, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan/Kultur Sekolah*, Depdiknas, hand out pelatihan calon kepala sekolah, Direktorat Sekolah lanjutan Pertama, 2000.
- Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arifin, I. "Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi". *Simposium Nasional Pendidikan* di Universitas Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001.
- Arifin, Anwar. *Paradigms Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*. DPR RI, Jakarta: 2003.
- Arikunto, Suharsini, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Asri Budiningsih, *Upaya Ke arah pembelajaran Moral yang Demokratis*, Seminar dan Diskusi Panel Nasional Teknologi Pembelajaran V, Diselenggarakan Oleh Prodi

- TP PPS Universitas Neheri Malang dan Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia, Malang, 7 Oktober 2000.
- Badingah, S. *Agresivitas Remaja Kaitannya dengan Pola Asuh, Tingkah Laku Agresif Orang Tua dan Kegemaran Menonton Film Keras*. Program Studi Psikologi – Pascasarjana, UI. Depok. 1993.
- Banks, J.A. *Teaching strategies for the social studies*. New York: Longman, 1985.
- Berkowitz, M.W., Battistich, V.A., Bier, M.C. "What Works in Character Education: What Is Known and What Needs to Be Known". *Handbook of Moral and Character Education*. Pages 414-431. New York: Tailor and Francis, 2008.
- Bobbi, Deporte. *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Bandung: Kaifa, 2002.
- Buchori, Mochtar. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Buchori, Mochtar. *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1995
- Buchoti, Mochtar. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Colin Rose. *Acelerated Learning: For The 21ST Century Cara Belajar Cepat Abad XXI*. Bandung: Nuansa, 2002.
- Cowling, Alan & Philip James. *The Essence of Personnel Management an Industrial Relation*. (terjemahan). Yogyakarta: ANDI, 1996.
- Dahar, R.W. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989.
- Dahidi, Ahmad dan Miftachul Amri. *Potret Pendidikan di Jepang, Sebuah Refleksi*, Yogyakarta: Pikiran Rakyat, 2003
- Danim, Sudarwan. *Visi Baru Manajemen Pendidikan, Dari uni Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dede Rosyadah. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Dave Meier. *The Accelerated Learning: Hand Book*. Bandung: Kaifa, 2002.
- Degeng, I Nyoman Sudana. *Pengorganisasian pengajaran berdasarkan Teori Elaborasi dan Pengaruhnya Terhadap Perolehan Belajar Informasi Verbal dan Konsep*. Malang: FPS IKIP Malang, 1988.
- Degeng, I Nyoman Sudana. *Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel*. Depsikbud, Diden Pendidikan Tinggi. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK, 1989.
- Degeng, P. and Kauchak, D. 1997. *Educational Psychology*. Prentice Hall, New Jersey, Clombus.
- Depdiknas. *Kebijaksanaan di Bidang Pendidikan Dasar*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2001.
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan. *Komunitas Sekolah Rumah sebagai Satuan Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan Kesetaraan Mencerdahkan Anak Bangsa*, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Jakarta, 2006.
- Doliman, A. *Gerakan Wajib Belajar, Hakekat dan Tantangannya*, Cakrawala Pendidikan. Edisi Mel. 1995.
- Eddy Wibowo, Mungin. " *Ujian Nasional, Kenapa Ditolak* "
- Eka, R. *Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia*, 2007. (<http://edu-articles.com>, diakses 9 Oktober 2011)
- Engkoswara. *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga, 2001.
- ERIC Resource Center ED475389 2003-06-00 *Character Education: What Counselor Educators Need To Know*. ERIC/CASS Digest. www.eric.ed.gov. Diunduh 2 Maret 2010.
- Gagne, Robert M. *Prinsip-Prinsip Belajar untuk Pengajaran*. terjemahan Abdillan Hanafi & Abdul Manan Surabaya: Usaha Nasional, 1988.

- Gagne, Robert M. *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York: Holt Rinehart and Winston Inc, 1973.
- Gagne, Robert M., dan Leslie J. Briggs. *Principles of Instructional Design*. New York: Holt Rinehart and Winston Inc, 1974.
- Gagne, R.M. *Essential of Learning for Instruction*. New York: Rinehart, 1975.
- Gaspersz, Vincent. *Penerapan Total Management In Education (TQME) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia, Jurnal Pendidikan* (online), Jilid 6, No. 3 (<http://www.ut.ac.id> diakses 20 Januari 2001).
- Georgiades, William. *Inovasi Pendidikan*. Jakarta. P2LPTK, 1988.
- Gordon, Thomas. *Guru yang Efektif*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Gordon Dryden. *Revolusi Cara Belajar (The Learning Revolution): Bagian I Kenjaiban Pikiran*. Bandung: Kaifa, 2002.
- Gordon Dryden. *Revolusi Cara Belajar (The Learning Revolution): Bagian II Sekolah Masa Depan*. Bandung: Kaifa, 2002.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia, 2002
- Hamalik, Oemar. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Hamid K, Abdul. *Pengaruh Pemberian Rangkuman dan Gaya Kognitif Terhadap Perolehan belajar*. Malang: PPS Malang. 1992.
- Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Hanafiah, M. Jusuf, dkk, *Pengelolaan Mutu Total Pendidikan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri, 1994.
- Haryanti, Mien dan Paulus Mujiran. " *Kontroversi Ujian Nasional* ". Suara Merdeka : 15 Februari 2005.

- Hasbullah, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Raja Grafindo. Jakarta: Persada, 2003.
- Hersh, R.H., Miller, J.P. & Fielding, G.D. Model of moral education: an appraisal. New York: Longman, Inc., 1980.
- Hery Wibowo, *Psikologi untuk pengembangan diri* : Bandung: Widya, 2010.
- <http://murniramli.wordpress.com/2007/04/13/kurikulum-sma-di-jepang/>
- <http://saniroy.wordpress.com/2006/05/05/cinta-tanah-air-ala-jepang/>
- http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed444932.html
Retrieved February 15, 2009.
- http://pakguruonline.pendidikan.net/pradigma_pdd_ms_depan_34.htm
- <http://pormadi.wordpress.com/2007/11/12/homeschooling/>
diakses tanggal 14 Desember 2011.
- <http://www.voanews.com/indonesian/news/Jutaan-Anak-Indonesia-Belum-Tersentuh-Pendidikan-126587263.html>, diakses tanggal 10 November 2011.
- [http://edukasi.kompas.com/read/2011/08/10/09312285/Mengenai.Metode-metode Homeschooling](http://edukasi.kompas.com/read/2011/08/10/09312285/Mengenai.Metode-metode_Homeschooling), diakses tanggal 12 Desember 2011.
- <http://www.pendidikankarakter.com/karakter-anak-adalah-karakter-turunan/>
- <http://www.pendidikankarakter.com/proses-pembentukan-karakter-pada-nak/>
- <http://www.pendidikankarakter.com/pentingnya-memahami-kebutuhan-emosional-anak/>
- <http://www.pendidikankarakter.com/cara-jitu-menumbuhkan-semangat-elajar-pada-anak/>
- <http://www.pendidikankarakter.com/cara-terbaik-memahami-anak/>
- <http://www.pendidikankarakter.com/wajah-sistem-pendidikan-di-indonesia/>

<http://www.pendidikankarakter.com/membangun-karakter-sejak-pendidikan-anak-usia-dini/>
<http://www.pendidikankarakter.com/macam-macam-kepribadian-anak/>
<http://www.pendidikankarakter.com/peran-pola-asuh-dalam-membentuk-karakter-anak/>
<http://www.pendidikankarakter.com/cara-ampuh-mengatasi-persaingan-antar-saudara/>
<http://www.pendidikankarakter.com/bisakah-hypnosis-mengubah-karakter-anak/>
[http://www.pendidikankarakter.com/karakter-anak-adalah-karakter-turunan/Isjoni. *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.](http://www.pendidikankarakter.com/karakter-anak-adalah-karakter-turunan/Isjoni.PendidikanSebagaiInvestasiMasaDepan.Jakarta:YayasanOborIndonesia,2006.)
<http://encyclopedia.thefreedictionary.com>. Diakses tanggal 26 April 2004.
http://indo2.islamic-world.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34:peranan-keluarga-dalam-pendidikan-karakter-anak&catid=9:psikologi-islam&Itemid=16
http://indo2.islamic-world.net/index.php?option=com_jcomments&task=rs&object_id=34&object_group=com_content&format=raw
<http://zaldym.wordpress.com/2008/07/17/home-schooling-sekolah-rumah-pilihan-untuk-kembangkan-potensi-anak/> (diakses 20 april 2012)
<http://homeschoolingkaksetosemarang.com/page/28621/syarat-pendaftaran.html> (diakses 20 april 2012)
<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2191205-syarat-pelaksanaan-homeschooling/#ixzz1sZdcuj4L> (diakses tanggal 20 april 2012)
<http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/homeschooling-pendidikan-alternatif.html> (diakses 20 april 2012)

- <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2090812-pengertian-homeschooling/#ixzz1sZG2wY2A> (diakses 20 april 2012)
- Ikhsan, M. Pendidikan Alternatif di Indonesia, 2006. [Online]. Tersedia:
<http://teknologipendidikan.wordpress.com/2006/09/12/pendidikan-alternatif-di-indonesia/>.
- Imran Manan, *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989.
- Irawan, Ade. " *Kontroversi Ujian Nasional* ". Koran Tempo : 4 Februari 2005
- Ismail, Muh Ilyas. *Ilmu Pendidikan Praktis*. Jakarta: Ganeca Exact, 2008.
- Ismail, Muh Ilyas. *Ilmu Pendidikan Teoretis*. Jakarta: Ganeca Exact, 2008.
- Ismail, Muh Ilyas. *Orientasi Baru dalam Ilmu Pendidikan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Ismail, Muh Ilyas. *Pendidikan Karakter Suatu Pendekatan Nilai*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya, 1999.
- J. Drost. *Dari KBK (Kurikulum Bertujuan Kompetensi) Sampai MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Joesoef, Soeleiman. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Bumi Aksara. Jakarta, 1992.
- Kartadinata, Sunaryo. *Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI*. Purwokerto: Makalah Konvensi. 1997.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kebijakan Nasional Pembengunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta: Puskur dan Perbukuan, 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Puskur dan Perbukuan, 2010.

- Kementerian Pendidikan Nasional. *Pengembang Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Puskur dan Perbukuan, 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Puskur dan Perbukuan, 2011.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Puskur dan Perbukuan, 2011.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Puskur dan Perbukuan, 2011.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. 2011.
- Kejujuran. <http://wijiwasraya.co.id/contents/article.2005>
- Kemp. J.E. *Instructional Design Process (terjemahan Asril Madulan)*, Bandung: ITB, 1994.
- Khairul Ummah, et.al., *SEPIA: 5 Kecerdasan Utama Merai Bahagis dan Sukses*. Bandung: Ahaa Pustaka, 2005.
- Kohlberg, L. Stages of moral development as a basis of moral education. Dlm. Beck, C.M., Crittenden, B.S. & Sullivan, E.V.(pnyt.). *Moral education: interdisciplinary approaches*: 23-92. New York: Newman Press, 1971.
- Kohlberg, L. The cognitive-developmental approach to moral education. Dlm. Rogers, D. *Issues in adolescent psychology*: 283-299. New Jersey: Printice Hall, Inc, 1977.
- Kompas. *Gaji Guru Setara Harga 6 Bungkus Rokok*. 11 Desember 2007.
- LCCPTC, *"Kegagalan Guru dalam Melakukan Evaluasi Pendidikan"*, dalam *Media Indonesia On-Line*, 16 Januari 2008.
- Linsenbach, Sherri. *Everything Homeschooling Book*. Adams Media Corporation, Massachusetts, 2003.

- Media Indonesia. *Pelit untuk Guru Boros untuk Politik*. 05 Desember 2006.
- Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter untuk Membangun Masyarakat Madani*. IPPK Indonesia Heritage Foundation, 2003.
- Miarso, Yusufhadi. *Teknologi Komunikasi pendidikan, Pengertian dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Muhammad Amin, Maswardi. *Pendidikan Karakter Anak bangsa*. Jakarta: Baduose Media, 2011.
- Mulyadi, Agus. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Departemen Pendidikan. 2004.
- Mulyadi, Seto. *Homeschooling Keluarga Kak Seto: Mudah, Murah, Meriah dan Direstui Pemerintah*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Mulyana, Enceng. *Model Tukar Belajar (Learning Exchange) dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Mulyasa. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bandung: Bumi Aksara, 2011.
- Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Remaja Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Mulyasa, E., *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyasa E., *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muzakki, Akhmad. *Menakar Unas, " Memperbaiki Persekolahan "*. Duta Masyarakat : 5 Juli 2007.
- Nasution, MN, *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Nawawi, Hadar, Mimi Marthini. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, 1994.

- Ngalim Purwanto, M, *Ilmu pendidikan Teoritis dan Praktis*, bandung : penerbit Remadja karya, 1986.
- Oni Suryaman, "Apa itu Homeschooling" dalam Error! Hyperlink reference not valid.diakses pada tanggal 17 Desember 2011.
- Otten, E. H. 2000. "*Character Education*. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/ Social Science Education". ERIC Document Reproduction Service, No. ED 444 932).
- Paul Suparno, *Teori Inteligensi Ganda*, Kanisius: Yogyakarta, 2003
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Prayitno. *Budi pekerti dan pendidikan. Kertas kerja seminar pendidikan budi pekerti, anjuran Pusat Kurikulum dan Sarana Pendidikan*, Balitbang Dikbud, 2-3 Ogos 1994.
- Prayitno, dkk. *Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*: 1997.
- Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Purwanto, Yadi, *Etika Profesi, psikologi Profetik perspektif psikologi Islami*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2007.
- Ramli, Munas Prianto. *Homeschooling: Sebuah Upaya Pemerataan Akses Pendidikan bagi Generasi Putus Sekolah dan dan Generasi di Wilayah Terpencil*, Makalah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Ransom, Marsha. *The Complete Idiot's Guide to Homeschooling*, USA: Alpha Publishing, 2001.
- Rest, J.R. *Komponen-komponen utama moralitas*. Dlm. Kurtines, W.M. & Gerwitz, J.L. (pnyt.). *Moralitas, perilaku moral, dan perkembangan moral*:37-60. Terj. Soelaeman, M.I. & Dahlan, M.D. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- Richardson, R.C., Tolson H., Huang, T.Y., Lee, YH.. 2009. "*Character Education: Lessons for Teaching Social and*

- Emotional Competence". Children & Schools. Apr 2009; 31, 2; pg. 71.*
- Robinson, Philip. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Ryan, K. & Bohlin, K. 2000. Teacher Education\'s Empty Suit. *Education Week on the WEB*. <http://www.edweek.org/ew/ewstory.cfm?slug=26ryan.h19>. Diakses 19 Mei 2012.
- Samani, Muchlas. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sanjaya, Wina. *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Sanusi, Achmad. *Pendidikan Alternatif*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 1998.
- Sarie Febriane/ Clara Wresti, *Rumah Kelasku, Dunia Sekolahku*, Harian Kompas, 13 Maret 2005
- Seifert, Kelvin. *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan; Manajemen Mutu Psikologi Pendidikan Para Pendidik*. Yogyakarta: Ircisod, 2007.
- Semiawan, Conny R. 2007. *Landasan Pembelajaran Dalam Perkembangan Manusia*. PPKM. Jakarta
- Seto, Kak. *Setiap Anak Cerdas, Mengoptimalkan Perkembangan Kecerdasan pada Anak Sejak Usia Dini* <http://irihadi.blogspot.com> Sindhunata; 2001; *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, 2006.
- Silverius, Suke. *Siswa Jujur Menjadi Pemimpin Jujur*. Bunga Rapai Isu-Isu Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Depdiknas, 2006

- Silverius, Suke. *Sopan Santun Pergaulan Cerminkan Citra Sekolah dan Bangsa*. Bunga Rampai Isu-Isu Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Depdiknas, 2006
- Simbolon, P. Homeschooling sebagai Pendidikan Alternatif. 2008. [Online]. Tersedia: <http://pormadi.wordpress.com/2007/11/12/homeschooling/>.
- Slamet, PH. *Karakteristik Kepala Sekolah Yang Tangguh*, *Jurnal Pendidikan*, Jilid 3, No. 5 (online) (<http://www.ut.ac.id> diakses 20 Januari 2001).
- Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Sumadi Surya Brata, *Psikologi kepribadian*: Jakarta: Rajawali, 1990.
- Sumardiono, Model Home Schooling, 2006. [Online]. Tersedia: http://www.sumardiono.com/index.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=80.
- Sumardiono, Homeschooling Semakin Meluas. [Online]. Tersedia: http://www.sumardiono.com/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=79, 2007.
- Sumardiono, *Homeschooling; Lonjakan Cara Belajar*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Suparno, Paul, Moerti Yoedho K., Detty Titisari, St. Kartono. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Supriadi, D. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Jakarta: Depdikbud, 1998.
- Suryadi, Ace, "Mutu Profesi Guru", *Kompas*, 9 Maret 2001.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. *Belajar dari Jepang, Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup*. Jakarta: Ui Press, 1987.
- Suryosubroto, B. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sutermmeister, Robert A. 1976. *People and Productivity*. Tokyo: Mc Graw-Hill Books Company.
- Suyono. *Masa Depan Guru dan Guru Masa Depan*. <http://www.bpkpenabur.or.id>, 2001.
- Suyono. *Meningkatkan Mutu Guru Dari Mana Memulainya?* <http://www.depdiknas.go.id>, 2005.
- Stone, C. and Dyal, M.A. 1997. "School Counselors Sowing the Seeds of Character Education". *Professional School Counseling*, Dec 1997; 1, 2; pg. 22-24.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Syafaruddin. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Syafruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta : Ciputat Press, 2005.
- Tangyong, A. F. Dkk. *CBSA : Membina Guru Profesional*. Jakarta: Depdikbud, 1985.
- Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tilaar H.A.R., *Standarisasi Pendidikan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Fokusmedia, Bandung 2003
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. *Tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*.
- Usman, Husaini, *Peran Baru Administrasi Pendidikan dari Sistem Sentralistik Menuju Sistem Desentralistik*, dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, Februari 2001, Jilid 8, Nomor 1.
- Usman, Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Washington, E. Y., Clark, M.A. and Dixon, A.L. 2008. "Everyone in School Should Be Involved" *Preservice Counselors' Perceptions of Democracy and the Connections Between*

- Character Education and Democratic Citizenship Education*". *Journal of Research in Character Education*, 6(2), pp. 63-80.
- Wayan Ardhana, *Reformasi Pembelajaran : Menghadapi Abad Pengetahuan*, Seminar dan Diskusi Panel Nasional Teknologi Pembelajaran V, Diselenggarakan Oleh Prodi TP PPS Universitas Neheri Malang dan Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia, Malang, 7 Oktober 2000.
- Williams, M. 2000. "Models of Character Education: Perspectives and Developmental Issues". *Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*, 39, pp. 32-40.
- Williams, M., & Schnaps, E. (Eds.) 1999. *Character Education: The foundation for teacher Education*. Washington, DC: Character Education Partnership.
- Vasta, Ross, at all. *Child Psychology : The Modern Science*. John Wiley & Sons Inc, 1992.
- Van Galden (ed). *Homeschooling; Political, Historical and pedagogical Perspective*, Ablex Publishing Corporation, New Jersey, 1991.
- Yorgi Gusman, *Ikutan Home Schooling*, 08 September 2006.
- Yusuf Luxori, *Mengenal kekurangan diri* . Jakarta: Khalifa, 2008.
- Zakaria, T. Ramli. *Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasi dalam Pendidikan Budi Pekerti*. <http://www.pdk.go.id/balitbang/Publikasi/Jurnal/no.026>. [academe@indopubs.com](http://www.academe@indopubs.com), 2007.

RIWAYAT HIDUP



Muh Ilyas Ismail, dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1964, di Ralla Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Anak keempat dari sembilan bersaudara, putra pasangan Bapak Muhammad Ismail dan Ibu Hj. Hamdanah. Menamatkan SDN Ralla I tahun 1977, SMPN Ralla tahun 1980 di Kab. Barru. SMA Muhammadiyah 2 tahun 1983, dan STM Pembangunan tahun 1984 masing - masing di Makassar.

Sarjana Pendidikan IPA Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin sekarang UIN Alauddin Makassar tahun 1990. Lulus S2 Prodi IPS PPs UNM tahun 2001, lulus S2 Prodi Ilmu Komunikasi Pendidikan PPs UNHAS tahun 2004. Pada tahun 2007 melanjutkan studi S3 pada Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan PPs Universitas Negeri Jakarta dan selesai 2011.

Sejak tahun 1994 diangkat menjadi dosen tetap Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin sekarang UIN Alauddin Makassar sampai sekarang, dan juga menjadi dosen tidak tetap pada beberapa Universitas Swasta di Sulawesi Selatan. Sejak Tahun 2012 menjadi dosen pqqd PPs UIN Alauddin Makassar. Jabatan yang pernah diemban antara lain: Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah, Kepala Laboratorium IPA Fakultas Tarbiyah, Senat Fakultas Wakil dosen, Sekretaris Jurusan Pendidikan Fisika, Sekretaris Jurusan Pendidikan Biologi, Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains.

Publikasi karya ilmiah (buku): 1) Ilmu Pendidikan Praktis (Buku Penerbit Ganeca Exact 2008), 2) Ilmu Pendidikan Teoretis (Buku Penerbit Ganeca Exact 2008), 3) Pendidikan Karakter Suatu Pendekatan Nilai (Buku Penerbit Alauddin University Press 2012), 4) Orientasi Baru dalam Ilmu Pendidikan (Buku Penerbit Alauddin University Press 2012).

Pengalaman berorganisasi Ketua Komisariat HMI Fakultas Tarbiyah (1987-1988), Ketua Bidang Kerohanian HMI Cabang Makassar (1988-1989), Wakil Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana UNM (1998-1999), Ketua I Forum Mahasiswa Pascasarjana UNHAS (2000-2001), Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana UNJ (2009-2010), Ketua I Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (2009-2012), Anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan, Pengurus HEPI Cabang Makassar tahun 2011-sekarang.

Tahun 1995 menikah dengan Asriani Amir, S.Ag., M.Pd. telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra-putri yaitu; Nurfikriyah Irhashih Ilyas (17 th, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar), Muhammad Fadhilfahmi Ilyas (14 th, siswa kelas X SMA 2 Makassar), dan Nurfirdayanti Wahyuni Ilyas (9 th, siswi kelas 3 SDN Minasa Upa Makassar).

Muhammad Ilyas Ismail beralamat di kompleks BTN Minasa Upa Blok M17 No. 8 Makassar Sulsel, e-mail: iilyasismail@yahoo.co.id, daengilyas12@gmail.com, phone: 0812 423 9850,



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS



9 786022 377139